



**KEBERADAAN MODAL SOSIAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN
DANA PUAP KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:
Nyla Zukhrufa Hadi
081510601029

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/AGRIBISNIS
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**KEBERADAAN MODAL SOSIAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN
DANA PUAP KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

Oleh:

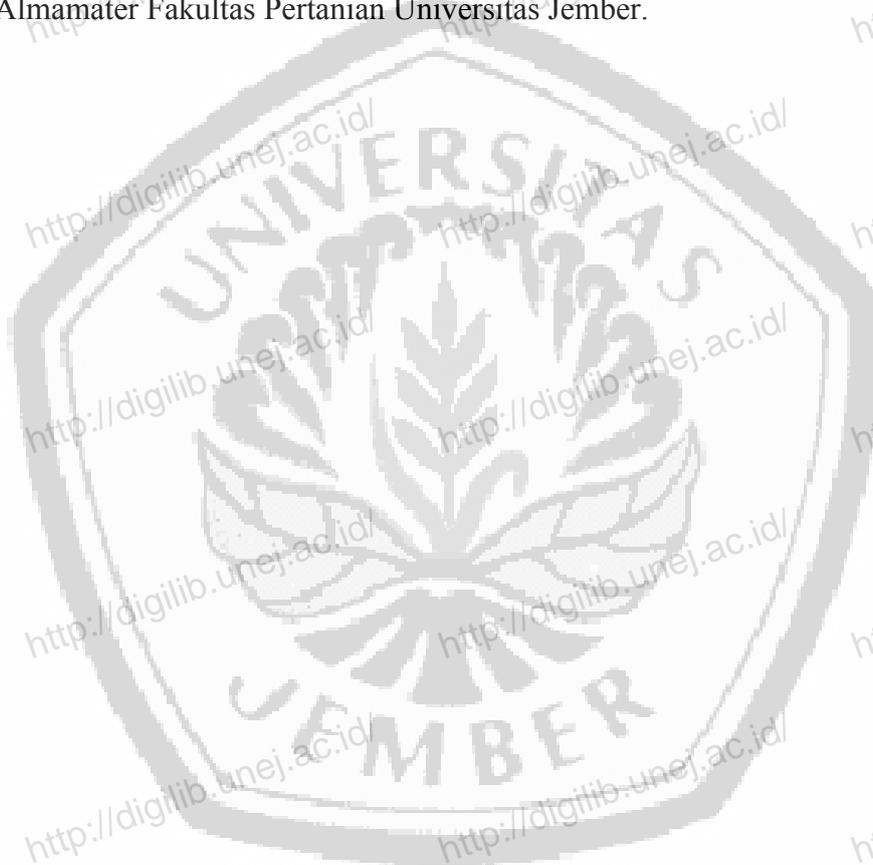
Nyla Zukhrufa Hadi
081510601029

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/AGRIBISNIS
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah (Ir Kamarul Hadi), mama (Mariette Louis), 5 adikku (Qorrie, Zulvie, Vira, Evan dan si cakep Louis);
2. Sahabat-sahabatku (Viky, Agung, Rama, Aries, Bojes);
3. Almamater Fakultas Pertanian Universitas Jember.



MOTTO

Man Jadda Wa Jadda.
(dikutip dari film 9 menara) *)

atau

Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah hadiah, esok adalah misteri, MAKA
pergunakan waktumu dengan sebaik mungkin.
(dikutip dari film kungfu panda) **)

atau

Disetiap kesulitan pasti ada kemudahan, maka serahkan pada Allah SWT. ***)



*** Anonim

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nyla Zukhrufa Hadi

NIM : 081510601029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: ” KEBERADAAN MODAL SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA PUAP KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2013

Yang Menyatakan

(Nyla Zukhrufa Hadi)
NIM 081510601029

SKRIPSI

**KEBERADAAN MODAL SOSIAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN
DANA PUAP KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Nyla Zukhrufa Hadi
NIM 081510601029

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aryo Fajar S., SP., M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Ir. Sri Subekti, MSi.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Keberadaan Modal Sosial dan Strategi Pengembangan Terhadap Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Pertanian pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Aryo Fajar S., SP., M.Si.
NIP 197401161999031001

Anggota I,

Anggota II,

Ir. Sri Subekti, M.Si.
NIP 1966062619900032001

Diah Puspaningrum, SP.M.Si.
NIP 197602102005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Pertanian,

Dr. Ir. Jani Januar, M.T.
NIP 196111101988021001

RINGKASAN

Keberadaan Modal Sosial dan Strategi Pengembangan Terhadap Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember; Nyla Zukhrufa Hadi, 081510601029; 2013; Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diluncurkan Departemen Pertanian sejak tahun 2008 merupakan strategi Departemen Pertanian yang menjawab kesulitan petani dalam rangka akses permodalan yang dipusatkan di Gapoktan dan melindungi petani dari jeratan rentenir. Dana PUAP awalnya diberikan kepada Gapoktan, yang selanjutnya Gapoktan diberi keleluasan untuk mengelola dana tersebut. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada petani guna memenuhi permodalan petani. Sebesar Rp 100.000.000, dana yang diberikan ke setiap Gapoktan untuk dikelola dan digulirkan kepada anggota.

Pada Juknis (Petunjuk Teknis) PUAP telah tercatat pengelolaan dana PUAP berdasarkan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis), karena output yang diharapkan dengan adanya Program PUAP adalah terbentuknya LKMA Mandiri. Pada kenyataan di beberapa daerah pengelolaan dana PUAP terdapat penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan Juknis Deptan dengan terdapatnya peluang terjadinya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Hal tersebut dikarenakan Gapoktan diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana PUAP sebesar Rp 100.000.000,- tersebut.

Penelitian dilaksanakan pada Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo dan Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, (2) Untuk mengetahui keberadaan modal sosial dalam pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, (3) Untuk mengetahui strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Penentuan daerah penelitian menggunakan *purposive method*. Metode yang dilakukan adalah

metode deskriptif. Uji validitas dilakukan melalui metode Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengelolaan program PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi hampir secara keseluruhan telah sesuai dengan pengelolaan berdasarkan LKMA pada Juknis Deptan. Pada Gapoktan Karya Tani belum secara keseluruhan sesuai dengan pengelolaan berdasarkan LKMA pada Juknis Deptan. (2) Terdapatnya modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan dan norma pada daerah penelitian terbukti pada Gapoktan Mulyo Abadi yang menjunjung tinggi modal sosial dalam pengembalian sehingga pengembalian lancar dan dana berkembang, sedangkan pada Gapoktan Karya Tani modal sosial belum dijunjung tinggi sehingga pengembalian tidak lancar dan dana belum berkembang, (3) Terdapatnya faktor pendorong dan penghambat yang berbeda pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani maka dapat dihasilkan satu strategi pengelolaan dana PUAP yaitu dengan mengoptimalkan faktor pendorong yang terdiri dari: terdapatnya program jangka panjang, mempunyai fasilitas dan pengurus Gapoktan aktif maka dapat meminimalisasi semua faktor penghambat yang terdapat pada setiap Gapoktan.

SUMMARY

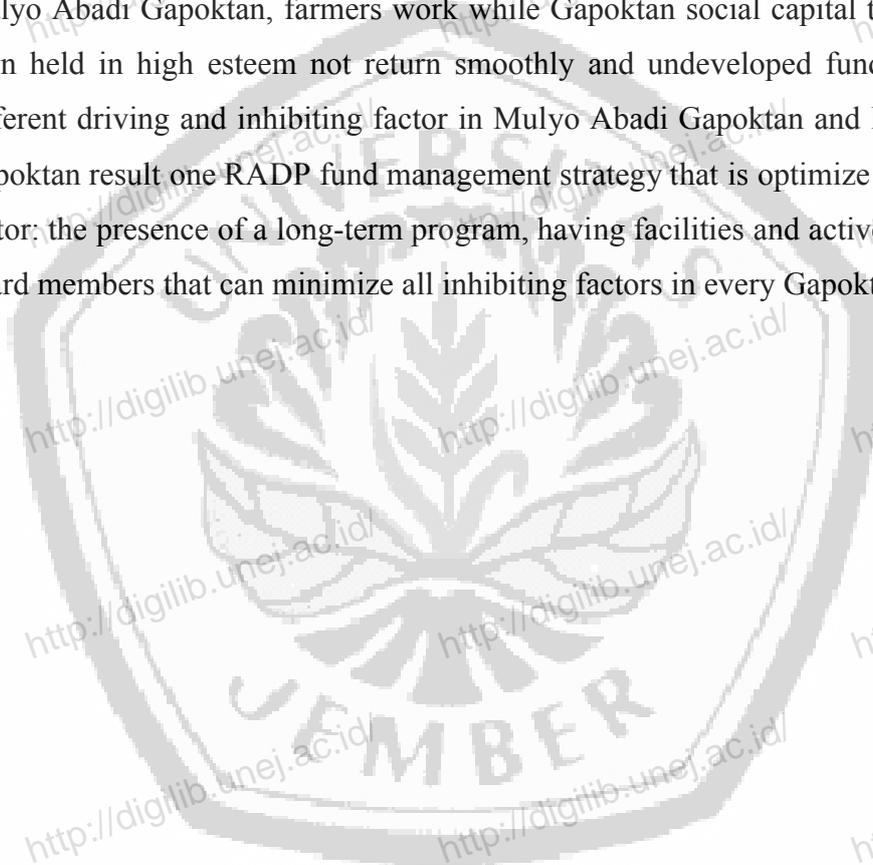
The existence of Social Capital and Development Strategy Against PUAP Fund Management District Umbulsari Jember; Nyla Zukhrufa Hadi, 081510601029; 2013; Program Studi Agribisnis the Social Economic Departement, The Faculty of Agriculture, Jember University.

Rural Agribusiness Development Program (RADP) that launched by Department of Agriculture since 2008, is a strategy of the Ministry of Agriculture in order to answer the difficulties farmers in capital access, which centered in Gapoktan to protect farmers from moneylender's bondage. RADP funds originally awarded to Gapoktan, which further to manage the funds in their own. The funds are then distributed to the farmers in order to facilitate farmers capital. It is about Rp 100.000.000 given to each Gapoktan to be managed and share to the members.

In technical guidance, RADP been recorded by the fund RADP management based on AMI (Agribusiness Microfinance Institutions), because the expected output by the program is a formation of an independent AMI. In fact there is a deviation RADP fund management in some areas. In fact in some areas there is a deviation PUAP fund management is not in accordance with the Technical Guidance MOA with the possibility of the presence of CCN (Corruption, Collusion and Nepotism). That is because the full authority given to Gapoktan to manage RADP fund amounting Rp 100.000.000,-.

The experiment was conducted in Gapoktan Sidorejo Abadi, Sidorejo Village and Gapoktan Karya Tani, Gadingrejo Village. It aims to: (1) To determine the fund management RADP in Sidorejo Village and Gadingrejo Village, Umbulsari Jember District, (2) To determine the existence of social capital in fund management PUAP Sidorejo Village and Village District Gadingrejo Umbulsari Jember, (3) To determine the development strategy of the RADP fund management in Sidorejo Village and Gadingrejo Village, Umbulsari Jember. The determination of the experimental area is using a purposive method. And it is using a descriptive method. The validity test done by triangulation method that checks data from multiple sources in various ways at various times.

As a result, the experiment shows: (1) Management RADP program at Mulyo Abadi Gapoktan almost entirely in accordance with management based on technical guidelines AMI MOA. And it is not yet in accordance with the overall management of the technical guidelines based AMI MOA, (2) The presence of social capital consisting of trust, networks and norms in the area of research proved to Mulyo Abadi Gapoktan. They uphold social capital in payback activities so that the return goes well and capital can be developed. Different with Mulyo Abadi Gapoktan, farmers work while Gapoktan social capital that has not been held in high esteem not return smoothly and undeveloped funds, (3) The different driving and inhibiting factor in Mulyo Abadi Gapoktan and Karya Tani Gapoktan result one RADP fund management strategy that is optimize the driving factor; the presence of a long-term program, having facilities and active Gapoktan board members that can minimize all inhibiting factors in every Gapoktan.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Modal Sosial dan Strategi Pengembangan Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Jani Januar, M.T., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember;
2. Dr. Ir. Evita Soliha Hani, M.P., selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember;
3. Aryo Fajar S., SP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, Ir. Sri Subekti, MSi., selaku Dosen Pembimbing Anggota I, dan Diah Puspaningrum, SP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Ir. Soetrisno, M.P., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Kepala Dinas Pertanian (Pak Hari), Pihak Gapoktan Mulyo Abadi: Kepala Gapoktan (Pak Margo), pegawai Gapoktan (Mbak Lilik), PPL (Bu Dwi), dan pihak Gapoktan Karya Tani; Kepala Gapoktan (Pak Badjuri), Sekretaris Poktan (Pak Yasin), PPL (Pak Murdoso), yang telah memberikan ijin untuk mengambil data dalam penulisan skripsi ini;
6. Orang tuaku tercinta, Ir Kamarul Hadi dan Mariette Louis, atas semua dukungan, nasehat untuk tetap berusaha dan bersabar serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesanku;
7. Adikku Qorrie, Zulvie, Vira, Evan, Louis atas semangat yang terus dikumandangkan kepadaku dengan curahan kasih sayang serta waktu-waktu yang membahagiakan bersama kalian;

8. Semua keluarga dari mama yang di Jakarta dan dari ayah yang di Jember: Mama ati, Bapak Dodi, Mbah serta semua saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas doa, semangat, dukungan, kesabaran dan nasehat yang telah diberikan selalu
9. Bagas seseorang yang istimewa atas kesabarannya menemani ke tempat penelitian dan semua dukungan moril yang telah diberikan ;
10. Viky dan Willy, atas pertolongannya yang selalu sabar mengantar ke tempat penelitian. Sahabat-sahabatku Agung, Aries, Rama, Bojes atas pemberian semangatnya dengan pertanyaan “kapan lulus” dan orang-orang di balik layar Mbak Nurul, Ade Septa, Rohiem, dan Mas Dadang yang ikut andil dalam memberikan perhatian dan dukungan serta teman yang tidak pernah disangka memberikan apresiasi yang luar biasa Erlin dan Dika;
11. Teman-teman Agribisnis angkatan 2008 dan dulur-dulur Panjalu *thanks 4 the great experience with u all*;
12. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2013

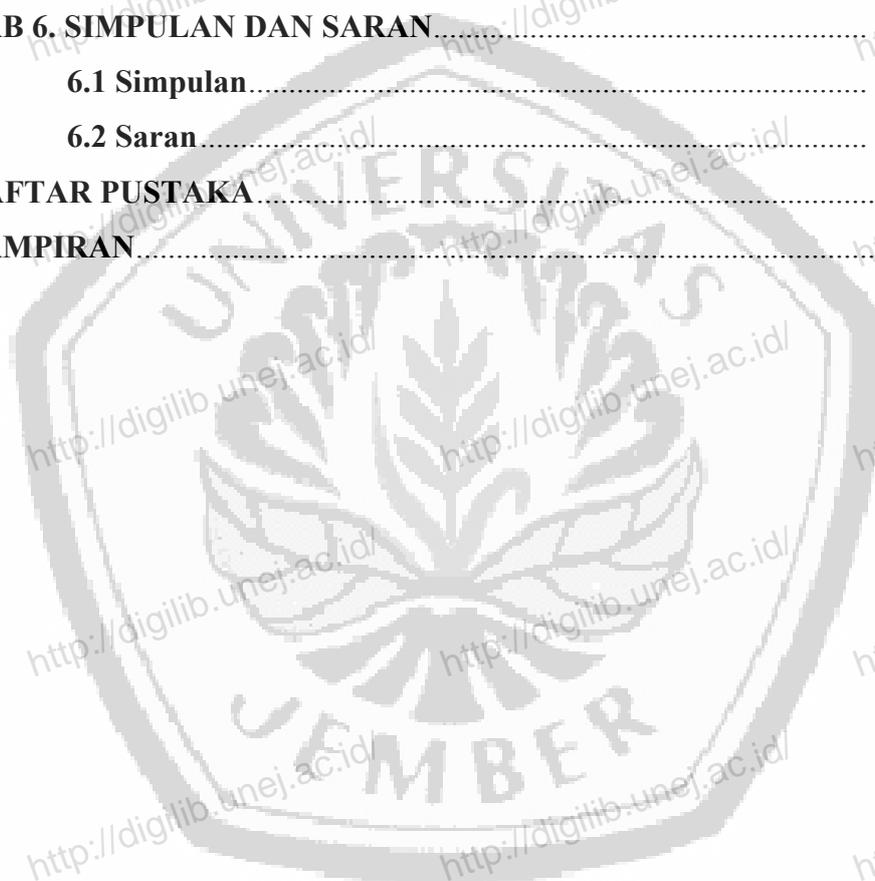
Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| SUMMARY | x |
| PRAKATA | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat | 10 |
| 1.3.1 Tujuan..... | 10 |
| 1.3.2 Manfaat..... | 10 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 2.2 Program PUAP | 17 |
| 2.3 GAPOKTAN | 19 |
| 2.4 Landasan Teori | 21 |
| 2.4.1 Konsep Modal Sosial..... | 21 |
| 2.4.2 Unsur Modal Sosial | 24 |
| 2.4.3 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | 30 |
| 2.4.4 Analisis FFA (<i>Force Field Analysis</i>) | 35 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran | 40 |

| | |
|---|-----|
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Penentuan Daerah Penelitian | 41 |
| 3.2 Metode Penelitian | 41 |
| 3.3 Penentuan Informan | 41 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 42 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 43 |
| 3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 48 |
| BAB 4. GAMBARAN UMUM | 51 |
| 4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian | 51 |
| 4.2 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 51 |
| 4.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ... | 54 |
| 4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 55 |
| 4.5 Karakteristik Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani | 58 |
| 4.5.1 Sejarah Gapoktan Mulyo Abadi | 58 |
| 4.5.2 Sejarah Gapoktan Karya Tani | 59 |
| 4.5.3 Gambaran Umum PUAP | 61 |
| 4.5.4 Petunjuk Teknis PUAP | 63 |
| 4.5.5 Perkembangan Gapoktan Mulyo Abadi | 65 |
| 4.5.6 Perkembangan Gapoktan Karya Tani..... | 66 |
| 4.5.7 Keanggotaan Gapoktan | 67 |
| 4.5.8 Pembinaan Gapoktan Mulyo Abadi | 69 |
| 4.5.9 Pembinaan Gapoktan Karya Tani..... | 71 |
| BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN | 73 |
| 5.1 Pengelolaan Dana PUAP pada Program PUAP Di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo pada Kelembagaan Gapoktan | 78 |
| 5.1.1 Pengelolaan PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi..... | 79 |
| 5.1.2 Pengelolaan PUAP pada Gapoktan Karya Tani | 87 |
| 5.2 Modal Sosial terhadap Pengelolaan Dana PUAP | 95 |
| 5.2.1 Kepercayaan | 97 |
| 5.2.2 Jaringan..... | 107 |

| | |
|---|-----|
| 5.2.3 Norma..... | 118 |
| 5.2.3.1 Macam-macam Norma..... | 120 |
| 5.2.3.2 Peran Norma pada Gapoktan..... | 121 |
| 5.3 Strategi Pengembangan Pengelolaan Dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Kecamatan Umbulsari Jember | 127 |
| 5.3.1 Desa Sidorejo Pada Gapoktan Mulyo Abadi..... | 127 |
| 5.3.2 Desa Gadingrejo Pada Gapoktan Karya Tani..... | 137 |
| BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN | 150 |
| 6.1 Simpulan | 150 |
| 6.2 Saran | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA | 152 |
| LAMPIRAN | 156 |



DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Daftar Gapoktan Penerima PUAP Kabupaten Jember 2008..... | 5 |
| 2. | Perbandingan Antara Teks Naratif dan Matriks, Grafik, Jaringan dan Bagan Dalam Penyajian Data Kualitatif..... | 44 |
| 3. | Keadaan Penduduk Desa Sidorejo berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011..... | 52 |
| 4. | Keadaan Penduduk Desa Gadingrejo berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010..... | 52 |
| 5. | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2011..... | 53 |
| 6. | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2010..... | 53 |
| 7. | Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2011..... | 54 |
| 8. | Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2010..... | 55 |
| 9. | Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2011..... | 56 |
| 10. | Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2010..... | 57 |
| 11. | Perkembangan Jumlah Kelompok Tani dan Anggotanya Sebelum dan Sesudah Adanya Program BLM-PUAP..... | 67 |
| 12. | Manfaat Dana PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi Tahun 2012..... | 82 |
| 13. | Informan Yang Menggunakan Dana PUAP Sesuai RUA (Rencana Usaha Anggota) pada Gapoktan Mulyo Abadi Tahun 2012..... | 83 |
| 14. | Manfaat Dana PUAP Program PUAP pada Gapoktan Karya Tani Tahun 2012..... | 90 |
| 15. | Informan yang Memahami Program PUAP pada Gapoktan Karya Tani Tahun 2012..... | 91 |

| | | |
|----|---|-----|
| 16 | Kepercayaan Pengurus Kepada Anggota dalam Pemberian Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani Tahun 2012..... | 98 |
| 17 | Kepercayaan Anggota Kepada Pengurus dalam Transparansi Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani Tahun 2012..... | 100 |
| 18 | Kepercayaan terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi..... | 102 |
| 19 | Kepercayaan terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Karya Tani..... | 104 |
| 20 | Jaringan Sosial terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi..... | 107 |
| 21 | Jaringan Sosial terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Karya Tani..... | 109 |
| 22 | Pengembalian Pinjaman Oleh Informan pada Gapoktan Mulyo Abadi Tahun 2012..... | 123 |
| 23 | Pengembalian Pinjaman Oleh Informan pada Gapoktan Karya Tani Tahun 2012..... | 124 |
| 24 | Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP Di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... | 128 |
| 25 | Evaluasi Faktor Pendorong Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi Di Desa Sidorejo..... | 132 |
| 27 | Evaluasi Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi Di Desa Sidorejo..... | 133 |
| 28 | Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP Di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... | 138 |
| 29 | Evaluasi Faktor Pendorong Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani Di Desa Gadingrejo..... | 143 |
| 30 | Evaluasi Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani Di Desa Gadingrejo..... | 143 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1. | Kerangka analisis medan kekuatan (FFA)..... | 36 |
| 2. | Skema Kerangka Pemikiran..... | 40 |
| 3. | Struktur Organisasi Gapoktan Mulyo Abadi..... | 59 |
| 4. | Struktur Organisasi Gapoktan Karya Tani..... | 61 |
| 5. | Mekanisme Penyaluran Dana BLM-PUAP..... | 74 |
| 6. | Kaos seragam saat pertemuan Gapoktan..... | 80 |
| 7. | Inventaris di Kantor Gapoktan Mulyo Abadi..... | 85 |
| 8. | Kondisi Kantor Gapoktan Mulyo Abadi..... | 86 |
| 9. | Berita Acara Penyaluran Dana PUAP pada Kelompok Mikro..... | 89 |
| 10. | Berita Acara Penyaluran Dana PUAP pada Poktan..... | 93 |
| 11. | Kondisi Kantor Gapoktan Karya Tani..... | 94 |
| 12. | Alur Jaringan pada Gapoktan Mulyo Abadi..... | 116 |
| 13. | Alur Jaringan pada Gapoktan Karya Tani..... | 117 |
| 14. | Rangkaian Kesatuan Norma..... | 119 |
| 15. | Medan Kekuatan Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo..... | 134 |
| 16. | Skema Strategi Fokus Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo..... | 136 |
| 17. | Medan Kekuatan Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo..... | 144 |
| 18. | Skema Strategi Fokus Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo..... | 147 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1. | Status Informan pada Gapoktan..... | 156 |
| 2. | Foto Transparansi Pengelolaan pada Gapoktan Mulyo Abadi... | 157 |
| 3. | Matriks Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani..... | 158 |
| 4. | Matriks Kepercayaan..... | 160 |
| 5. | Matriks Jaringan..... | 163 |
| 6. | Matriks Norma..... | 164 |
| 7. | Tingkat Urgensi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari..... | 165 |
| 8. | Tingkat Urgensi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari..... | 166 |
| 9. | Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi..... | 167 |
| 10. | Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani..... | 168 |
| 11. | Kuisoner/Panduan Wawancara Gapoktan..... | 169 |
| 12. | Kuisoner <i>Force Field Analysis</i> (FFA)..... | 175 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian mendapatkan prioritas utama karena Indonesia merupakan negara agraris yang berarti sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan sistem perekonomian nasional mengingat sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Pembangunan pertanian khususnya sektor pertanian merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan di bidang ekonomi Indonesia.

Pembangunan pertanian merupakan sektor pertanian yang menempati prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Kedudukan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah cukup nyata, dilihat dari proporsinya terhadap pendapatan nasional. Selain kontribusinya melalui pendapatan domestik (GDP), peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari peran sektor pertanian yang sangat luas. Pembangunan pertanian patut mengedepankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya manusia tani yang makin profesional. Masyarakat tani, terutama masyarakat tani tertinggal sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, perlu terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan pertanian, antara lain, ditentukan oleh kelancaran arus informasi. Kelembagaan penyaluran informasi pertanian melibatkan banyak institusi yaitu kelembagaan penelitian maupun penyuluhan. Kelancaran arus informasi bergantung pada sistem hubungan antara institusi tersebut, mengutamakan komunikasi dua arah. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator dalam menunjang program pemerintah yaitu pembangunan di bidang pertanian, Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan

diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Akan lebih sempurna jika ada peran serta kelompok tani sebagai saluran informasi serta wahana pendidikan non formal bagi petani. Peran Gapoktan yang merupakan pemersatu kelompok-kelompok tani di tingkat pedesaan sangat berperan dalam menciptakan kedinamisan antar kelompok tani sehingga diharapkan peran serta kelompok tani dalam pembangunan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan pertanian sebagai wujud nyata dari peran serta pemerintah dan masyarakat dalam menyalurkan informasi bagi petani, sehingga petani sebagai sasaran sekaligus subyek kegiatan dalam kelompok dapat memperoleh pendidikan, wacana baru, menyerap, dan mengadopsi inovasi untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan keluarganya. Kelompok tani berfungsi sebagai modal terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan, dan ketrampilan serta kegotongroyongan berusaha tani para anggotanya (Suwandari dkk, 2005).

Indonesia merupakan salah satu negara besar dan dengan berbagai persoalannya, beberapa persoalan yang berkaitan dengan hubungan sosial yaitu tentang dimensi modal sosial. Modal sosial hampir diabaikan, jauh berada di luar alam pikir pembangunan. Padahal, di berbagai belahan dunia dewasa ini, kesadaran akan pentingnya faktor tersebut sangat tinggi, dan sedang menjadi keperdulian bersama. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percaya dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial saat ini dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan.

Dalam masyarakat Indonesia, cukup banyak nilai-nilai sosial (modal sosial) seperti budaya gotong royong, kelembagaan bagi hasil, berbagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki semua etnis, yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari budaya ekonomi modern. Modal sosial telah

teruji oleh sejarah sebagai mekanisme penting baik dalam upaya mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkerakyatan peranan modal sosial menjadi sangat penting diperhatikan (Mawardi, 2009).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diluncurkan Departemen Pertanian sejak tahun 2008 melibatkan instansi terkait lingkup pertanian untuk mengawal, mendampingi, memonitoring dan mengevaluasi untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam hal aplikasi dan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. PUAP merupakan strategi Departemen Pertanian yang menjawab kesulitan petani dalam rangka akses permodalan yang dipusatkan di Gapoktan dan melindungi petani dari jeratan rentenir. Memang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa program ini tidak mendidik karena petani itu hanya perlu dipinjami bukan diberi, sehingga pola pikir petani nantinya akan selalu mengharap untuk diberi bantuan. Namun pernyataan ini dapat kita ambil sisi positifnya saja, berbeda dengan program Departemen Pertanian bidang permodalan sebelumnya, yang hanya memberikan fasilitasi pinjaman.

Program PUAP ini memberikan keleluasaan kepada Gapoktan secara mandiri untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati seluruh anggota Gapoktan. Sehingga harapan pemerintah, mereka dapat mengukur kemampuan kelompok mereka sendiri dalam hal menentukan bunga pinjaman, pola pengembalian, sanksi apabila ada tunggakan dan sebagainya. Hal ini tentunya meringankan beban petani karena semua telah disusun berdasarkan kesepakatan dan kemampuan seluruh anggota Gapoktan. Nilai lebih lainnya, bahwa petani dapat meningkat kesejahteraannya baik dari laba yang membesar sebagai dampak pengembangan usaha, maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibagikan setiap tahun. SHU ini merupakan *self-stimulus* petani untuk secara sadar memilih meminjam di LKM Gapoktan daripada rentenir, juga sadar untuk mengangsur atau mengembalikan

pinjaman. Ini yang membedakan dengan program-program sebelumnya dimana bunga menjadi milik Lembaga Perbankan.

Dana PUAP awalnya diberikan kepada Gapoktan, yang selanjutnya Gapoktan diberi keleluasan untuk mengelola dana tersebut. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada petani guna memenuhi permodalan petani. Seratus juta rupiah bagi sebagian kelompok memang besar, tapi bagi sebagian kelompok yang lain seratus juta rupiah tersebut adalah kecil. Dana ini memang hanya stimulus dari pemerintah yang diharapkan bisa membesar seperti bola salju dan bergulir secara berkelanjutan.

Tujuan PUAP adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri, dikatakan PUAP berhasil yaitu dengan tercukupinya sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta memperkuat organisasi tani yang masih lemah. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Program lingkup Departemen Pertanian dan pemerintah kabupaten, mempercepat pencapaian kesejahteraan petani, dan melestarikan sistem pertanian serta lingkungan. Program tersebut didiseminasikan secara partisipatif, tidak bersifat komando atau *top-down*. PUAP bagi pertanian yang berupa komoditas pertanian unggulan, teknologi maju dan kelembagaan pendukung, tidak ditentukan oleh para pejabat Departemen Pertanian, tetapi dipilih oleh petani sendiri. Mereka memilih komoditas dan teknologi sesuai kemauan dan kemampuan mereka sendiri, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi sumberdaya lahan, air, iklim dan aspek sosial, ekonomi, budaya.

Tahun 2008 adalah tahun dimana program PUAP diluncurkan pertama kali, dan salah satu kecamatan yang desanya paling banyak menerima dana PUAP di wilayah Kabupaten Jember di tahun 2008 adalah Kecamatan Umbulsari. Hal ini merujuk pada surat keputusan Bupati Jember no 188.45/73/012/2008. Dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Gapoktan Penerima PUAP Kabupaten Jember 2008

| No | Jumlah Poktan | Nama Gapoktan | Desa | Kecamatan | Ket |
|----|---------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8 | 1. Tirta Melati | 1.Sidomukti | MAYANG | |
| | 3 | 2. Tretan | 2.Tegal Rejo | | |
| | 8 | 3. Mitra Bersama | 3.Sumber Kejayan | | |
| 2 | 5 | 1.Sahabat | 1.Glagahwero | KALISAT | |
| | 5 | 2. Sumber Rejeki | 2.Sumber Jeruk | | |
| 3 | 5 | 1.Suka Maju | 1.Sukokerto | SUKOWONO | |
| | 6 | 2.Sumber Tani | 2.Sukowono | | |
| | 5 | 3.Al Barokah | 3.Sumberwaru | | |
| 4 | 5 | 1.Sumber Langon | 1.Slawu | PATRANG | |
| 5 | 12 | 1.Barokah | 1.Wirolegi | SUMBERSARI | |
| | 4 | 2.Melati Putih | 2.Kebonsari | | |
| | 3 | 3.Rahayu | 3.Sumbersari | | |
| 6 | 10 | 1.Suka Maju | 1.Ajung | AJUNG | |
| 7 | 8 | 1.Harapan Makmur | 1.Panti | PANTI | |
| 8 | 7 | 1.Sumber Agung | 1.Suberagung | SUMBERBARU | |
| | 9 | 2.Rowo Tengah | 2.Rowotengah | | |
| | 4 | 3.Jambe Sari | 3.Jambesari | | |
| 9 | 8 | 1.Ngudi Makmur | 1.Tembokrejo | GUMUKMAS | |
| 10 | 3 | 1.Karya Tani | 1.Gadingrejo | UMBULSARI | |
| | 3 | 2.Tri Jaya Bakti | 2.Gunungsari | | |
| | 15 | 3.Eka Jaya | 3.Paleran | | |
| 6 | | 4.Mulyo Abadi | 4.Sidorejo | | |
| 9 | | 5.Sumber Wangi | 5.Tegalwangi | | |
| 11 | 15 | 1.Dewi Sri | 1.Jombang | JOMBANG | |
| | 3 | 2.Ngudi Makmur | 2.Keting | | |
| | 13 | 3.Makmur Jaya | 3.Wringin Agung | | |
| 12 | 5 | 1.Bumi Putra | 1.Wonosari | PUGER | |
| 13 | 7 | 1.Ketan Mas | 1.Pontang | AMBULU | |
| | 16 | 2.Tirta Mulyo | 2.Sabrang | | |
| 14 | 7 | 1.Suka Maju | 1.Dukuh Dempok | WULUHAN | |
| 15 | 8 | 1.Sumber Makmur | 1.Sumber Lesung | LEDOKOMBO | |
| | 8 | 2.Raung Jaya | 2.Sumber Bulus | | |
| 16 | 8 | 1.Mitra Tani | 1.Harjomulyo | SILO | |
| | 8 | 2.Tani Mulyo | 2.Silo | | |
| | 7 | 3.Usaha Jaya | 3.Sidomulyo | | |
| 17 | 10 | 1.Harapan Jaya | 1.Karangbayat | SUMBERBARU | Penetapan Tambahan |
| 18 | 5 | 1.Mandiri | 1.Suco Pangepok | JELBUK | Penetapan Tambahan |
| 19 | 5 | 1. Gunung Mulia | 1.Gunung Malang | SUMBERJAMBE | Penetapan Tambahan |
| 20 | 4 | 1.Subur | 1.Darsono | ARJASA | Penetapan Tambahan |

Sumber: Lampiran I Keputusan Bupati Jember (2008).

Lokasi PUAP ditentukan secara interaktif antara Pemkab Jember (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bappekab, Asda II Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian), BPTP, dan masyarakat. Pada beberapa daerah, pemberian dana PUAP keseluruhan petani dan mekanisme penyalurannya yang sarat akan KKN maka tak jarang di beberapa daerah di Indonesia hal tersebut menjadi permasalahan dan kegagalan program PUAP. Lintas Sula (2009) mengabarkan beberapa daerah tersebut adalah pada Tahun 2009 di Kepulauan Sula senilai Rp. 2 Milyar terindikasi sarat dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (KKN) sehingga keberlangsungan program tersebut gagal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembinaan dari Dinas Pertanian setempat terhadap para kelompok, bahkan program yang mestinya berkesinambungan terpakai habis dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Pasalnya, pemberian bantuan itu hanya diberikan kepada Kelompok Tani pada desa-desa yang memiliki beking di Pemda Kepulauan Sula, juga program itu disinyalir digunakan untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih kandidat tertentu pada Pemilu di Kepulauan Sula yang dihelat pada Juli 2010 lalu. Akibatnya para penerima bantuan PUAP kebanyakan tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan usaha pertanian atau peternakan, melainkan digunakan untuk kepentingan konsumtif.

Masih pada Lintas Sula, contoh lain seperti yang terjadi di Desa Tolong Kecamatan Ledo, Dana BLM-PUAP itu ternyata diselewengkan oleh Ketua Kelompok, Kepala Desa Tolong dan Mantan Camat Ledo. Demikian masalah penyelewengan dana alias indikasi korupsi ini disampaikan dua anggota kelompok tani asal desa Tolong, Petrus Efruan dan Banus Degasou sebagaimana pernah dilansir sebuah media lokal di Maluku Utara beberapa waktu lalu. Bahwa sejak penyerahan dana bantuan senilai seratus juta rupiah oleh Bupati Kepsul di Bobong pada Desember 2009 lalu dalam bentuk cek bank, maka Ketua Kelompok Tani Liang Sia Desa Tolong, Albert Masiru, Kades Tolong, Bilsaris Dorsaya, Mantan Camat Ledo, Latuconsina melakukan rekayasa untuk mencairkan dana tersebut. Mereka merekayasa data dengan memfoto lahan warga yang sebenarnya bukan lahan kelompok tani, untuk dimasukkan ke dinas pertanian sebagai

persyaratan pencairan dana tahap pertama sebesar lima puluh juta rupiah. Petrus menjelaskan, berdasarkan laporan ketua Kelompok dan Kepala Desa saat melakukan pertemuan dengan kelompok tani, dari dana lima puluh juta rupaiah yang telah dicairkan telah dibagi-bagi sebagai fee kepada beberapa orang diantaranya ; lima juta rupiah untuk Kadis Pertanian Kepsul, Idham Umasangaji, dua juta rupiah untuk Staf Dinas Pertanian, Edi Habibu, satu juta untuk penyuluh pendamping, Nurhaeda dan tiga juta untuk mantan camat Lede yaitu Pak Latuconsina (Anonim, 2009).

Berita pada Lintas Sula (2009), adanya Investigasi wartawan K-PK di Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan juga memperoleh data hampir serupa, beberapa anggota kelompok tidak menerima bantuan tersebut, bahkan dalam Gapoktan Fiking Lipu dengan Ketuanya, Hi. Jainudin Kene yang memiliki dua kelompok, hanya satu kelompok yang berjalan. Pada tahun 2008 bantuan PUAP senilai 2 Milyar yang sama juga diberikan pada 20 Gapoktan SK Menteri Pertanian Nomor : 227/Kpts/KU/3/2008, namun sesuai kondisi yang ada dilapangan program PUAP tahun 2008 tersebut terindikasi gagal total. Bahkan dua Gapoktan di Desa Tanjung Una dan Mananga Kecamatan Taliabu Utara diduga tidak menerima bantuan tersebut karena diindikasikan dana tersebut dicairkan secara sepihak oleh salah seorang oknum adik pejabat di Sula berinisial MM alias Maya. Dan masih banyak contoh pada daerah-daerah lain. Kepulauan Sula merupakan salah satu pulau di Maluku Utara.

Kasus-kasus di atas adalah penyimpangan dan kegagalan di beberapa daerah penerima dana PUAP, apabila kita melihat orientasi pada modal sosial maka hal tersebut dapat dilihat dari seseorang yang tidak dapat memegang kepercayaan pada saat menerima dana PUAP dengan menyelewengkan dana tersebut, para pelaku yang tidak mengetahui aturan atau norma pada penerimaan dana tersebut sehingga dana tersebut diselewengkan dan jaringan yang buruk sehingga dana tersebut tidak sampai pada sasaran. Melihat kondisi demikian pada beberapa daerah maka peneliti tertarik untuk melihat dan mengetahui pengelolaan dana PUAP di Desa Siderejo dan Desa Gadingrejo. Peneliti memilih dua desa

yang keduanya menerima dana PUAP dilihat dalam keberhasilan pengelolaan dana PUAP dan kesesuaian pengelolaan mengacu pada Juknis Deptan.

Program PUAP yang dikelola secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi sumber permodalan bagi petani sehingga akan terbentuk LKMA, maka berdasarkan Juknis Deptan terdapat pengelolaan dana PUAP berdasarkan LKMA. Hal tersebut menjadi dasar pengelolaan pada setiap daerah penerima PUAP, tak terkecuali pada daerah penelitian yaitu Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo. Berdasarkan kasus penyimpangan pada pelaksanaan PUAP dengan melihat indikator pengelolaan berdasarkan LKMA yang merujuk pada Juknis Deptan maka menjadi dasar peneliti untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan berdasarkan Juknis Deptan, serta keberadaan modal sosial pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo dengan melihat saat ini modal sosial dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan. Adanya institusi formal dan informal yang menjamin *trust* agar berfungsi secara operasional. Pada kelembagaan informal dalam hal ini yaitu hubungan antar anggota yang telah terbina sejak lama yakni *interpersonal elations*, yakni hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang telah terbina sejak lama dan terbukti handal karena teruji oleh pengalaman-pengalaman. Pada sisi kelembagaan formal dalam hal ini adalah Gapoktan, *trust* bisa tumbuh bila fungsi-fungsi organisasi ikut menyumbang energi bagi tumbuh dan berkembangnya atmosfer moralitas *trust* dalam masyarakat.

Gapoktan Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang cukup potensial di dalam pengembangan pengelolaan dana PUAP, dana PUAP yang diberikan bergulir seperti *snowball* semakin lama dana tersebut berkembang, hal ini dapat dilihat dari kegiatan transaksi simpan pinjam terjadi setiap hari pada Gapoktan yang terdapat di Desa Sidorejo yaitu Gapoktan Mulyo Abadi. Pada Gapoktan Mulyo Abadi terdapat kesekretariatan Gapoktan untuk berlangsungnya kegiatan simpan pinjam serta terlihat lengkapnya sarana dan prasarana yang terdapat dikesekretariatan tersebut.

Melihat keseluruhan dana yang terkumpul sesuai dengan catatan administrasi yang terdapat di Gapoktan Mulyo Abadi dana yang awalnya sebesar Rp 100.000.000 kini berkembang menjadi sekitar seratus lima puluhan juta rupiah.

Berbeda halnya pada Gapoktan di Desa Gadingrejo yaitu Gapoktan Karya Tani, pada Gapoktan Karya Tani dana PUAP belum berkembang dapat dilihat ketidakadanya kesekretariatan Gapoktan sehingga kegiatan transaksi simpan pinjam yang dilakukan setiap hari tidak dapat terlaksana. Pada keadaan tersebut peneliti melihat sistem pengelolaan pada kedua Gapoktan dengan mengacu pada Pedoman PUAP dan Juknis Pelaksanaan PUAP yang diterbitkan oleh Deptan. Peneliti melihat kesesuaian pengelolaan secara prosedural sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Deptan dengan perkembangan yang telah dicapai oleh tiap Gapoktan.

Dalam mencapai suatu perkembangan yang diharapkan, maka perlu mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang terdapat pada Gapoktan dalam hal pengelolaan, dengan mengetahui faktor pendorong dan penghambat maka diharapkan dapat menemukan strategi pengembangan yang tepat sesuai dengan keadaan Gapoktan. Adanya dua desa yang berbeda dalam pengelolaan dana PUAP maka diharapkan dalam penelitian ini dapat menghasilkan strategi pengembangan yang baik.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana keberadaan modal sosial dalam pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui keberadaan modal sosial dalam pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi para petani tentang manfaat adanya Gapoktan dan kelompok tani.
2. Diharapkan mampu memberikan informasi bagi instansi pemerintah desa tentang aspek-aspek modal sosial yang mendukung adanya Program PUAP.
3. Diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi pihak pemerintah (Departemen Pertanian dan Balai Pengkajian dan teknologi Pertanian) tentang program yang telah dilaksanakan di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kasmadi (2005), mengenai Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Kemandirian Petani Ternak. (Kasus pada Kelompok Tani Ternak Desa Bungai Jaya dan Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah). Menurut penelitian ini manfaat program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi petani penerima program sangat besar terutama dalam meningkatkan usaha beternak, dari yang tidak memiliki ternak kemudian menjadi mampu untuk memiliki ternak, sehingga menimbulkan motivasi petani untuk mengembangkan ternak BLM tersebut. Hal tersebut telah dibuktikan oleh petani itu sendiri dengan keberhasilan mereka dalam program ini. Ternak yang mereka kelola telah berkembang dan rata-rata telah menyetor untuk digulirkan kepada petani yang belum memperoleh bantuan BLM tersebut. Ini tentunya sudah sesuai dengan tujuan dari program BLM yang ingin memberdayakan masyarakat petani sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan bantuan yang difasilitasi oleh pemerintah dan dikelola oleh kelompok sendiri. Perguliran dana BLM telah mencapai 70 persen, dimana perguliran dana tersebut pengaturannya diatur oleh kelompok sendiri dibawah bimbingan pemerintah dan petugas pendamping. Keberhasilan program BLM tersebut tidak terlepas dari kesadaran petani dalam mengembangkan ternak tersebut yang juga dibantu oleh pemerintah setempat seperti Dinas Peternakan, petugas pendamping dan aparat pemerintah desa.

Filtra (2007), meneliti mengenai Evaluasi Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Sapi Potong di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Analisis ini dilakukan berdasarkan buku pedoman BPLM yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Peternakan, dimana evaluasi program BPLM dinilai dari tiga aspek, yaitu aspek teknis, aspek usaha dan aspek kelembagaan. Penelitian dilakukan menggunakan metode regresi logistik multinomial. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan program BPLM di Kabupaten Agam dinilai berhasil sehingga sangat layak untuk dilanjutkan. Keberhasilan

tertinggi ada pada aspek teknis peternakan. Berikutnya aspek kelembagaan dan aspek ekonomi usaha peternakan dengan nilai cukup berhasil. Pada aspek ekonomi usaha, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumberdaya dalam pelaksanaan Rencana Usaha Kelompok (RUK) serta masih rendahnya tingkat pengembalian kredit. Pada aspek kelembagaan, peternak masih sulit diberdayakan dengan minimnya perkembangan jumlah anggota kelompok, masih rendahnya tingkat partisipasi dan penyaluran aspirasi anggota serta lemahnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pedagang pakan konsentrat dan pedagang sapi. Hasil lainnya yaitu jumlah tanggungan keluarga, penguasaan lahan, dan jumlah ternak setelah kredit memberikan pengaruh yang nyata terhadap keberhasilan pengembalian kredit di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sume (2008), menganalisis Efektivitas Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) (Studi kasus DPM-LUEP Kabupaten Bogor). Menurut penelitian ini, karakteristik kelompok penerima DPM-LUEP di Kabupaten Bogor secara umum masih merupakan kelompok usaha kecil menengah yang tergambar dari kelembagaan kelompok yang telah berbadan hukum dengan tenaga kerja 5-19 orang, akses permodalan masih sangat lemah, administrasi dan manajerial kelompok yang lemah, serta sistem pemasaran yang masih terbatas wilayah pemasarannya, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan ekonomi kelompok. Berdasarkan hasil analisis menggunakan FGD masih ditemui permasalahan yang dominan pada persyaratan penetapan, proses penetapan dan proses penyaluran DPM pada kelompok. Upaya mengatasi permasalahan guna meningkatkan efektivitas pendapatan dan penyaluran DPM-LUEP adalah: penguatan kelembagaan dan manajerial kelompok, meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan dan jumlah petugas serta dukungan sarana prasarana, memperpendek jalur birokrasi dalam proses penetapan dan penyaluran DPM-LUEP melalui usulan penyempurnaan mekanisme ke penanggung jawab kegiatan DPM-LUEP di tingkat pusat. Dari hasil CPM, menunjukkan bahwa keberhasilan terselesaikannya suatu pekerjaan proyek pada waktunya, sehingga sumber-sumber tidak terbuang dengan percuma.

Hasil dari penelitian Sudaryanto, dkk (2009) bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana BLM PUAP oleh LKM/UKM relatif lebih baik dibanding yang dikelola oleh Gapoktan langsung. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk merevisi Panduan Umum PUAP, yang menyatakan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai syarat pencairan dana BLM PUAP. Sehingga dana BLM tersebut dapat langsung dikelola oleh LKMA. Persyaratan ini dikeluarkan oleh Tim Pembina Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksana (Juklak) yang diberlakukan pada semua kabupaten.

Penelitian Sudaryanto, dkk (2009) menjelaskan sebagian kecil saja anggota yang memanfaatkan inovasi teknologi, umumnya usahatani yang dilakukan hanya memperbaiki teknologi yang telah ada, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Sehingga kinerja usahatani belum meningkat dan berkembang secara signifikan, yang mengakibatkan peningkatan produksi dan pendapatan usahatani menjadi dan pendapatan usahatani yang menjadi tujuan dan sasaran program PUAP belum tercapai secara optimal. Pemanfaatan dana BLM PUAP digunakan untuk memperluas/mengembangkan usahatani yang lama atau berdiversifikasi usahatani dengan mengembangkan komoditi baru. Dari semua varian pemanfaatan dana BLM PUAP, jenis usaha pengolahan hasil dan perdagangan yang perguliran dan pengambilan dananya paling cepat dibanding usahatani dan ternak.

Pada penelitian Pandwinata (2009), terdapat unsur modal sosial yang menonjol pada masyarakat petani dalam menunjang program pembangunan pertanian yaitu terdiri dari unsur *trust*/kepercayaan, nilai dan norma sosial masyarakat, dan *resporcity*/resprosititas. Hal tersebut dicerminkan dalam 3 kegiatan yaitu usahatani, perawatan sarana dan prasarana, dan bidang pendidikan. Pada *trust* contohnya kepercayaan dalam peminjaman saprodi, kepercayaan pada pemimpin, kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga pendidikan formal. Pada nilai dan norma contohnya kejujuran dalam peminjaman saprodi, kejujuran pemimpin jajaran, dan kejujuran para pengelola pendidikan lembaga pendidikan formal. Serta pada *reciprocity* contohnya sifat gotong royong dalam berbagai

kegiatan, kerjasama dengan pemimpin dan pengelola lembaga pendidikan. Peran modal sosial masyarakat petani Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dalam menunjang kegiatan pembangunan yaitu modal sosial yang dimiliki dapat menumbuhkan swadaya masyarakat dan sangat menentukan tercapainya tujuan dari program pembangunan yang dijalankan.

Peran modal sosial pada penelitian Ariana, dkk (2006) mengenai kemandirian sentra produksi yang berlokasi di daerah pedesaan dikatakan cukup kuat berperan dalam mengembangkan perusahaan pada tingkat internal. Peran ini terealisasi utamanya dalam menurunkan biaya pengelolaan tenaga kerja atau mengikat orang untuk bekerja di perusahaan tanpa prosedur formal yang panjang, dan penyebaran informasi melalui kedekatan keluarga/kerabat lebih mudah dilakukan dan lebih dipercaya, serta kerja sama akan lebih mudah terealisasi hal tersebut akan mewujudkan kemandirian namun pada tingkat internal saja.

Tentang modal sosial dalam komunitas petani di wilayah perkebunan dapat dilihat dari hasil penelitian Sumarti, dkk (2000) yang menyatakan bahwa beberapa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki jaringan. Artinya selama komunitas masih memiliki jaringan (salah satu unsur modal sosial), kemiskinan yang menghimpit masih bisa diatasi.

Penelitian Kusnadi (2000) tentang jaringan sosial masyarakat nelayan di Kecamatan Besuki. Pada penelitian ini Kusnadi melihat strategi dan fungsi jaringan sosial masyarakat nelayan yang berupa jaringan sosial Horizontal dan Vertikal secara luas. Didalam jaringan sosial horizontal anggota-anggotanya memiliki status sosial ekonomi yang sepadan. Jaringan sosial yang bersifat horizontal terdiri atas: jaringan kekerabatan dan campuran kekerabatan dan tetangga. Jaringan sosial yang bersifat vertikal terdiri atas: jaringan kerabat, jaringan tetangga, jaringan campuran tetangga dan teman.

Penelitian Paramitasari (2007), tentang pasukan kuning, Jaringan kekerabatan petugas pasukan kuning yang meliputi:

1. Jaringan kekerabatan dalam meminjam uang, Jaringan kekerabatan mertua, Jaringan kekerabatan dalam mengasuh anak. Berbagai bentuk jaringan kekerabatan yang dilakukan oleh petugas pasukan kuning di alun-alun jember

diatas, dilakukan dalam konteks membantu menutupi masalah kesulitan kehidupan sehari-hari. Meringankan beban kehidupan dapat dilakukan dengan mendapat bantuan dari mertua, sanak saudara dekat maupun jauh.

2. Jaringan dengan lingkungan sosialnya atau tetangga yang meliputi hubungan petugas pasukan kuning dengan hubungan sosial yang menjurus pada bantuan dana serta tenaga.
3. Jaringan kepentingan dalam hubungan kerja meliputi: Membuat kelompok arisan dan kas bersama antar petugas pasukan kuning. Memberi sumbangan kepada petugas pasukan kuning yang terkena musibah

Jaringan pertemanan, dalam jaringan ini dilakukan oleh petugas pasukan kuning pada saat selesai atau sebelum melakukan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan bisa bertambah dalam kategori pendapatan tinggi yaitu dalam 1 bulan memperoleh pendapatan antara Rp 500.000–Rp 1.000.000 meskipun demikian pemenuhan kebutuhan hidup mereka masih minim.

Penelitian Marfu'ah (2008), pada masyarakat nelayan Puger terbentuknya rasa saling percaya adalah hasil interaksi yang melibatkan paling tidak antar dua anggota masyarakat dalam suatu kelompok. Kelompok atau organisasi antar desa dan berkembangnya sistem jaringan sosial yang semuanya atas dasar kepentingan yang sama. Kepercayaan nelayan dengan sesama nelayan jika dilihat dari beberapa hal diatas memang dilandaskan adanya kepentingan yakni tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga meningkatkan penghasilan mereka. Tujuan tersebut mendorong adanya rasa saling bekerjasama agar masing-masing tujuan bisa tercapai. Dengan demikian mereka membentuk suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan tentunya dengan rasa percaya terhadap masing-masing pihak. Kepercayaan dapat membentuk adanya kerjasama dalam masyarakat. Masyarakat nelayan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah meskipun kepercayaan tersebut telah mulai berkurang dan juga kepada tokoh masyarakat seperti kyai dan juga dengan teman kerja. Adanya kepercayaan terutama pada pemerintah seharusnya dapat mendorong partisipasi masyarakat nelayan dalam pembangunan. Kepercayaan nelayan terhadap pemerintah hanya

sekedar menerima kepemimpinan pemerintah sekarang tetapi mereka tidak ada kepedulian dalam artian mendukung pemerintah yang ada.

Penelitian Zujajat (2007), tentang pola hubungan kerjasama antar buruh wanita di gudang tembakau disebutkan, bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para mbok yaitu saling memberi informasi dan saling member makan antar tahap produksi. Mbok akan memberitahukan kepada mbok yang lain yang berada pada tahapan sebelumnya untuk segera mengirim tembakau (memberi makan). Misal pada tahap fermentasi untuk segera dilakukan fermentasi dan tembakau kurang beberapa tumpuk lagi, maka mbok akan berkoordinasi dengan mbok yang ada di tahap sortasi untuk segera mengirim daun tembakau yang sudah selesai di sortasi. Begitu juga dengan tahapan yang lain, para mbok selalu bekerja sama saling memberi makan antar tahap pada proses produksi tersebut menanggapi hal itu, mbok-mbok yang ada ditahapan tersebut saling bekerjasama untuk memotivasi para tukang pilih agar bekerja lebih cepat. Pola hubungan kerjasama antar tukang pilih dalam proses pemilihan dan mereka membina sikap saling tolong menolong, mereka tidak menginginkan adanya teman yang kesulitan, mereka merasa bahwa kesulitan teman adalah kesulitan yang harus dipikul bersama. Aturan ini tidak tertulis, namun tetap dilakukan oleh para buruh wanita yang ada di gudang tembakau PTPN X Ajung.

Mengenai strategi pengembangan terdapat pada penelitian Rizki (2012), mengenai strategi pengembangan usaha ternak kambing peranakan etawa (PE) melalui Prima Tani di Desa Temulung bahwa berdasarkan terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang telah dipilih, strategi pengembangan usaha ternak kambing peranakan etawa (PE) di Desa Telemung adalah menyinergikan kinerja dari peternak, kelompok ternak, pemerintah desa, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan lembaga keuangan yang bertindak sebagai sasaran pengguna program, pengelola program, fasilitator dan pengontrol sehingga dapat membantu perwujudan usaha ternak yang berkembang.

2.2 Program PUAP

Kemiskinan merupakan cermin entitas sosial dan ekonomi mayoritas penduduk di pedesaan, yang terkait erat dengan ketimpangan, yang sebagian besar terjadi akibat bekerjanya sistem kapitalisme yang mengkooptasi pedesaan Indonesia sejak masa kolonialisme (Elizabeth, 2007). Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu: (1) sarana dan prasarana; (2) SDA dan teknologi; (3) SDM; serta (4) kelembagaan dan organisasi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, rawan kemiskinan, ataupun yang dikarenakan geografi (kemiskinan di perkotaan dan pedesaan).

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mewujudkan kesejahteraan petani dan pedesaan adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai implementasi dari program PNPM mandiri, beserta program lainnya. Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal Gapoktan, yang selanjutnya akan diberikan kepada petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumahtangga tani sebagai bantuan modal dalam kegiatan usaha pertanian (Suradisastra, 2010).

Adapun tujuan PUAP bertujuan untuk: a) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah; b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis dan d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Deptan, 2009).

Sasaran yang hendak dicapai adalah: a) Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/ tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa; b) Berkembangnya 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; c) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan dan d) Berkembangnya

usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman (Deptan, 2009).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dipedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri (Deptan, 2009).

Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan melalui PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggota. Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan maksimal sebesar Rp 100.000.000. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan untuk menunjang kegiatan usahatani. Dengan demikian, Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain: memiliki sumber daya manusia, dimiliki dan dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh bupati atau walikota. Program PUAP yang dilaksanakan oleh Kementrian Pertanian sejak dari tahun 2008, pelaksanaannya melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut: (1) Memberikan bantuan stimulus modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha ekonomi produktif dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK dan RUB dan menggunakan dana PUAP sesuai dengan usulan (*tahun ke-I*); (2) Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana stimulasi modal usaha kepada Gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh Gapoktan melalui kaidah-kaidah usaha simpan-pinjam (*tahun ke-II*); (3) Dana stimulasi modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan-pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan diharapkan dapat ditumbuhkan

menjadi LKM-A, dan pada akhirnya difasilitasi menjadi jejaring pembiayaan (*Linkages*) dari perbankan/lembaga keuangan. (Kementan, 2010).

Menurut Deptan (2010), pada Pedoman PUAP, adapun komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP yaitu:

1. Keberadaan Gapoktan
2. Keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani sebagai pendamping.
3. Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dll
4. Penyaluran dana BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

2.3. GAPOKTAN

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu wilayah administrasi desa atau yang berada dalam suatu wilayah aliran irigasi petak tersier (Kementan, 2010).

Syahyuti (2007), mendefinisikan Gapoktan sebagai gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggota dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting dalam pertanian.

Keterlibatan Gapoktan secara aktif sebagai bagian dari gerakan koperasi pada sektor pertanian menjadi penting dalam peningkatan produksi serta kesejahteraan hidup petani (Biro Perencanaan Departemen Pertanian, 2009) di mana:

- 1) Melalui Gapoktan petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka, baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (*bargaining power*) ini bahkan dapat berkembang menjadi kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani.
- 2) Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, Gapoktan dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain Gapoktan dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar.
- 3) Dengan bergabung dalam wadah Gapoktan, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional.
- 4) Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah Gapoktan, para petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi.
- 5) Dalam wadah organisasi Gapoktan, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya.
- 6) Hadirnya Gapoktan di perdesaan dengan berbagai unit usaha yang dijalankan sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi para petani anggota maupun masyarakat di sekitarnya. Beberapa alasan yang disebutkan di atas mengisyaratkan bahwa peran Gapoktan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani anggotanya, namun pada gilirannya juga akan menyebabkan berkembangnya sistem agribisnis untuk satu bahkan beberapa komoditas. Pada prinsipnya, apabila Gapoktan sudah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan telah mampu mengelola usahatani secara komersial, serta memerlukan bentuk badan hukum untuk mengembangkan

usahanya; maka dapat ditingkatkan menjadi bentuk organisasi yang formal dan berbadan hukum, sesuai dengan kesepakatan para petani anggotanya. Disini terlihat, bahwa pengembangan Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani yang sudah berjalan baik, misalnya kelompok-kelompok tani.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Konsep Modal Sosial

Menurut Putnam (2000), modal sosial berbicara mengenai ciri-ciri kehidupan sosial-jaringan, norma, serta rasa percaya (*trust*) yang bisa membuat semua warga masyarakat bertindak lebih efektif guna mencapai tujuan tertentu. Modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai intuisi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social network* ("*networks of civic engagement*"), yaitu ikatan /jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).

Teori modal sosial, pada intinya merupakan teori yang paling tegas. Tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata soal hubungan. Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, atau yang dapat mereka capai tapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal. (Field, 2010).

Menurut Hasbullah (2006), modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinventasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Menurut Bourdieu (dalam Field, 2010), mendefinisikan modal sosial adalah jumlah sumberdaya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Istilah modal sosial adalah satu-satunya cara untuk menjabarkan prinsip-prinsip aset sosial yang menjadi kentara manakala individu yang berlainan memperoleh hasil yang sangat tidak setara dari modal yang kurang ekuivalen (ekonomi atau budaya) menurut sejauh mana mereka mampu memobilisasi sekuat tenaga modal dari suatu kelompok.

Menurut Cox (dalam Hasbullah, 2006), mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Jenny dan Onix (dalam Hasbullah, 2006) memberi tambahan bobot terhadap dimensi modal sosial adalah kemampuannya sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya. Tanpa basis sosial yang kuat seperti yang terkandung dalam modal sosial, sebetulnya kehidupan itu sendiri bukanlah kehidupan yang berdimensi kemanusiaan.

Menurut Coleman (dalam Field, 2010), mendefinisikan modal sosial sebagai “sesuatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut”. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serat organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial.

Modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerja sama di antara mereka sehingga akan timbul kemampuan sehingga terwujud kepercayaan dalam sebuah komunitas. Bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 1995). Fukuyama menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan didalamnya di ikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong kerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan merasakan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat.

Ada dua pengertian modal sosial menurut Ancok (dalam Ariana, 2006), kelompok pertama diwakili oleh Brehm dan Rahn, yang menyatakan bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Kelompok kedua diwakili oleh Cohen dan Prusak, yang menyatakan bahwa modal sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai serta perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan kerjasama.

Menurut Adler dan Kwon (dalam Aribowo, 2007), mengidentifikasi bahwa pemikiran inti yang dapat membimbing penelitian serta pengertian tentang modal sosial adalah kemauan baik yang dimiliki seseorang tentang diri kita yang

merupakan sumber pemahaman yang sangat bermanfaat dalam memahami kapital sosial, oleh karena kapital sosial seringkali pula didefinisikan sebagai kemauan baik orang lain kepada seseorang atau kepada suatu kelompok. Sumber kemauan baik ini berada pada tataran struktur serta kandungan yang muncul dari relasi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Secara sederhana, Adler memahami kapital sosial terutama mengenai bagaimana seseorang berinteraksi satu sama lain dengan nuansa kerjasama yang erat satu sama lainnya. Pengaruh dari interaksi sosial seperti itu terutama berkisar pada aliran arus informasi, pemberian pengaruh, serta kesetiakawanan yang mengarah pada para pelaku interaksi yang bersangkutan.

Banyak tokoh-tokoh dunia yang telah mendefinisikan modal sosial berdasarkan keadaan dan waktu saat itu serta menurut pada bidangnya masing-masing. Peneliti menggunakan teori yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu teori Robert Putnam seorang ilmuwan politik dan profesor kebijakan publik di Harvard University John F. Kennedy School of Government yang mengemukakan bahwa modal sosial berbicara mengenai ciri-ciri kehidupan sosial yaitu jaringan, norma, serta rasa percaya (*trust*) yang bisa membuat semua warga masyarakat bertindak lebih efektif guna mencapai tujuan tertentu.

2.4.2 Unsur Pokok Modal Sosial

Masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep modal sosial memiliki perbedaan dalam memberikan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Menurut Putnam (1993), modal sosial mirip bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti ia juga bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Namun demikian modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self-reinforcing*). Putnam mencantumkan tiga unsur dalam pembentukan modal sosial yaitu jaringan, norma, serta kepercayaan sosial (*trust*).

1. Kepercayaan (*Trust*)

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa tidak bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1993).

Menurut Putnam (1995), mengaitkan *trust* pada perilaku atau tidaknya norma *resiporcity* dalam masyarakat. Pada tingkatan institusi sosial, *trust* akan bersumber dari karakteristik sistem tersebut yang memberi nilai tinggi pada tanggung jawab sosial setiap anggota kelompok. Dalam karyanya *Bowling Alone*, *trust* adalah bagian penting dari *modal masyarakat untuk berdemokrasi* secara sehat. Manakala kehidupan demokrasi kemasyarakatan Indonesia berkembang dalam suasana salingkecurigaan, saling tak percaya dan “mau menang sendiri”, maka disana segera ditengarai situasi ketidakcukupan modal sosial tersebut. Dalam konteks ini, Putnam mengatakan lebih lanjut bahwa:

“...community blessed with a **substantial stock of social capital**.**networks of civic engagement** foster sturdy **norms of generalized reciprocity** and encourage the emergence of **social trust**. Such networks facilitate coordination and communication, amplify reputations, and thus allow dilemmas of collective action to be resolved. When economic and political negotiation is embedded in dense networks of social interaction, incentives for **opportunism are reduced**. At the same time, networks of civic engagement embody past success at collaboration, which can serve as a **cultural template for future collaboration**. Finally, dense networks of interaction probably broaden the participants' sense of self, developing the "I" into the "we," or (in the language of rational-choice theorists) enhancing the participants' "taste" for collective benefits” (Putnam, 1995: Vol. 6/1).

Dapat diartikan: "... Masyarakat diberkati dengan saham besar modal sosial. Jaringan, norma, dan keterlibatan masyarakat umum yang kokoh sehingga terjadi timbal balik dan dapat mendorong munculnya kepercayaan sosial seperti jaringan yang memfasilitasi koordinasi dan komunikasi, memperkuat reputasi, dan dengan demikian memungkinkan dilema aksi kolektif untuk dapat diselesaikan.

Ketika ekonomi dan politik tertanam negosiasi dalam jaringan sehingga padat akan interaksi sosial, insentif untuk peluang dikurangi. Pada saat yang sama, jaringan dari keterlibatan masyarakat mewujudkan kesuksesan masa lalu pada kolaborasi, yang dapat berfungsi sebagai tempat budaya untuk berkolaborasi di masa depan. Akhirnya, jaringan padat interaksi memungkinkan memperluas arti keikutsertaan dan perkembangan "saya" ke dalam "kita", atau (dalam bahasa rasional-pilihan teori) meningkatkan "rasa" peserta untuk manfaat kolektif" (Putnam, 1995: Vol. 6/1).

Menurut Robert (dalam Mawardi, 2007), rasa percaya diri (*Trust*) (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan dari dan kelompoknya.

Dalam pandangan Fukuyama (dalam Hasbullah, 2006), *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Berbagai tindakan kolektif yang di dasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas tenggelam dan partisipasi masyarakat untuk membangun bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang. Lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah. Jika rasa saling mempercayai telah luntur maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku.

Kepercayaan dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang terpenting. Menurut Pranadji (dalam Marfuah, 2008), terbentuknya hubungan saling percaya (*mutual trust*) antar anggota masyarakat merupakan landasan bagi terbentuknya kerjasama (*cooperation*) dan jaringan kerja (*network*). Demikian pula dalam kehidupan masyarakat nelayan. Hubungan yang terjadi dalam masyarakat nelayan dapat dilihat dari hubungan yang terjadi dalam masyarakat nelayan dapat dilihat dari hubungan antara juragan dan buruh, antara nelayan dan pedagang ikan, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan tokoh yaitu kyai, dan juga keamanan lingkungannya merupakan hasil dari kepercayaan diantara pihak-pihak tersebut.

Menurut Dharmawan (2000), hilangnya rasa saling percaya antar individu atau antar kelompok serta miskinnya *trust* dalam pengertian “ketidakmampuan mengemban amanah” (*a lower degree of social accountability*), baik secara interpersonal maupun institusional, akan berakibat pada dua hal penting. Kedua hal tersebut adalah: (a) proses disintegrasi sosial yang menajam; dan (b) proses pemburukan ekonomi sebagai akibat inefisiensi kelembagaan dan transaksi yang makin serius. Singkat kata, proses kemiskinan ekonomi dan penghancuran kelembagaan akan berlangsung berkepanjangan sebagai akibat defisiensi stok modal sosial dalam masyarakat.

2. Jaringan

Putnam (1993), berpendapat mengenai jaringan yaitu infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal. Berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama antar anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya. Gagasan inti dari modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial memengaruhi produk-produktivitas individu

dan kelompok. Hubungan antar individu-jaringan sosial dan norma resoprositas dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut.

Menurut Hasbullah (2006), modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota-anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial kelompok. Dimana, jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun temurun (*repeted social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesifitas tinggi, tetapi rentan jaringan maupun *trust* yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas.

Menurut Suparlan (dalam Paramitasari, 2007) mengemukakan bahwa jaringan sosial merupakan proses pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang (sedikitnya 3 orang) yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri dan dihubungkan melalui hubungan sosial yang ada dengan elemen penting dalam pengembangan masyarakat termasuk dalam perancangan strategi penanggulangan kemiskinan tingkat lokal, melalui hubungan tersebut mereka dapat dikelompokkan sebagai satu kesatuan sosial.

Menurut Agusyanto (dalam Paramitasari, 2007) jaringan sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis: Jaringan kekuasaan, dimana hubungan sosial yang terbentuk bermuatan kepentingan kekuasaan, Jaringan kepentingan, dimana hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan sosial yang bermuatan

kepentingan. Jaringan perasaan, yakni jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan sosial yang berawal dari perasaan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (dalam Paramitasari, 2007) pengertian jaringan adalah sejumlah kegiatan komunikasi yang saling bertautan. Dalam hal ini suatu strategi jaringan sosial dapat terus dikembangkan sehingga dapat mengakses sumberdaya yang tersedia dilingkungan dan dapat menjaga kelangsungan kehidupannya.

Menurut Ancok (2003), banyak pakar yang berpendapat bahwa sukses hidup dalam bermasyarakat ditentukan oleh kemampuan membangun koneksi. Agar supaya suatu produk atau jasa (*service*) dapat menghasilkan nilai (*create value*) warga suatu bangsa harus menciptakan jaringan kerja (koneksi) baik dengan pihak lain. Bila dia seorang pengusaha, dia harus membina hubungan yang baik dengan konsumen, sumber dana, pemasok, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan. Jaringan kerja inilah yang akan menentukan apakah sebuah produk inovatif yang dihasilkan tersebut laku dijual. Koneksi baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global adalah sesuatu yang harus dibangun oleh warga suatu bangsa.

3. Norma

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama. Norma-norma dapat merupakan prakondisi maupun produk dari kepercayaan sosial (Putnam, 1993).

Menurut Hasbullah (2006), norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Aturan kolektif

tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang kuat daya ikatnya. Untuk yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya (Soekanto, 2006).

2.4.3 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut Deptan (2010), Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Menurut Robinson (2000) pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*. Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis

pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.

Menurut Robinson (2000), peran klasik Lembaga Keuangan Mikro sebagai *intermediary institutiun*, lembaga keuangan menjalankan kegiatannya dalam bentuk penghimpunan dana dari pihak yang mengalami surplus dana melalui produk saving, dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang mengalami defisit dana melalui produk lending. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Mikro yaitu memperhatikan kondisi geografis daerah di Indonesia yang sangat luas dan tesebar dalam banyak pulau, serta mengingat pasar sektor riil yang hampir seluruhnya merupakan usaha mikro/UKM, maka agar fungsi lembaga keuangan mikro dalam menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dapat berjalan secara optimal, lembaga keuangan mikro harus memenuhi kualifikasi :

1. memiliki jaringan kerja yang kuat.
2. fungsi sebagai *payment gateway* berjalan dengan baik.
3. memahami kebutuhan Pemerintah Daerah dan bisnis masyarakat setempat.

Menurut Deptan (2010), Badan Kredit Desa boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga ini banyak digunakan sebagai bahan studi Banding oleh negara dunia ketiga dalam mengembangkan Keuangan Mikro. Semua kegiatan pendampingan tersebut diatas dimaksudkan agar BKD mampu membiayai sendiri usahanya, dapat memupuk permodalan dan dapat membantu masyarakat pedesaan anggota BKD dalam meningkatkan usahanya maupun meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan. Setelah melihat keberhasillan BKD inilah, baru kemudian disusul berdirinya LKM-LKM lainnya baik yang didirikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Kelompok Masyarakat di pedesaan, seperti Lumbung Pitih Nagari di

Sumatera, Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Bank Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagainya.

Menurut Deptan (2010), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Gapoktan berbentuk lembaga ekonomi yang bergerak di sektor keuangan, berperan sebagai intermediasi antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana, kelembagaannya dapat berupa bank atau non-bank, dan sasarannya adalah kelompok tani atau usaha mikro dan kecil serta jenis usaha yang dikembangkan harus tidak menyaingi usaha anggotanya. Adapun nilai strategis dari LKM Gapoktan:

1. Mengatur peredaran uang
2. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM yang diberi pembiayaan
3. Mengelola dan mengembangkan modal dan bantuan agar terus berjalan untuk digulirkan
4. Petani miskin dapat memperoleh pelayanan keuangan
5. Memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi petani dan masyarakat sekitar
6. Tumbuhnya infrastruktur layanan keuangan yang kuat yang berasal DARI, OLEH dan UNTUK petani
7. Menjadi mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
8. Potensi perdesaan dapat berkembang secara optimal
9. Masyarakat miskin di perdesaan dapat membangun dirinya sendiri
10. Program-program pengembangan perdesaan dapat disinergikan

LKM Gapoktan memiliki karakteristik ideal guna menunjang program-program perdesaan (Deptan, 2010).

1. Mandiri: swadaya dan mampu membiayai usahanya sendiri
2. Profesional: dikelola dengan penuh waktu bukan pekerjaan sampingan, produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan system, prosedur administrasi dan akutansi standar lembaga keuangan yang dirancang sederhana, efisien dan efektif, pengelolaan dan laporan secara terbuka.

3. Mengakar di Masyarakat: diciptakan, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab.

Dalam Peraturan Menkeu (2008), tersebut diatur bahwa suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik : (i) merupakan bagian dari keuangan negara; (ii) dicantumkan dalam APBN dan atau laporan keuangan negara, (iii) dimiliki, dikuasai, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (iv) disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat kelompok masyarakat (*revolving fund*), (v) ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro kecil, menengah dan usaha lainnya, dan (vi) dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Adapun sistem pengelolaan dana di LKMA menurut Kamira (2011), terdapat prinsip-prinsip pengelolaan dana LKMA sebagai berikut :

- a. Modal LKMA haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan pokok khusus atau modal penyertaan sebagai penguat modal dengan perlakuan sebagai investasi pada lembaga keuangan, selain itu LKMA juga dapat membuka berbagai jenis tabungan Simpanan sukarela.
- b. Agar anggota LKMA mempunyai rasa memiliki yang tinggi, anggota harus dimotivasi oleh pengurus gapoktan dan pengelola LKMA untuk mempunyai simpanan pokok khusus di LKMA.
- c. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, tidak ada paksaan dan dapat menerima warga masyarakat dilingkungan secara selektif tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosial.
- d. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKMA saja, tidak boleh kepada bukan anggota.
- e. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional, berorientasi pada bisnis dan sosial.
- f. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktivitas orang secara layak dan rasional.

- g. Saling percaya. Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain.
- h. Kepemimpinan demokratis ditandai oleh : (i) setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus diperhatikan oleh pengurus (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota didalam rapat anggota pendiri (iv) manajemen diselenggarakan secara terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi keuangan secara berkala.
- i. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan professional kepada para anggota, pertumbuhan dan pelestarian.
- j. Mengalokasikan sumberdana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan pendidikan secara terus menerus bagi kemajuan anggota dan keluarganya.
- k. LKMA melakukan kegiatan pelayanan keuangan untuk mendukung usaha para anggotanya.
- l. Membangun jaringan kerjasama antar LKMA dan lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan.
- m. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
- n. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas dasar watak/karakter peminjam sendiri dan kelayakan usaha.

Menurut Fuady (1996), tentang perjanjian peminjaman apabila ditinjau dari totalitas proses formulasi perjanjian antara debitur (meminjam) dengan kreditur (peminjam), keseluruhan proses tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 fase:

1. Fase peminjaman obligator
Di antara kedua belah pihak terjadi perjanjian obligator pinjam meminjam uang dengan penyerahan jaminan fidusia (penyerahan hak milik).
2. Fase peminjaman kebendaan
Diadakan penyerahan hak dari debitur kepada kreditur secara constitutum proessorium (kontruksi penyerahan hak milik).
3. Fase perjanjian pinjaman pakai

Dalam fase ini benda yang telah jadi milik kreditur dipinjam pakai kepada kreditur.

2.4.4 Analisis FFA (*Force Field Analysis*)

Analisis Medan Kekuatan adalah suatu cara, alat atau metode untuk menelaah suatu situasi yang ingin dirubah menuju situasi atau tujuan tertentu. Situasi atau keadaan itu dapat saja berupa keadaan pribadi, lingkungan, organisasi, proyek dan sebagainya. Metode ini dapat juga digunakan dalam perancangan program khususnya program-program jangka pendek (Itsar, 2008).

Dalam melakukan analisis manajemen yang komprehensif, salah satu alat analisis yang tepat digunakan dalam organisasi bisnis dan nonbisnis adalah analisis SWOT atau FFA. Analisis SWOT berguna untuk melakukan analisis keadaan lingkungan internal dan eksternal, sedangkan *Force Field Analysis* atau analisis medan kekuatan adalah suatu alat yang tepat digunakan dalam merencanakan perubahan. Organisasi harus terus menerus melakukan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dalam menciptakan perubahan, ada dua kondisi yang harus diperhatikan pimpinan yakni yang mendorong dan menghambat perubahan. Untuk mengatasi kondisi yang saling kontradiktif itu, maka perlu dilakukan analisis medan kekuatan (FFA) agar diketahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat (Sianipar, 2003).

Analisis medan kekuatan adalah suatu alat yang tepat digunakan dalam merencanakan perubahan. Hanya organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tetap eksis, maju dan berkembang. Menurut Sckhain (dalam Sianipar, 2003), organisasi harus terus menerus melakukan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Individu berintegrasi melakukan perubahan-perubahan atau membuat diversifikasi agar selalu sesuai dengan tuntutan lingkungan. Merubah tingkah laku dan memanfaatkan energi individu dalam memenuhi tuntutan lingkungan. Dengan cara demikian organisasi akan tetap memiliki keunggulan dalam semua kondisi. Dalam menciptakan perubahan ada dua kondisi yang harus diperhatikan pimpinan yakni yang mendorong dan menghambat perubahan. Untuk mengatasi kondisi yang saling

kontradiktif itu, maka perlu dilakukan analisis medan kekuatan (FFA) agar diketahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat. Berikut ini adalah skema kerangka analisis medan kekuatan (FFA):



Gambar 2.1 Kerangka analisis medan kekuatan (FFA)

Analisis medan kekuatan (FFA) digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP dimana analisis ini merupakan metode analisis sederhana berbasis variabel-variabel pengambilan keputusan. Meliputi

seluruh aspek yang berperan dalam kegiatan pengembangan dana PUAP, yaitu aspek aspek fisik, aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan petani adalah PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa. Sasarannya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan Gapoktan; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani, 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani (Deptan, 2009).

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah pelaksana program PUAP di Jawa Timur. Wilayah yang terpilih salah satunya yaitu Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. PUAP di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. Diharapkan PUAP dapat memajukan perekonomian petani karena program ini dapat dikatakan sebagai penyedia modal. Dan juga untuk memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis dengan cara meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Lembaga disini yang berperan penting adalah Gapoktan.

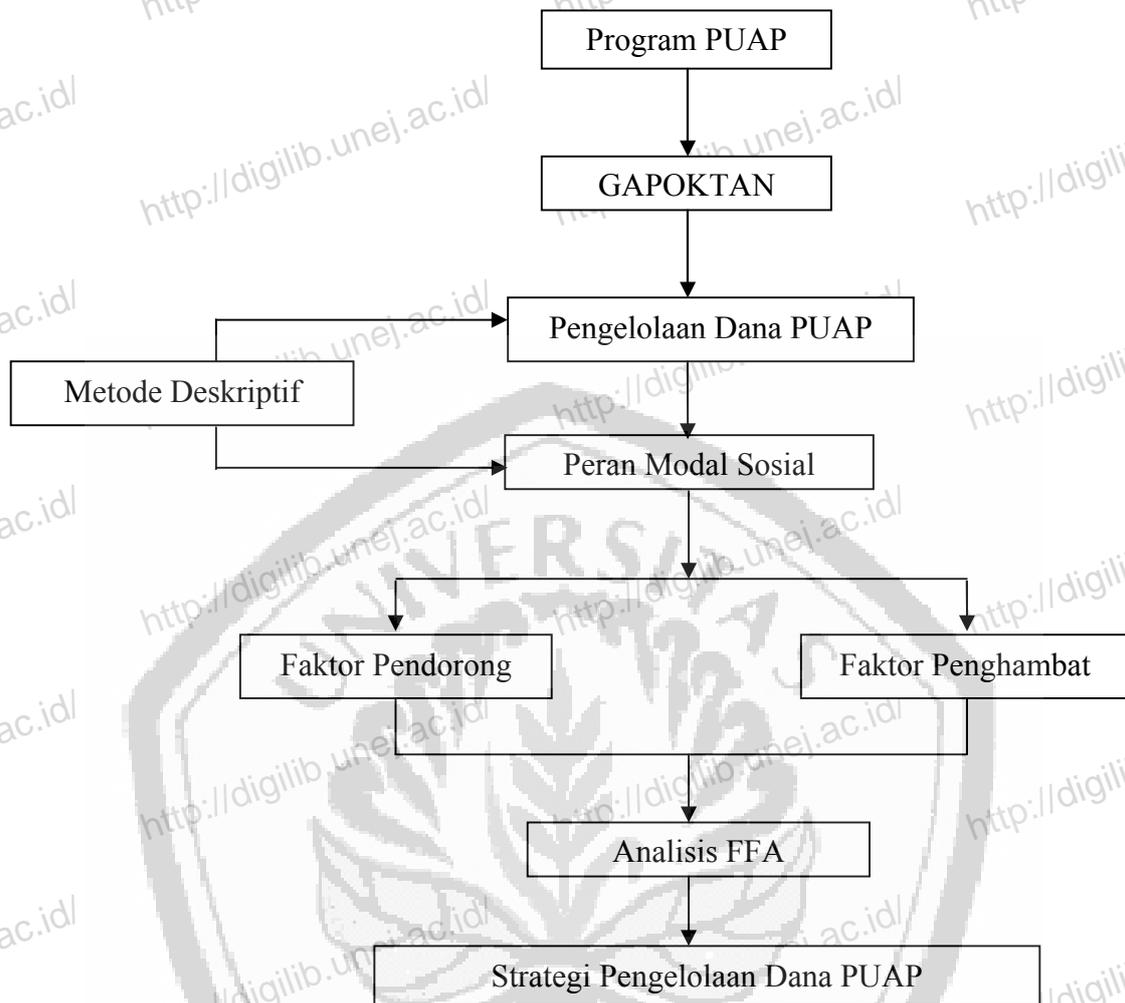
Dana PUAP disalurkan melalui Gapoktan yang menangani pengelolaan dana PUAP. Gapoktan berperan sebagai LKM yang diharapkan menjadi suatu lembaga yang dapat menjadi penyedia modal bagi petani. PUAP dalam pengelolaannya harus sangat diperhatikan agar tepat sasaran dan bermanfaat. Program PUAP ini memberikan keleluasaan kepada Gapoktan secara mandiri untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati seluruh anggota Gapoktan. Sehingga harapan pemerintah, mereka dapat mengukur kemampuan kelompok mereka sendiri dalam hal menentukan bunga pinjaman, pola pengembalian, sanksi apabila ada tunggakan dan sebagainya. Hal ini tentunya meringankan beban petani karena semua telah disusun berdasarkan kesepakatan dan kemampuan seluruh anggota Gapoktan. Nilai lebih lainnya, bahwa petani dapat meningkat kesejahteraannya baik dari laba yang membesar sebagai dampak pengembangan usaha, maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibagikan setiap tahun. SHU ini merupakan self-stimulus petani untuk secara sadar memilih meminjam di LKM Gapoktan daripada rentenir, juga sadar untuk mengangsur atau mengembalikan pinjaman. Ini yang membedakan dengan program-program sebelumnya dimana bunga menjadi milik Lembaga Perbankan.

Agar dalam suatu kelompok tercipta kedinamisan dan keteraturan demi majunya suatu kelompok terutama pada pemanfaatan dana PUAP maka perlu adanya unsur modal sosial dalam kelompok tersebut atau pada Gapoktan tersebut. Karena itu perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang membentuk kedinamisan suatu kelompok dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

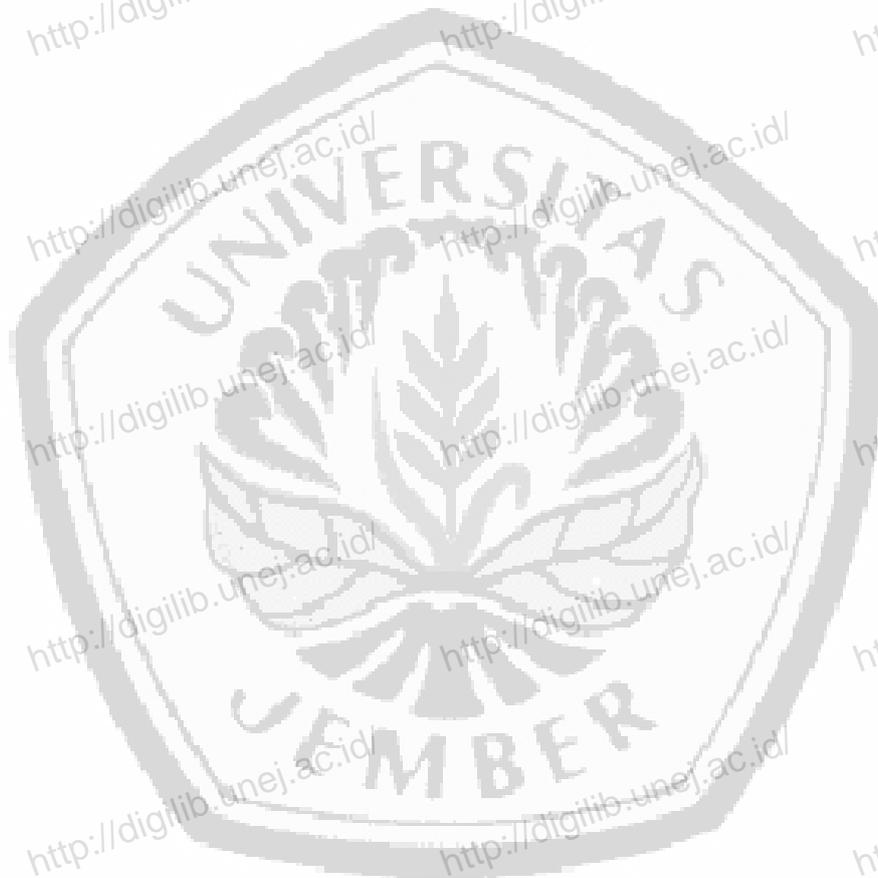
Mengenai pengelolaan dana PUAP dan peran modal sosial dalam pemanfaatan dana tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif yang dapat menjelaskan secara luas suatu keadaan di lapang dengan melihat dari berbagai aspek. Penjelasan dengan analisis deskriptif nantinya harus

disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada di lapang. Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian program dengan sasaran.

Dana PUAP awalnya diberikan kepada Gapoktan, yang selanjutnya Gapoktan diberi keleluasan untuk mengelola dana tersebut. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada petani guna memenuhi permodalan petani. Seratus juta rupiah bagi sebagian kelompok memang besar, tapi bagi sebagian kelompok yang lain seratus juta rupiah tersebut adalah kecil. Dana ini memang hanya stimulus dari pemerintah yang diharapkan bisa membesar seperti bola salju dan bergulir secara berkelanjutan. Pengelolaan LKM Gapoktan juga sangat memerlukan komitmen tinggi dari pengurus dan semua anggota dalam pencapaian tujuan LKM. Adanya harapan pemerintah tentang bergulirnya dana PUAP agar bertambah besar dan berkelanjutan maka dalam pengelolaanya perlu adanya strategi pengembangan. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan mencari dan melihat faktor pendorong dan penghambat yang terdapat di lapang. Setelah menemukan faktor tersebut maka dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis sederhana berbasis SWOT yang disebut dengan analisis medan kekuatan (*Force Field Analysis*) pada berbagai sistem pengambilan keputusan. Setelah dianalisis output yang diharapkan adalah menemukan strategi pengembangan dalam pengelolaan sehingga Program PUAP dapat benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dipilih secara sengaja (*purposive method*) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Hal yang mendasari pemilihan Kecamatan Umbulsari sebagai daerah penelitian yaitu bahwa daerah tersebut merupakan daerah dengan desa terbanyak sebagai penerima PUAP Tahun 2008. Tahun 2008 merupakan awal diluncurkannya program, maka dengan memilih dua desa sebagai sampel yaitu Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menerangkan hubungan dan menguji hipotesis untuk mendapatkan makna dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, 1999).

3.3 Penentuan Informan

Pada penelitian ini peneliti dalam mencari informasi melalui informan, dalam memilih informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Adapun dalam pemilihan informan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama dan kedua yaitu para informan yang ditentukan oleh peneliti yang berasal dari Gapoktan di dua desa sebanyak 25 informan. Cara yang digunakan peneliti untuk mencari informasi yaitu dengan mendatangi informan satu persatu secara bertahap mula-mula Ketua Gapoktan, kemudian para pengurus Gapoktan,

Ketua Kelompok Tani, Pengurus Kelompok Tani, Anggota Gapoktan yang memanfaatkan dana PUAP.

Pada rumusan masalah yang ketiga penentuan informan yaitu dengan melakukan FGD (*Forum Group Discussion*). Peserta FGD terdiri dari para pemangku jabatan atau pengambil kebijakan yang berada pada Dinas Pertanian yaitu Koordinator Tim Teknis PUAP Kabupaten Jember, Kepala dan sekretaris Penyuluhan Dinas Pertanian. Peserta lainnya terdiri dari PPL pada desa yang diteliti, Ketua Gapoktan, Pengurus Gapoktan, dan anggota Gapoktan yang dianggap oleh peneliti mengetahui keadaan daerah penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer

Data ini diperoleh langsung dengan melakukan Observasi Partisipatif yaitu dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena dilapangan terhadap objek penelitian. Kegiatan observasi partisipatif berupa survey langsung terhadap kondisi Gapoktan/LKMA yang dijadikan sampel, serta untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan dalam proses penyaluran dana ke petani. Melakukan wawancara mendalam dengan membuat panduan pertanyaan yang telah disiapkan yang dijadikan acuan dan instrumen wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, terstruktur dengan pedoman dapat meliputi transparansi penyaluran, sanksi pada kredit macet, hadiah atau penghargaan yang diberikan pada anggota, aturan peminjaman serta adanya pengawasan dari pemerintah dan anggota semua terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PUAP. Menggunakan dokumen-dokumen yang ada untuk menggali informasi dengan melihat administrasi kelompok, besarnya kas, catatan harian, surat menyurat, dokumen resmi, fotografi, dan dokumen lainnya yang dapat memperkaya informasi.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari instansi terkait seperti: Dinas Pertanian Kabupaten Jember, Kantor Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Gapoktan Desa Sidorejo dan Gadingrejo, dan berbagai instansi yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari internet.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menguji permasalahan pertama dan kedua tentang pengelolaan dana PUAP dan peran modal sosial dalam pemanfaatan dan PUAP Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari, menggunakan deskriptif murni dari hasil wawancara mendalam yang dipandu dengan kuisioner. Pada penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992), proses analisis data kualitatif dipilah dalam 3 tahapan:

1. Pereduksian data
2. Penyajian data
3. Penyimpulan

Pereduksian data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan harian. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Proses reduksi mencakup sejumlah kegiatan yang saling berkait:

- a) Meringkas data
- b) Mengkode data
- c) Menelusur tema
- d) Membuat gugus-gugus kategorisasi
- e) Menulis catatan atas makna data (interpretasi atas tiap kategori dan kaitan antar kategori data)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Melalui seleksi ketat
2. Melalui ringkasan atau uraian singkat
3. Penggolongan data kedalam pola yang lebih luas

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data:

1. Teks naratif.
2. Matriks, grafik, jaringan dan bagan

Tabel perbandingan diantara keduanya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Teks Naratif dan Matriks, Grafik, Jaringan dan Bagan Dalam Penyajian Data Kualitatif

| Teks naratif | Matriks, grafik, jaringan dan bagan |
|---|---|
| a. Tidak praktis | a. Menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan melihat apa yang sedang terjadi. Dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis |
| b. Mengandung kesulitan, karena biasanya panjang sehingga melebihi kemampuan manusia memproses informasi dan menggerogoti kecenderungan mereka untuk menemukan pola-pola yang sederhana | |

Peneliti pada reduksi data dengan menulis catatan atas makna data (interpretasi atas tiap kategori dan kaitan antar kategori data) kemudian Menggolongkan data kedalam pola yang lebih luas. Pada penyajian data peneliti menggunakan teks naratif yaitu lebih mengarah pada sebuah pemaparan berupa deskripsi dari data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2012), uji validitas data kualitatif dapat dilakukan melalui metode Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Melalui Observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Selanjutnya wawancara mendalam yaitu suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara sesuai pedoman wawancara peneliti dengan informan yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi. Setelah itu dengan dokumen yaitu informasi bukan dari orang sebagai

narasumber tetapi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir.

Untuk menguji permasalahan yang ketiga mengenai strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP, menggunakan analisis medan kekuatan atau *Force Field Analysis* (FFA), adapun tahapan-tahapan dalam *Force Field Analysis* (FFA) yaitu (Sianipar, 2003).

1. Megidentifikasi masalah berdasarkan isu strategis. Isu strategis ini dapat menyangkut aspek keadaan, kegiatan Gapoktan dan aspek kegiatan usaha anggota melalui Gapoktan.
2. Menganalisis masalah, dan mengidentifikasi berbagai kekuatan pendorong (*driving force*) dan kekuatan (*restraining force*).
3. Memberikan penilaian skala prioritas terhadap setiap faktor pendorong dan faktor penghambat.

Adapun aspek yang dinilai dengan menentukan faktor keberhasilan sebagai faktor-faktor strategis atau faktor kunci keberhasilan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap setiap faktor yang teridentifikasi. Aspek yang dinilai dari tiap faktor adalah:

1. Urgensi atau bobot faktor dalam mencapai tujuan.
2. Dukungan atau kontribusi tiap faktor dalam mencapai tujuan.
3. Keterkaitan antara faktor dalam mencapai tujuan.

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan secara kualitatif yang dikuantitatifkan melalui metode skala *Likert* yaitu, suatu penilaian dengan model *rating scale* yang selanjutnya disebut model skala nilai kemudian dikonversikan dalam angka, yaitu;

| | | |
|-------------|------|--|
| Sangat baik | = 5, | artinya sangat tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan |
| Baik | = 4, | artinya tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/ nilai keterkaitan |
| Cukup | = 3, | artinya cukup tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan |

Kurang = 2, artinya kurang nilai urgensi/nilai dukungan/ nilai keterkaitan

Sangat Kurang = 1, artinya sangat kurang nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan. Menilai keterkaitan antar faktor yang tidak ada kaitannya maka diberi nilai 0.

1. Penilaian Faktor Pendorong dan Penghambat

Penilaian faktor pendorong dan penghambat meliputi:

1. NU (Nilai Urgensi)

Penilaian NU (nilai urgensi) dilakukan dengan memakai model *rating scale* 1-5 atau melalui teknik komparasi, yaitu membandingkan faktor yang paling urgen antara satu faktor dengan faktor yang lainnya.

2. BF (Bobot Faktor)

Penilaian BF (bobot faktor) dapat dinyatakan dalam bilangan desimal atau persentase. Rumus dalam menentukan BF yaitu:

$$BF = \frac{NU}{\sum NU} \times 100\%$$

3. ND (Nilai Dukungan)

Nilai ND (nilai dukungan) ditentukan dengan *brainstorming* melalui wawancara dengan metode FGD (*Forum Group Discussion*) yakni semua pelaku Agribisnis yang terkait dalam Program PUAP.

4. NBD (Nilai Bobot Dukungan)

Nilai NBD (nilai bobot dukungan) dapat ditentukan dengan rumus:

$$NBD = ND \times BF$$

5. NK (Nilai Keterkaitan)

Nilai keterkaitan ditentukan dengan keterkaitan antara faktor pendorong dan penghambat. Nilai keterkaitan tiap faktor menggunakan rentang nilai antara 1-5. Apabila tidak memiliki keterkaitan diberi nilai 0 sedangkan faktor-faktor yang memiliki keterkaitan diberi nilai antara 1-5.

6. TNK (Total Nilai Keterkaitan)

Total nilai keterkaitan ditentukan dari jumlah total nilai keterkaitan antara faktor pendorong dan penghambat dalam satu baris.

7. NRK (Nilai Rata-Rata Keterkaitan)

Nilai rata-rata keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus:

$$NRK = \frac{TNK}{\sum N - 1}$$

TNK = total nilai keterkaitan

$\sum N$ = jumlah faktor internal dan eksternal yang dinilai

1 = satu faktor yang tidak dapat dikaitkan dengan faktor yang sama

8. NBK (Nilai Bobot Keterkaitan)

Nilai bobot keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus :

$$NBK = NRK \times BF$$

9. TNB (Total Nilai Bobot)

Total nilai bobot tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus:

$$TNB = NBD + NBK$$

2. Faktor Kunci Keberhasilan dan Diagram Medan Kekuatan

A. Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Berdasarkan besarnya TNB pada tiap-tiap faktor maka dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai faktor kunci keberhasilan (FKK) yang dapat dijadikan sebagai penentu strategi atau solusi dari adanya faktor pendorong dan penghambat. Cara menentukan FKK adalah sebagai berikut:

- Dipilih berdasarkan TNB yang terbesar
- Jika TNB sama maka dipilih BF terbesar
- Jika BF sama maka dipilih NBD terbesar
- Jika NBD sama maka pilih NBK terbesar
- Jika NBK sama maka dipilih berdasarkan pengalaman dan rasionalitas.

B. Diagram Medan Kekuatan

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor pendorong dan penghambat dapat divisualisasikan dalam suatu diagram yang bernama diagram medan kekuatan.

Adapun penyusunan strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari dapat diwujudkan apabila tahapan penilaian sudah dilewati sehingga berdasarkan nilai

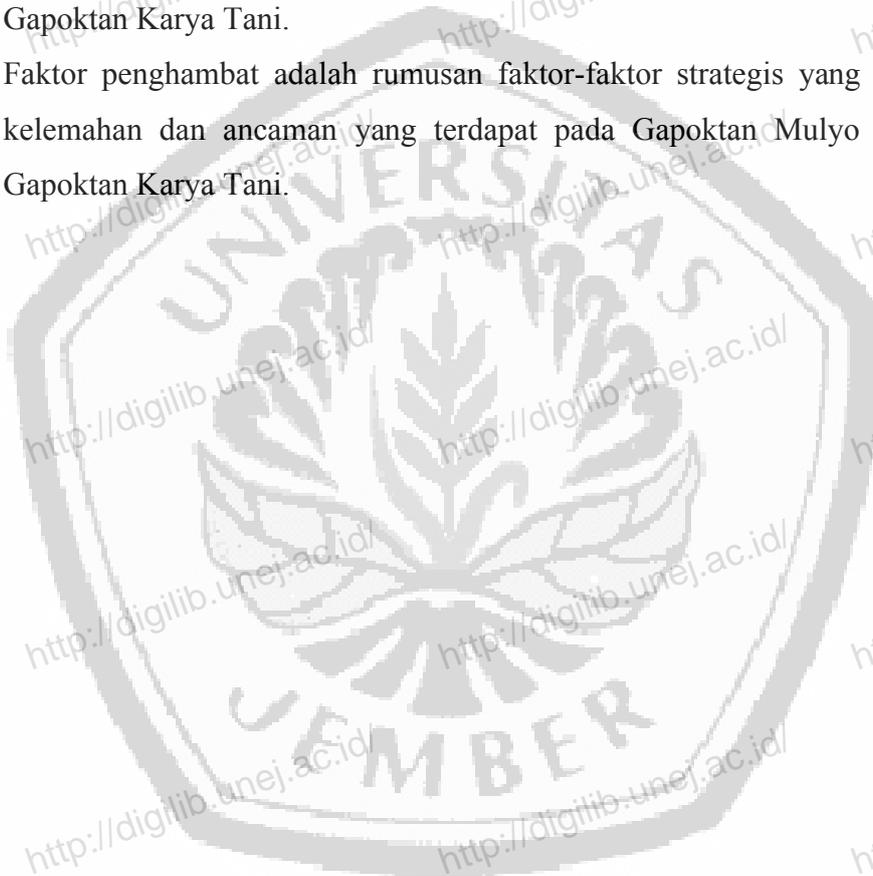
tersebut dapat diketahui strategi pengembangan pada pengelolaan dana PUAP. Penyusunan strategi pengembangan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan sebagaimana nanti tergambar dalam diagram medan kekuatan. Apabila telah diketahui faktor kunci pendorong tentu lebih mudah memproyeksikan tujuan yang rasional dan logis dicapai. Sementara untuk mencegah resiko kegagalan tentu dapat disusun strategi meminimalisir atau menghilangkan faktor kunci penghambat.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tergabung dalam Gapoktan Mulyo Abadi atau Gapoktan Karya Tani pada Kecamatan Umbulsari yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yaitu Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan.
3. Gapoktan Mulyo Abadi adalah Gapoktan yang berada di Desa Sidorejo yang merupakan desa penerima PUAP tahun 2008.
4. Gapoktan Karya Tani adalah Gapoktan yang berada di Desa Gadingrejo yang merupakan desa penerima PUAP tahun 2008.
5. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang yang tergabung dalam Gapoktan Mulyo Abadi atau Gapoktan Karya Tani.
7. Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

8. Modal Sosial adalah intitusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama pada Gapoktan Mulyo Abadi atau Gapoktan Karya Tani.
9. Jaringan adalah hubungan antar individu, antar kelompok dalam suatu kelompok sosial terjadi dalam bentuk formal maupun informal yang terbentuk berdasarkan kepentingan yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.
10. Norma adalah pemahaman-pemahaman berupa aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani mengenai Penyaluran dan pengembalian dana PUAP.
11. Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan tidak akan senantiasa bertindak merugikan diri dan kelompoknya di antara anggota Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.
12. Manajemen Pengelolaan adalah suatu cara untuk mengatur dan menata suatu program yang terdapat pada suatu instansi/lembaga tertentu guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu program PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.
13. Sosialisasi adalah suatu cara penyampaian adanya sebuah program kepada seluruh anggota Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani yaitu program PUAP.
14. Penggunaan Dana adalah suatu pemanfaatan yang sesuai dengan RUA (Rancangan Usaha Anggota) yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.
15. Manfaat adalah suatu keuntungan yang didapat oleh anggota Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani dengan adanya keberadaan program PUAP.

16. Pendapatan dan perkembangan usaha adalah suatu ukuran yang digunakan oleh penelitian kualitatif melalui persepsi informan pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.
17. Force Field Analysis adalah suatu alat analisis untuk merencanakan suatu perubahan yang terdiri dari faktor pendorong dan penghambat.
18. Faktor pendorong adalah rumusan faktor-faktor strategis yang terdiri dari kekuatan dan peluang yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.
19. Faktor penghambat adalah rumusan faktor-faktor strategis yang terdiri dari kelemahan dan ancaman yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani.



BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian

Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo merupakan desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Sidorejo adalah 543.110 ha, yang terbagi atas dua dusun, yaitu Dusun Gumuk Kembar dan Dusun Krajan. Luas wilayah Desa Gadingrejo adalah 902.763,48 ha, yang terbagi atas tiga dusun, yaitu Dusun Padangrejo, Dusun Krajan I, dan Dusun Krajan II.

Batas-batas Desa Sidorejo berdasarkan letaknya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Gadingrejo
Sebelah Selatan : Desa Mundurejo
Sebelah Timur : Desa Wringin Agung
Sebelah Barat : Desa Semboro dan Umbulrejo

Batas-batas Desa Gadingrejo berdasarkan letaknya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Rejoagung
Sebelah Selatan : Desa Gunungsari
Sebelah Timur : Desa Umbulsari
Sebelah Barat : Desa Mundurejo

Letak antara Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo ke ibu kota Kabupaten Jember adalah 45 Km dengan jarak tempuh \pm 2 jam. Berdasarkan keadaan iklimnya, Desa Sidorejo juga mengalami dua musim dengan jumlah bulan hujan \pm 6 bulan. Desa Sidorejo berada pada ketinggian 10 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata harian \pm 24,33° C, dengan curah hujan \pm 15 mm/tahun.

4.2 Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo merupakan suatu golongan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bersuku Jawa. Jumlah kepala keluarga Desa Sidorejo berdasarkan profil desa pada tahun 2011 mencapai 1.013, sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 3.591 jiwa. Pada Desa Gadingrejo jumlah kepala keluarga berdasarkan profil desa pada tahun 2010

mencapai 1.668, sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 5.263 jiwa. Kondisi penduduk di Desa Sidorejo pada tahun 2010 berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan jumlah penduduk laki-laki lebih kecil daripada perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keadaan Penduduk Desa Sidorejo berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 1.649 | 46 |
| 2 | Perempuan | 1.942 | 54 |
| Total | | 3.591 | 100 |

Sumber: Profil Desa Sidorejo (2011).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di daerah penelitian sebesar 1.649 jiwa atau 46 persen dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.942 jiwa atau 54 persen. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang berada di Desa Sidorejo lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, namun perbedaan jumlah dan persentasenya tidak terlalu jauh sehingga terdapat dua kemungkinan bahwa di Desa Sidorejo dapat dikatakan memiliki potensi tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh perempuan atau potensi tenaga kerja laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Kondisi penduduk di Desa Gadingrejo pada tahun 2010 berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan jumlah penduduk laki-laki lebih kecil daripada perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Desa Gadingrejo berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 2.516 | 48 |
| 2 | Perempuan | 2.748 | 52 |
| Total | | 5.263 | 100 |

Sumber: Profil Desa Gadingrejo (2010).

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di daerah penelitian sebesar 2.516 jiwa atau 48 persen dan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.748 jiwa atau 52 persen. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang berada di Desa Gadingrejo lebih sedikit dibandingkan

dengan jumlah penduduk perempuan, namun perbedaan jumlah dan persentasenya tidak terlalu jauh sehingga terdapat dua kemungkinan bahwa di Desa Gadingrejo dapat dikatakan memiliki potensi tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh perempuan atau potensi tenaga kerja laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2011

| No | Usia (Tahun) | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 0 – 4 | 63 | 1,7 |
| 2 | 5 – 9 | 167 | 4,7 |
| 3 | 10 – 14 | 161 | 4,5 |
| 4 | 15 – 24 | 588 | 16,4 |
| 5 | 25 – 54 | 1.300 | 36,2 |
| 6 | >55 | 1.312 | 36,5 |
| Total | | 3.591 | 100 |

Sumber: Profil Desa Sidorejo (2011).

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada usia produktif 15-54 merupakan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2011 dengan jumlah sebanyak 1.888 jiwa atau sebesar 52,6 persen dari total penduduk Desa Sidorejo. Sedangkan jumlah penduduk yang berada pada usia lebih dari 55 tahun merupakan jumlah penduduk terbesar setelah penduduk usia produktif yakni 1.312 jiwa atau 36,5 persen. Pada usia di bawah umur 0-14 tahun sebanyak 391 jiwa atau 10,9 persen sehingga dapat dikatakan jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2010

| No | Usia (Tahun) | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 0 – 4 | 399 | 7,6 |
| 2 | 5 – 9 | 386 | 7,3 |
| 3 | 10 – 14 | 350 | 6,7 |
| 4 | 15 – 24 | 890 | 16,9 |
| 5 | 25 – 54 | 2297 | 43,6 |
| 6 | >55 | 941 | 17,9 |
| Total | | 5.263 | 100 |

Sumber: Profil Desa Gadingrejo (2010).

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada usia produktif 15-54 merupakan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2010 dengan jumlah sebanyak 3187 jiwa atau sebesar 60,5 persen dari total penduduk Desa Gadingrejo. Sedangkan jumlah penduduk yang berada pada usia di bawah umur 0-14 tahun merupakan jumlah penduduk terbesar setelah penduduk usia produktif yakni 1.135 jiwa atau 21,6 persen. Pada usia lebih dari 55 tahun yakni sebanyak 941 jiwa atau 17,9 persen sehingga dapat dikatakan ketersediaan tenaga kerja cukup banyak.

4.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Sidorejo mempunyai mata pencaharian yang beragam dari total keseluruhan penduduk. Mata pencaharian Desa Sidorejo yang memiliki persentase terbesar adalah sebagai Buruh dan terbesar kedua sebagai petani. Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2011

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (Jiwa) | Persentase(%) |
|-------|------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Petani | 289 | 36,2 |
| 2 | Pegawai Negeri | 66 | 8,3 |
| 3 | Buruh | 347 | 43,5 |
| 4 | Pedagang | 19 | 2,4 |
| 5 | Pengusaha kecil dan menengah | 77 | 9,6 |
| Total | | 798 | 100 |

Sumber: Profil Desa Sidorejo (2011).

Penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari sebagian besar bekerja sebagai buruh dan pada sektor pertanian. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh sebanyak 347 orang atau 43,5 persen dan bekerja pada sektor pertanian sebanyak 289 orang atau 36,2 persen, diikuti oleh penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sebesar 66 orang atau 8,3 persen, penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebesar 19 orang atau 2,4 persen, dan penduduk yang bekerja di bidang pengusaha kecil dan menengah sebanyak 77 orang atau 9,6 persen. Mata pencaharian sebagai petani menunjukkan bahwa sektor pertanian ikut menjadi pondasi ekonomi pendapatan Desa Sidorejo.

Penduduk Desa Gadingrejo mempunyai mata pencaharian yang beragam dari total keseluruhan penduduk. Mata pencaharian Desa Gadingrejo yang memiliki persentase terbesar adalah sebagai petani dan terbesar kedua sebagai pengrajin rumah tangga. Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2010 Dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2010

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Petani | 2.310 | 76,5 |
| 2 | Pegawai Negeri | 50 | 1,6 |
| 3 | Karyawan Swasta / Pemerintah | 118 | 3,9 |
| 4 | Pengrajin industri Rumah Tangga | 163 | 5,4 |
| 5 | Pengusaha kecil dan menengah | 11 | 0,4 |
| 6 | Lain-lain | 368 | 12,2 |
| Total | | 3.020 | 100 |

Sumber: Profil Desa Gadingrejo (2010).

Penduduk Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 2.310 atau 76,5 persen, diikuti oleh penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sebesar 50 orang atau 1,6 persen, penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta/pemerintah sebesar 118 orang atau 3,9 persen, penduduk yang bekerja sebagai pengrajin Industri rumah tangga sebesar 163 orang atau 5,4 persen, bidang pengusaha kecil dan menengah sebanyak 11 orang atau 0,4 persen dan lain-lain sebanyak 368 orang atau 12,2 persen. Mata pencaharian sebagai petani merupakan mata pencaharian terbanyak Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi pondasi ekonomi pendapatan Desa Gadingrejo.

4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting yang dapat mendukung terciptanya kesuksesan dalam proses pembangunan pertanian. Pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan pendidikan bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pendidikan

akan membantu memudahkan proses adopsi inovasi teknologi, khususnya teknologi di bidang pertanian. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Sidorejo beragam mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2011

| No. | Tingkat Pendidikan | Desa Sidorejo | |
|-----|--------------------|---------------|----------------|
| | | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
| 1. | Tamat SD | 159 | 21,4 |
| 2. | Tamat SMP | 255 | 34,3 |
| 3. | Tamat SMA | 302 | 40,6 |
| 4. | Sarjana (S-1) | 28 | 3,7 |
| 5. | Lain-lain | - | |
| | Jumlah | 744 | 100 |

Sumber: Profil Desa Sidorejo (2011).

Berdasarkan pada Tabel 4.7 tingkat pendidikan penduduk Desa Sidorejo tergolong rendah karena hal tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk yang sebagian besar penduduk mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas. Dan pada tingkat ini merupakan jumlah terbanyak sebanyak 302 orang atau 40,6 persen. Jumlah penduduk yang tamat SD mencapai 159 orang atau 21,4 persen. Jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan sampai tamat sekolah menengah pertama sebanyak 255 orang atau 34,3 persen dan jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana pada perguruan tinggi sebanyak 28 orang atau 3,7 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari. Lebih dari setengah jumlah penduduk Desa Sidorejo telah menempuh pendidikan. Semakin banyak jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan, maka semakin mudah dan cepat proses penyerapan adopsi inovasi teknologi, khususnya bagi para penerima dana. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan proses penyerapan pengetahuan yang memudahkan penduduk untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan hidup.

Pada Desa Gadingrejo beragam mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Tahun 2010

| No. | Tingkat Pendidikan | Desa Gadingrejo | |
|--------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
| 1. | Tamat SD | 1580 | 46,9 |
| 2. | Tamat SMP | 731 | 21,7 |
| 3. | Tamat SMA | 860 | 25,5 |
| 4. | Tamat (D-1,D-2,D-3) | 145 | 4,3 |
| 5. | Tamat (S-1, S-2) | 51 | 1,6 |
| Jumlah | | 3367 | 100 |

Sumber: Profil Desa Gadingrejo (2010).

Berdasarkan pada Tabel 4.8 tingkat pendidikan penduduk Desa Gadingrejo tergolong cukup rendah hal tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk yang sebagian besar penduduk mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Dan pada tingkat ini merupakan jumlah terbanyak. Jumlah penduduk yang tamat SD mencapai 1580 orang atau 46,9 persen. Jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga D-1, D-2, D-3 sebanyak 145 atau 4,3 persen dan jumlah penduduk yang sampai sarjana S-1, S-2 sebanyak 51 orang atau 1,6 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari. Lebih dari setengah jumlah penduduk Desa Gadingrejo telah menempuh pendidikan. Serta di Desa Gadingrejo lebih beragam tingkat pendidikannya. Semakin banyak jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan, maka semakin mudah dan cepat proses penyerapan adopsi inovasi teknologi, khususnya bagi para penerima dana PUAP. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan proses penyerapan pengetahuan yang memudahkan penduduk untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan hidup.

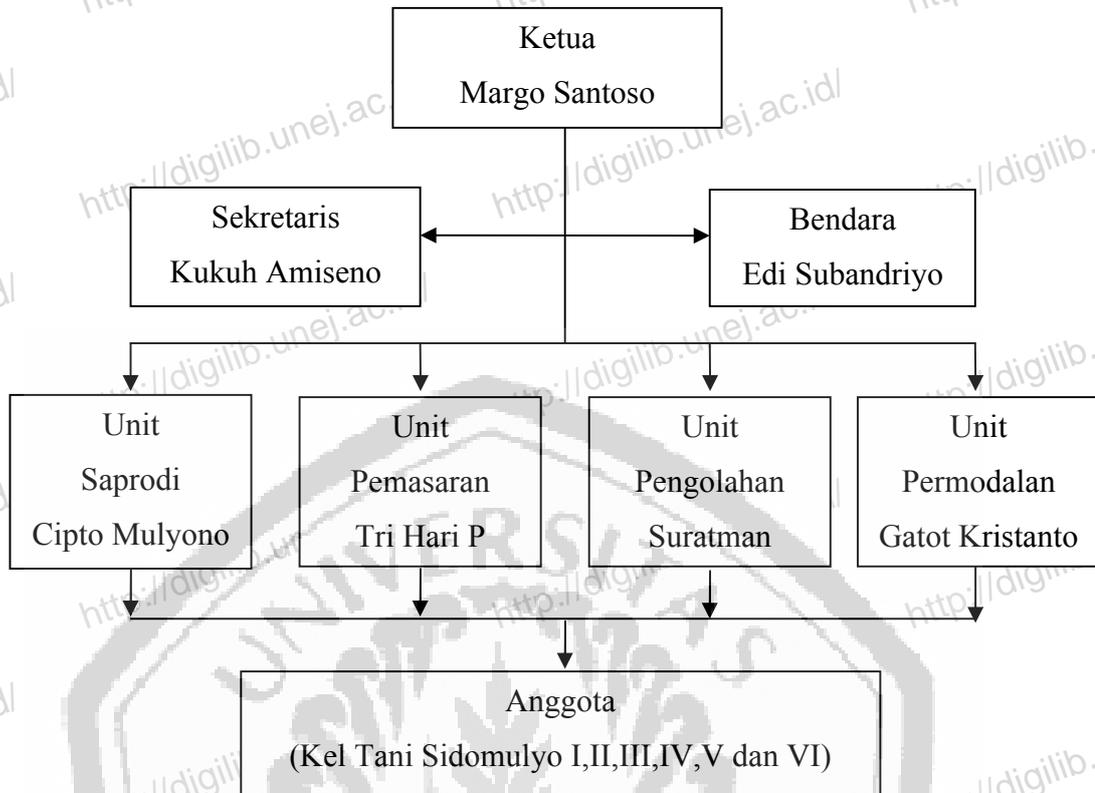
4.5 Karakteristik Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani

4.5.1 Sejarah Gapoktan Mulyo Abadi

Desa Sidorejo terdapat Gapoktan yang bernama Mulyo Abadi yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani, di sana terdapat 6 buah kelompok tani antara lain Sidomulyo I, Sidomulyo II, Sidomulyo III, Sidomulyo IV, Sidomulyo V, dan Sidomulyo VI. Keenam Kelompok tani memiliki tingkat kelompok yang berbeda mulai tingkat pemula sampai tingkat utama.

Mulyo Abadi berdiri sekitar tahun 2008 atas dasar keberadaannya bantuan dari pemerintah yaitu PUAP, syarat dana PUAP dapat diberikan kepada suatu desa adalah terdapatnya Gapoktan di desa tersebut. Departemen Pertanian mempunyai syarat tersebut atas dasar, agar memudahkan pengelolaan dana PUAP yang terpusat pada Gapoktan dan memudahkan pula dalam pertanggung jawabannya, karena dana PUAP tersebut mempunyai kekuatan hukum jadi meskipun dana tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 100.000.000, namun dalam pengelolaannya terdapat pengawasan ketat dari Dinas Pertanian dengan adanya pendampingan. Pendampingan dilakukan bisa dari PPL ataupun perangkat dari Dinas Pertanian yang ditugaskan. Melihat kondisi tersebut maka terbentuklah Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo.

Gapoktan Mulyo Abadi beranggotakan kurang lebih 424 anggota dengan berdasarkan pengetahuan di bidang pertanian dan aktif dalam memajukan kelompok tani yang diketuainya maka Pak Margo ditunjuk sebagai ketua melalui musyawarah anggota, aparat desa dan perwakilan Dinas Pertanian. Pemilihan pengurus yang lain melalui pertimbangan ketua Gapoktan terpilih dan masukan dari anggota serta kesediaan calon pengurus tersebut menunjang agenda kerja Gapoktan terkait penerimaan dana PUAP. Demikian struktur organisasi Gapoktan Mulyo Abadi. dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gapoktan Mulyo Abadi

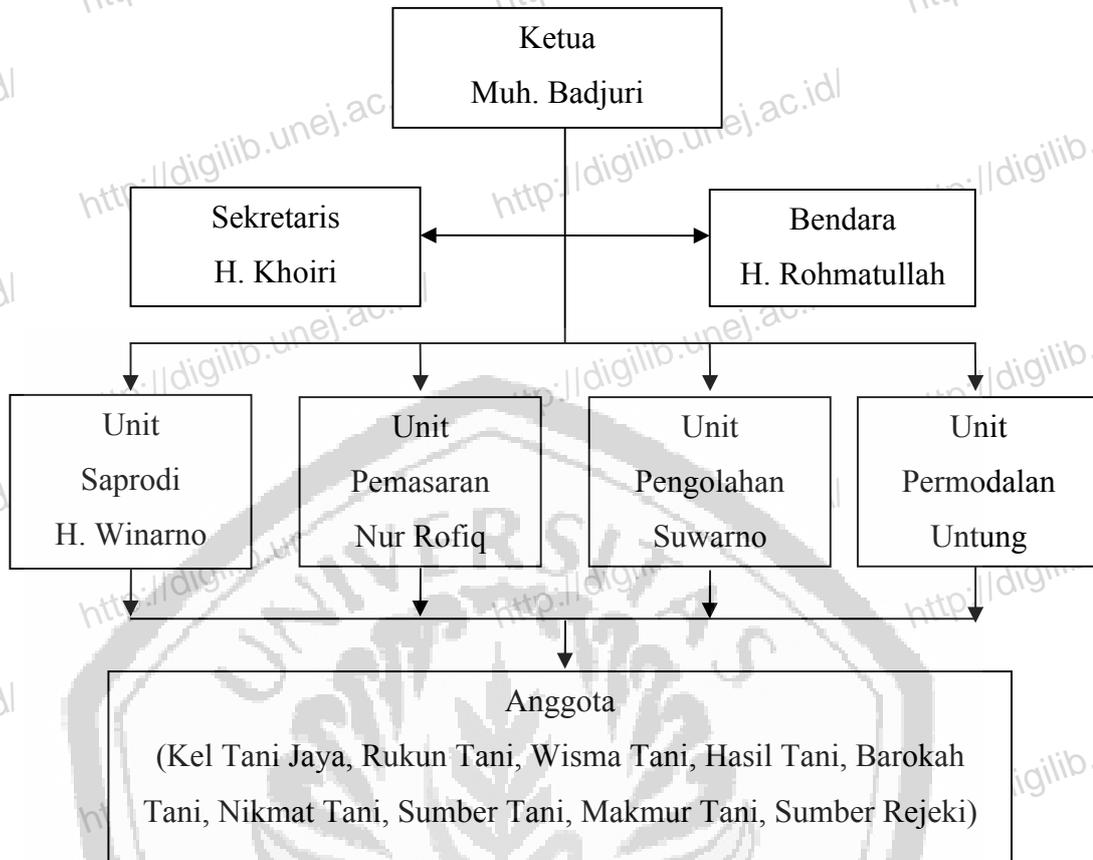
4.5.2 Sejarah Gapoktan Karya Tani

Desa Gadingrejo terdapat Gapoktan yang bernama Karya Tani yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani, di sana terdapat 9 buah kelompok tani yang terdiri dari 8 kelompok tani bergerak di bidang on farm dan 1 kelompok tani bergerak di bidang *off farm* antara lain Hasil Tani, Wisma Tani, Tani Jaya, Rukun Tani, Nikmat Tani, Barokah Tani, Sumber Tani, Makmur Tani, dan Sumber Rejeki. Sumber Rejeki merupakan kelompok yang bergerak di bidang *off farm*. Kesembilan Kelompok tani memiliki tingkat kelompok yang berbeda mulai tingkat pemula sampai tingkat utama.

Karya Tani awalnya pada tahun 2007 terdiri dari 3 kelompok, namun seiring berjalannya waktu dikarenakan 3 kelompok tersebut tidak dapat berjalan sesuai harapan maka terjadi perubahan dan perombakan pada tahun 2008 dengan mendirikan awalnya 2 kelompok saja berdiri sekitar tahun 2008 atas dasar keberadaannya bantuan dari pemerintah yaitu PUAP, syarat dana PUAP dapat

diberikan kepada suatu desa adalah terdapatnya Gapoktan di desa tersebut dan juga Gapoktan dapat terbentuk jika terdapat minimal 2 kelompok tani. Departemen Pertanian mempunyai syarat tersebut atas dasar, agar memudahkan pengelolaan dana PUAP yang terpusat pada Gapoktan dan memudahkan pula dalam pertanggung jawabannya, karena dana PUAP tersebut mempunyai kekuatan hukum jadi meskipun dana tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 100.000.000, namun dalam pengelolaannya terdapat pengawasan ketat dari Dinas Pertanian dengan adanya pendampingan. Pendampingan dilakukan bisa dari PPL ataupun perangkat dari Dinas Pertanian yang ditugaskan. Melihat kondisi tersebut maka terbentuklah Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo.

Gapoktan Gadingrejo kini terdiri dari 9 kelompok dan beranggotakan 1569 anggota dengan berdasarkan pengetahuan di bidang pertanian, aktif dalam memajukan kelompok tani yang diketuainya dan juga merupakan tokoh masyarakat maka Pak Badjuri ditunjuk sebagai ketua melalui musyawarah anggota, aparat desa dan perwakilan Dinas Pertanian. Pemilihan pengurus yang lain melalui pertimbangan ketua Gapoktan terpilih dan masukan dari anggota serta kesediaan calon pengurus tersebut menunjang agenda kerja Gapoktan terkait penerimaan dana PUAP. Demikian struktur organisasi Gapoktan Karya Tani dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Gapoktan Karya Tani

4.5.3 Gambaran Umum PUAP

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mewujudkan kesejahteraan petani dan perdesaan adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai implementasi dari program PNPM mandiri, beserta program lainnya. Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal Gapoktan, yang selanjutnya akan diberikan kepada petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani sebagai bantuan modal dalam kegiatan usaha pertanian (Suradisastra, 2010).

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan

menciptakan lapangan kerja di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan. Gapoktan juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain :

- 1) Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
- 2) Memiliki struktur kepengurusan yang aktif;
- 3) Dimiliki dan dikelola oleh petani;
- 4) Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota.

Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan sebesar Rp 100.000.000. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan guna menunjang kegiatan usahatani. Tentunya dalam penyaluran dana tersebut terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan memanfaatkan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan PUAP berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembinaan dan pengendalian di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota.

Tim pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat propinsi dan kabupaten kota dalam bentuk pelatihan. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim pembina propinsi kepada tim teknis kabupaten/kota difokuskan antara lain pada peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM-PUAP ditingkat kabupaten atau kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP. Selanjutnya pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim teknis kabupaten atau kota kepada tim teknis kecamatan dilakukan dalam format pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan nantinya. Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke propinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina PUAP propinsi hingga kepada tim

teknis PUAP kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Apabila dalam penyaluran BLM-PUAP berjalan dengan lancar dan di awasi secara optimal dan intensif sehingga pada akhirnya mencapai sasaran yang dituju yakni salah satunya adalah meningkatkan pendapatan petani maka penyaluran bantuan PUAP dapat dikatakan berhasil.

4.5.4 Petunjuk Teknis PUAP

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2008 mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian, Hal tersebut juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tidak mengalami perubahan dari tahun 2008, yaitu untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani dalam mendukung 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian yaitu (1) swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) diversifikasi pangan, (3) nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Adapun Mekanisme Pencairan Dana Pemerintah ke Gapoktan seperti berikut:

Kriteria Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain: a) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis; b) Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani; dan c) Pengurus Gapoktan adalah petani dan bukan aparat desa/kelurahan (Kepala

Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Lurah) atau yang setingkat dengan jabatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu Juknis Pedoman PUAP (2012), terdapat mekanisme pancairan dana PUAP sampai ke lembaga Gapoktan Sidorejo dan Gapoktan Gadingrejo melewati beberapa proses antara lain :

I. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

- a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping.
- b. Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.
- c. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir 2), dikirim bersama dokumen administrasi lainnya antara lain: (1) Berita Acara Pengukuhan Gapoktan, (2) Nomor Rekening Gapoktan, (3) Perjanjian Kerjasama, dan (4) Surat Perintah Kerja, ke Tim Pembina Propinsi untuk diajukan kepada Departemen Pertanian C.q Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
- d. RUB dan dokumen administrasi lainnya yang diterima Departemen Pertanian selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh Tim PUAP Pusat c.q Pokja Penyaluran Dana.

II. Prosedur Penyaluran BLM-PUAP

- a. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6000,- kepada Gapoktan.
- b. Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening Gapoktan.
- c. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan surat Perintah Membayar (SPM-LS) dengan lampiran:
 - i. Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan.
 - ii. Berita Acara Pengukuhan Gapoktan oleh Bupati /Walikota.
 - iii. Rekapitulasi RUB dengan mencantumkan:
 1. Nama dan Alamat lengkap Gapoktan yang menjadi sasaran PUAP

2. Nomor rekening Gapoktan
 3. Nama dan alamat kantor cabang bank tempat Gapoktan membuka rekening.
 4. Rincian penggunaan dana BLM PUAP menurut usaha produktif.
- iv. Kuitansi harus ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
- d. Penyaluran dana BLM dari KPPN ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.

4.5.5 Perkembangan Gapoktan Mulyo Abadi

Perkembangan Gapoktan Mulyo Abadi terlihat setelah adanya dana PUAP karena memang Gapoktan ini berdiri atas syarat atau kebijakan yang diajukan oleh Dinas Pertanian agar suatu desa mendapatkan dana PUAP. Maka saat ini Gapoktan Mulyo Abadi mengalami kenaikan jumlah anggota karena Gapoktan Mulyo Abadi ini memiliki peraturan yaitu petani yang berhak merasakan adanya dana PUAP adalah petani yang terdaftar menjadi anggota Gapoktan. Pada awal berdirinya Gapoktan masih belum dapat terlihat keberadaannya, namun setelah dana PUAP dikelola dan terdapatnya visi misi serta program kerja Gapoktan maka Gapoktan kini mengalami kemajuan dapat terlihat dari jumlah anggota yang meningkat yang tidak hanya berasal dari petani namun juga berasal dari para pengusaha mikro. Kemajuan lainnya adalah dana PUAP yang dikelola tidak hanya bergulir namun juga dapat berkembang terlihat dari terdapatnya inventaris Gapoktan dan pada saat pertemuan dapat memberikan fasilitas kepada anggota berupa makanan, minuman maupun kaos serta sound yang digunakan saat pertemuan berasal dari dana PUAP yang berkembang dan masih banyak lagi tidak lain untuk kepentingan kemajuan Gapoktan.

Harapan pemerintah dengan adanya Gapoktan yang mengelola dana PUAP, Gapoktan dapat dijadikan LKM yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang dapat bertindak sebagai penyedia modal bagi petani, dan Gapoktan Mulyo Abadi dapat menjalankan fungsi tersebut dengan melihat para petani yang membutuhkan

keperluan untuk petaninya dan pinjaman modal untuk usahanya memanfaatkan fungsi Gapoktan sebagai penyedia modal.

4.5.6 Perkembangan Gapoktan Karya Tani

Perkembangan Gapoktan Karya Tani terlihat setelah adanya dana PUAP karena memang Gapoktan ini melakukan perombakan yang dinamakan benah Gapoktan dikarenakan atas syarat atau kebijakan yang diajukan oleh Dinas Pertanian agar suatu desa mendapatkan dana PUAP. Maka saat ini Gapoktan Karya Tani mengalami kenaikan jumlah Kelompok Tani beserta anggotanya karena Gapoktan Karya Tani ini memiliki peraturan yaitu petani yang berhak merasakan adanya dana PUAP adalah petani yang terdaftar menjadi anggota Kelompok Tani, karena menjadi anggota Kelompok Tani sudah pasti menjadi anggota Gapoktan. Pada awal berdirinya Gapoktan masih belum dapat terlihat keberadaannya, namun setelah dana PUAP dikelola dan disalurkan ke Kelompok Tani untuk digulirkan ke anggota dalam bentuk pinjaman maka Gapoktan kini mengalami kemajuan dapat terlihat dari jumlah anggota yang meningkat yang tidak hanya berasal dari petani namun juga berasal dari para pengusaha mikro terbukti dengan berdirinya Kelompok Tani Sumber Rejeki. Saat ini yang dapat dilihat dari kemajuan Gapoktan Karya Tani hanya itu saja untuk masalah berkembangnya dalam bentuk riil masih belum terlihat terbukti belum adanya suatu bentuk inventaris yang berasal dari perkembangan dana PUAP, meskipun dalam hal administrasinya dana itu berkembang lebih dari Rp 100.000.000.

Harapan pemerintah dengan adanya Gapoktan yang mengelola dana PUAP, Gapoktan dapat dijadikan LKM yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang dapat bertindak sebagai penyedia modal bagi petani, dan Gapoktan Karya Tani hampir dapat menjalankan fungsi tersebut dengan bertindak sebagai pengelola kemudian disalurkan ke Kelompok Tani dan dari Kelompok Tani digulirkan ke anggota, hal tersebut sesuai dengan prinsip pelaksanaan pihak Dinas Pertanian.

4.5.7 Keanggotaan Gapoktan

Keanggotaan Gapoktan di dua desa penelitian memiliki latar belakang yang dapat dikatakan sama. Status pekerjaan sebagai petani mendominasi di dalam tubuh Gapoktan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data pada monografi desa dimana rata-rata di tiga desa yang diteliti mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Perkembangan jumlah kelompok tani maupun anggotanya yang tergabung dalam Gapoktan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Menurut data yang diperoleh pada Gapoktan di dua desa penelitian, jumlah kelompok tani sebelum adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gapoktan Mulyo Abadi dulunya belum terbentuk pada tahun 2008 karena adanya PUAP maka terbentuk dengan anggota yang hanya enam orang. Pada Gapoktan Karya Tani terdapat dua kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 87 orang. Kemudian dengan adanya program pemerintah berupa PUAP dapat dilihat terjadi perubahan jumlah kelompok tani maupun anggota kelompok taninya. Pada Tabel 5.1. Persentase perubahan jumlah anggota Gapoktan di dua desa yakni Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani dan Anggotanya Sebelum dan Sesudah Adanya Program BLM-PUAP

| Gapoktan | Sebelum PUAP | | Sesudah PUAP | | Perubahan Anggota (%) |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | Poktan | Anggota (Orang) | Poktan | Anggota (Orang) | |
| Mulyo Abadi | - | 6 | 6 | 423 | 98 |
| Karya Tani | 2 | 87 | 9 | 1569 | 94 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Hasil temuan di lapang, pada Gapoktan Karya Tani terbentuk suatu kelompok yang bernama Sri Rejeki. Kelompok ini anggotanya terdiri dari wanita yang berprofesi sebagai pengusaha mikro, yang sebagian besar menjadi pedagang sayur atau orang sana menyebutnya “Mlijo”. Kelompok ini terbentuk memang di khususkan untuk para pengusaha mikro yang tidak mempunyai luas lahan garapan atau tidak berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing ADRT (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) Gapoktan di dua desa dapat dijelaskan mengenai

syarat-syarat keanggotaan untuk diterima menjadi bagian dari Gapoktan. Adapun syarat-syarat keanggotaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota adalah sebagai berikut:

1. Kelompok tani diterima menjadi anggota apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:
 - a. Kelompok tani yang berada dalam wilayah desa dimana Gapoktan tersebut berada.
 - b. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.
 - c. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program umum dan peraturan-peraturan.
 - d. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.
2. Seseorang dapat diterima menjadi anggota apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani yang berada dalam wilayah binaan Gapoktan.
 - b. Telah berumur 17 tahun atau telah menikah.
 - c. Bermoral Pancasila.
 - d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program umum dan peraturan-peraturan.
 - e. Mengajukan permohonan kepada pengurus dengan mengisi biodata calon anggota meliputi: nama calon, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan sebagainya.
 - f. Membayar uang simpanan pokok sebesar Rp 25.000 pada Gapoktan Mulyo Abadi, sedangkan pada Gapoktan Karya Tani tidak terdapat aturan untuk membayar uang simpanan pokok. Uang tersebut hanya dibayar satu kali selama menjadi anggota Gapoktan. Membayar iuran wajib sebesar Rp 1.000 setiap bulannya pada Gapoktan Mulyo Abadi, sedangkan pada Gapoktan Karya Tani tidak terdapat aturan untuk mewajibkan membayar iuran setiap bulannya. Sedangkan iuran sukarela tergantung kemampuan anggota. Setelah dinyatakan secara resmi bergabung menjadi anggota Gapoktan maka setiap anggota Gapoktan memiliki hak yang sama dalam

memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pengurus Gapoktan. Salah satunya adalah hak dalam kegiatan simpan pinjam. Selain itu anggota juga memiliki kekuasaan penuh dalam musyawarah tahunan sehingga anggota diharapkan hadir dalam kegiatan tersebut.

4.5.8 Pembinaan Gapoktan Mulyo Abadi

PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gapoktan di perdesaan. Pada Gapoktan Mulyo Abadi dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani sehingga memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Dalam pelaksanaan program PUAP di Desa Sidorejo Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan dana PUAP sesuai dengan RUB (Rencana Usaha Bersama) sehingga menjadi dasar pembinaan terhadap Gapoktan PUAP.

Pembinaan kepada Gapoktan Mulyo Abadi dilakukan satu bulan satu kali dengan mengacu pada peningkatan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui Unit Usaha Otonom atau Lembaga Keuangan Mikro. Dengan hal tersebut, diharapkan Gapoktan PUAP dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP. Pembinaan Gapoktan Mulyo Abadi dilakukan melalui proses pembinaan yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pembinaan tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Gapoktan yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembinaan Gapoktan adalah:

1. Unsur-unsur pembinaan harus mempunyai hubungan dengan kinerja Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP.
2. Adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Gapoktan.
3. Sistem pembinaan yang mudah dipahami dan dimengerti.

Pembinaan terhadap Gapoktan PUAP Mulyo Abadi dilakukan berdasarkan aspek aspek administrasi dan pengelolaan dana di Gapoktan. Pada aspek administrasi meliputi:

1. Identitas Gapoktan
2. Proposal rencana usaha kelompok Gapoktan
3. Identitas Pengurus (Ketua, Sekretaris dan bendahara) yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2 (dua) buah
4. Rekomendasi tertulis dari Dinas Pertanian Kabupaten/ Tim Teknis PUAP Kabupaten dan Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP
5. Fotokopi Berita Acara Pendirian Gapoktan;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
7. Fotokopi Buku Tabungan Gapoktan yang tertera aliran dana BLM PUAP; dan
8. Foto Kantor/ Sekretariat Gapoktan/ tempat usaha yang tertera papan nama/ plang Gapoktan;

Pada aspek pengelolaan Gapoktan meliputi:

1. Pertemuan/ rapat anggota/ rapat pengurus (secara tertulis);
2. Rencana Kerja Gapoktan (secara tertulis), aturan/ norma tertulis;
3. Adanya pencatatan/ pengadministrasian setiap anggota organisasi
4. Memiliki struktur organisasi; dan
5. Memiliki AD/ ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota.

Metode Pembinaan yang dilakukan kepada Gapoktan Mulyo Abadi yaitu dengan:

1. Pemeriksaan Administrasi, pemeriksaan administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi di Gapoktan mengenai PUAP.
2. Pembinaan Kinerja Gapoktan yang aspek pengelolaan dana PUAP dan aspek pengembangan usaha agribisnis.
3. Observasi lapangan. Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja dan usahatani Gapoktan PUAP.

4.5.9 Pembinaan Gapoktan Karya Tani

PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gapoktan di perdesaan. Pada Gapoktan Karya Tani dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan dengan melalui Kelompok Tani untuk digulirkan ke anggota. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani sehingga memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Dalam pelaksanaan program PUAP di Desa Gadingrejo Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan dana PUAP sesuai dengan RUB (Rencana Usaha Bersama) sehingga menjadi dasar pembinaan terhadap Gapoktan PUAP.

Pembinaan kepada Gapoktan Karya Tani dilakukan satu bulan satu kali setiap tanggal 25, dengan mengacu pada peningkatan kinerja para pengurus Gapoktan dan dengan harapan Gapoktan lebih memperhatikan dana yang dikelola oleh kelompok tani karna dana sebelum dipinjamkan ke anggota disalurkan dahulu ke kelompok tani agar tepat sasaran untuk diberikan ke anggota yang membutuhkan. Dengan hal tersebut, diharapkan Gapoktan PUAP dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP. Pembinaan Gapoktan Karya Tani dilakukan melalui proses pembinaan yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pembinaan tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Gapoktan yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembinaan Gapoktan adalah:

1. Unsur-unsur pembinaan harus mempunyai hubungan dengan kinerja Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP
2. Adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Gapoktan
3. Sistem pembinaan yang mudah dipahami dan dimengerti.

Pembinaan terhadap Gapoktan PUAP Karya Tani dilakukan berdasarkan aspek aspek administrasi dan pengelolaan dana di Gapoktan. Pada aspek administrasi meliputi:

1. Identitas Gapoktan
2. Proposal rencana usaha kelompok Gapoktan
3. Identitas Pengurus (Ketua, Sekretaris dan bendahara) yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
4. Rekomendasi tertulis dari Dinas Pertanian Kabupaten/Tim Teknis PUAP Kabupaten dan Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP
5. Fotokopi Berita Acara Pendirian Gapoktan
6. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
7. Fotokopi Buku Tabungan Gapoktan yang tertera aliran dana BLM PUAP
8. Foto Kantor/Sekretariat Gapoktan/tempat usaha yang tertera papan nama/ plang Gapoktan;

Pada aspek pengelolaan Gapoktan meliputi:

1. Pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus (secara tertulis)
2. Rencana Kerja Gapoktan (secara tertulis), aturan/ norma tertulis
3. Adanya pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi
4. Memiliki struktur organisasi
5. Memiliki AD/ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota.

Metode Pembinaan yang dilakukan kepada Gapoktan Karya Tani yaitu dengan:

1. Pemeriksaan Administrasi, pemeriksaan administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi di Gapoktan mengenai PUAP.
2. Pembinaan Kinerja Gapoktan yang aspek pengelolaan dana PUAP dan aspek pengembangan usaha agribisnis.
3. Observasi lapangan. Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja dan usahatani Gapoktan PUAP.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

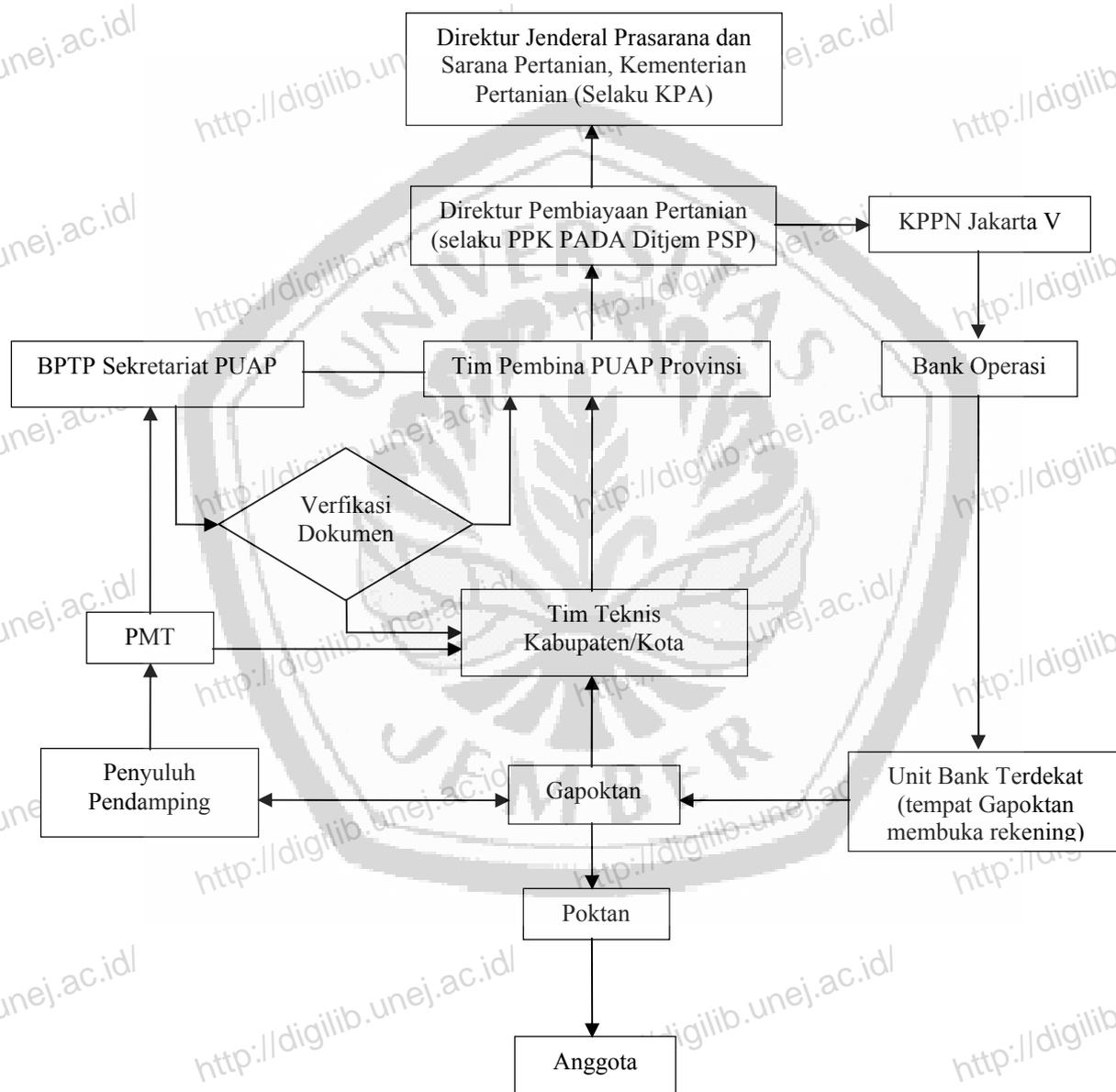
Pengelolaan dana PUAP dilakukan oleh Gapoktan, yaitu peran aktif para pengurus Gapoktan dalam keorganisasian. Gapoktan merupakan Gabungan Kelompok Tani yang berfungsi sebagai wadah poktan-poktan dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, adanya Gapoktan sangat diperlukan karena sebagai pemersatu poktan-poktan yang diharapkan Gapoktan sebagai penyalur bantuan kepada petani sehingga program pemerintah dapat tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan, ditunjang dengan adanya PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) sebagai pendamping para petani dan sebagai pengontrol semua program pemerintah yang diberikan kepada suatu Desa.

Keberadaan program PUAP berpotensi terjadinya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yaitu terjadinya penyelewengan pengelolaan seperti yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan program PUAP. Penyelewengan yang terjadi pada sejumlah daerah yang menerima dana PUAP seperti dana tersebut oleh kepala Gapoktan dan pengurus Gapoktan tidak dibagikan kepada anggota, terdapat pula dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan agribisnis namun sekedar konsumtif, dan terdapat juga dana tersebut hanya dibagikan kepada kerabat saja. Hal tersebut terjadi tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh Gapoktan khususnya para pengurus Gapoktan yang memegang wewenang atas pengelolaan dana PUAP.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah berjalan dari tahun 2008 diharapkan Gapoktan akan menjadi sumber permodalan bagi petani dengan terbentuknya LKMA. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan yang dilakukan pada setiap daerah penerima PUAP berdasarkan LKMA dan hal tersebut terdapat pada Junis Deptan dengan terdapatnya manajemen pengelolaan dan penyaluran. Pada Kecamatan Umbulsari yaitu Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo yang merupakan sample daerah penelitian memiliki cara pengelolaan yang berbeda dilihat dari penyaluran kepada anggota dan manajemennya sehingga output yang dihasilkan dari program PUAP juga berbeda. Pada aspek penyaluran kepada anggota telah terdapat panduan yaitu tertulis pada Juknis Deptan.

Ketentuan mekanisme yang terdapat pada Juknis Deptan dapat dilihat dari mekanisme penyampaian dokumen dan mekanisme pencairan dana Gapoktan ke anggota sebagai berikut:

1) Mekanisme penyampaian dokumen, proses verifikasi dokumen dan penyaluran dana BLM-PUAP:



Gambar 5.1. Mekanisme Penyaluran Dana BLM-PUAP (Sumber: Juknis PUAP, 2011)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembiayaan Pertanian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan proses penyaluran dana BLM-PUAP kepada Gapoktan yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan. Penyaluran Dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan, melalui tahapan :

1. Gapoktan membuat usulan RUB dan dokumen pendukung yang kemudian diserahkan ke Penyuluh Pendamping.
2. Penyuluh pendamping membantu Gapoktan menyerahkan ke PMT yang kemudian dokumen disahkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota sebelum diserahkan ke BPTP Sekretariat PUAP.
3. BPTP Sekretariat PUAP memverifikasi dokumen, jika disetujui maka disalurkan ke Tim Pembina Provinsi, jika tidak disetujui maka disalurkan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan menyertakan usulan RUB dan dokumen pendukung yang kemudian diserahkan ke Tim Pembina Provinsi.
4. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BLM-PUAP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Desa, Gapoktan dan Pengurus Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP.
 - c. Rekapitulasi pembayaran kepada Gapoktan penerima dana BLM-PUAP ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk selanjutnya diterbitkan dokumen SPM-LS oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk diajukan kepada KPPN Jakarta V.
5. KPPN Jakarta V menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Operasi.
6. Bank Operasi mentransfer dana PUAP ke rekening Unit Bank Terdekat tempat Gapoktan membuka rekening.

7. Gapoktan mencairkan dana tersebut dengan mendatangi bank terdekat yang diwakili oleh ketua Gapoktan dan bendahara dengan didampingi oleh PPL.
8. Dana yang terdapat pada Gapoktan kemudian dikelola dan disalurkan ke Poktan dengan besar dana sesuai kebijakan pengurus Gapoktan, namun pada Gapoktan Mulyo Abadi dana tersebut langsung disalurkan ke anggota.
9. Masing-masing Poktan mengelola dana yang kemudian disalurkan ke anggota berupa pinjaman, pada Gapoktan Karya Tani dana yang dibagikan ke anggota mengedepankan hubungan kekerabatan dalam perolehan pinjaman.

Proses penyaluran dana dari tahap PMT sampai tahap dana tersebut ditransfer ke bank unit terdekat tempat Gapoktan membuka rekening tidak terdapat masalah karena peneliti tidak melakukan riset hingga tingkat pemerintahan. Peneliti melakukan riset penyaluran pada lingkup Gapoktan sampai ke anggota. Terdapat penyimpangan tidak sesuai dengan harapan pada Gapoktan Mulyo Abadi yaitu penyaluran langsung ke anggota sedangkan pada Gapoktan Karya Tani penyaluran dari Poktan ke anggota sesuai pada Juknis Deptan maka dari itu terdapat perbedaan pengelolaan dalam hal penyaluran dan manajemen serta output dari program PUAP, maka peneliti mendeskriptifkan keadaan tersebut.

2) Mekanisme Pencairan Dana Gapoktan ke Anggota

Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan. Prosedur penarikan dana BLM-PUAP dari Gapoktan kepada Kelompok Tani dan petani anggota serta pemanfaatannya sebagai berikut.

Berdasarkan Juknis Deptan (2012), Prosedur Penarikan/Pencairan Dana BLM-PUAP sampai ke anggota terdapat beberapa tahap, antara lain:

1. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui Poktan bahwa dana BLM-PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan.
2. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

3. Pengurus Poktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA).
4. Penarikan/Pencairan dana BLM PUAP dari Kantor Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan secara *bertahap* sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada Rapat Anggota;
5. Formulir penarikan dana BLM-PUAP harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Gapoktan serta dilaporkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota.
6. Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK).
7. Dana BLM-PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA)

Pada Juknis Deptan (2012), penyaluran serta pergulirannya harus melewati Poktan sebelum ke anggota, karna Poktan yang mengkoordinir dan lebih mengetahui sasaran anggota penerima pinjaman yang berasal dari BLMPUAP. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas Poktan yang susunan keanggotaan kelompok tani terdiri atas pengurus dan anggota. Pengurus terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pengurus kelompok tani mempunyai tugas antara lain:

1. Menyelenggarakan musyawarah/rapat anggota kelompok dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA);
2. Menyampaikan hasil keputusan musyawarah/rapat anggota Gapoktan kepada anggota kelompok tani;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan usaha kelompok sesuai hasil keputusan musyawarah/rapat anggota Gapoktan; dan/atau
4. Mengkoordinasikan penyaluran dana BLM-PUAP yang diterima dari Gapoktan kepada anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA).

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menetapkan bahwa Gapoktan sebagai pelaksana PUAP, merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha dalam satu kawasan desa. Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

5.1 Pengelolaan Dana PUAP pada Program PUAP Di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo pada Gapoktan

Pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani mengenai proses penyalurannya yaitu pemberian dana PUAP kepada anggota berupa pinjaman memerlukan beberapa ketentuan yaitu anggota yang mendapatkan pinjaman merupakan anggota yang bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman, anggota yang mematuhi norma-norma atau aturan yang diterapkan oleh Gapoktan seperti pengembalian tepat waktu, aktif dalam kegiatan Gapoktan, melengkapi syarat-syarat peminjaman.

Adapun sistem pengelolaan berdasarkan LKMA menurut Juknis PUAP (2008) sebagai berikut:

- a. Agar anggota mempunyai rasa memiliki yang tinggi, anggota harus dimotivasi oleh pengurus gapoktan dan pengelola untuk mempunyai simpanan pokok.
- b. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, tidak ada paksaan dan dapat menerima warga masyarakat dilingkungan secara selektif tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosial.
- c. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota saja, tidak boleh kepada bukan anggota.
- d. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional, berorientasi pada bisnis dan sosial.
- e. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktivitas orang secara layak dan rasional.

- f. Saling percaya. Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain.
- g. Kepemimpinan demokratis ditandai oleh : (i) setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus diperhatikan oleh pengurus (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota didalam rapat anggota pendiri (iv) manajemen diselenggarakan secara terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi keuangan secara berkala.
- h. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan professional kepada para anggota, pertumbuhan dan pelestarian.
- i. Lembaga melakukan kegiatan untuk mendukung usaha para anggotanya sesuai RUA (Rancangan Usaha Anggota)
- j. Membangun jaringan kerjasama antar lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan.
- k. Penyaluran yang diberikan kepada anggota diikuti sesuai dengan Juknis Deptan.
- l. Gapoktan mengalami perkembangan.

5.1.1 Pengelolaan PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi

Berdasarkan sistem pengelolaan dana PUAP berdasarkan LKMA, maka pengelolaan yang dilakukan pada Gapoktan Mulyo Abadi dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut:

1. Agar anggota mempunyai rasa memiliki yang tinggi.

Pada Gapoktan Mulyo Abadi seorang Ketua Gapoktan bernama Margo Santoso yang paling berperan dalam menciptakan kekompakan antar anggota sehingga anggota mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Adapun cara yang dilakukan oleh Pak Margo sebagai ketua Gapoktan adalah dengan memberikan sesuatu pada anggota yaitu berupa “kaos, hem, topi untuk keperluan seragam secara gratis ada juga yang menjawab mendapatkan informasi yang penting dari

Gapoktan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut saat diadakannya pertemuan:



Gambar 5.2 Kaos seragam saat pertemuan Gapoktan

2. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.

Adanya program PUAP sejak tahun 2008 yang dikelola oleh Gapoktan Mulyo Abadi jumlah keanggotaan semakin bertambah setiap bulannya. Daftar tabel perkembangan jumlah anggota Gapoktan dapat dilihat pada tabel 4.9 pada Bab Gambaran Umum. Bertambahnya keanggotaan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak Gapoktan. Hal yang mendasari semakin bertambahnya keanggotaan adalah bahwa para petani membutuhkan pinjaman guna memenuhi permodalan usahanya dan Gapoktan menjadi penyedia modal sejak adanya program PUAP.

3. Layanan pinjaman hanya diberikan kepada anggota saja.

Pada Gapoktan Mulyo Abadi menerapkan aturan bahwa siapa saja yang akan meminjam modal pada Gapoktan diharuskan terlebih dahulu menjadi anggota. Adapun ketentuan menjadi anggota Gapoktan Mulyo Abadi adalah dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dan menabung Rp 1.000 setiap bulannya. Setelah terdaftar menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan maka anggota mendapatkan kartu anggota dan dapat melakukan peminjaman pada Gapoktan.

4. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional.

Pada Gapoktan Mulyo Abadi dalam hal manajemennya yaitu dalam hal pencatatan para peminjam, kas, dan keluar masuk uang diserahkan kepada seseorang yang dikenal dan diperkerjakan oleh Gapoktan untuk mencatat segala administrasi. Orang tersebut bernama Lilik, saudari Lilik menangani segala aktivitas uang masuk dan keluar serta administrasi yang terdapat pada Gapoktan, hal tersebut dikarenakan para pengurus Gapoktan tidak aktif dalam kepengurusan untuk menangani program PUAP dikarenakan kesibukan, sehingga Pak Margo selaku Ketua Gapoktan mengambil solusi agar program PUAP dapat berjalan dengan baik yaitu dengan memperkerjakan seseorang untuk menangani peminjaman terkait program PUAP.

5. Manajemen diselenggarakan secara terbuka.

a. Transparansi

Manajemen pengelolaan yang dilakukan pada Gapoktan Mulyo Abadi secara transparan, hal tersebut dibuktikan dari gambar buku tabungan dan bukti perkembangan secara administrasi yang ditunjukkan kepada peneliti (terlampir). Perkembangan dana PUAP dapat dilihat dari pernyataan ketua Gapoktan (Margo Santoso) yang mengatakan:

“Modal pokok dapat berkembang yang awalnya 100.000.000,- jadi sekarang sekitar 150an jutaan, jadi dalam bentuk di inventarisikan dan buat kebutuhan kelompok dalam bentuk kaos seragam”.

Didukung dengan pernyataan PPL (Dwi) di Desa Sidorejo yang mengatakan:

“Yang dulu awalnya Rp 100.000.000,-, kalau di hitung dananya saat ini menjadi Rp 150an jutaan lebih, jadi dana yang berkembang itu bisa digunakan untuk inventaris untuk kepentingan Gapoktan, hasil dari adanya tambahan bunga 2,5% dari pinjaman”

b. Laporan Penyaluran

Hasil dari pengamatan, pada Gapoktan Mulyo Abadi terdapat Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Poktan, kas masuk pinjaman, buku pinjaman tabungan, kas keseluruhan yang ditulis harian dan bulanan, RUB (Rancangan Usaha Bersama), RUK (Rancangan Usaha Kelompok), RUK-K (Rancangan Usaha Kelompok Kecil) dan RUA (Rancangan Usaha Anggota).

Bukti transparansi yang dimiliki Gapoktan Mulyo Abadi dapat dikatakan lengkap dan tertib. Segala pencatatan harian dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kelompok, peminjaman, bantuan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Gapoktan dicatat dalam buku yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tempatnya, sehingga manajemen pengelolaan yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dapat dikatakan baik.

6. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin perolehan pendapatan.

Manfaat adanya program PUAP dengan adanya penyedia modal diharapkan segala kebutuhan petani dalam penyediaan saprodi dapat terpenuhi sehingga dapat menyejahterakan petani dengan indikator yang biasa digunakan adalah meningkatnya pendapatan dan perkembangan usaha. Pada Gapoktan Mulyo Abadi secara garis besar dapat dikatakan adanya program PUAP berdampak positif terhadap perkembangan usaha para anggota. Berikut data informan mengenai manfaat dana PUAP dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Manfaat Dana PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi Tahun 2012

| No | Sampel anggota Gapoktan Mulyo Abadi | Pendapatan | | Perkembangan Usaha | |
|------------|---|------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | Meningkat | Tidak Meningkat | Berkembang | Tidak Berkembang |
| 1 | Margo Santoso | V | | V | |
| 2 | Menik | V | | V | |
| 3 | Lilik Lestari | V | | V | |
| 4 | Agus W | V | | V | |
| 5 | Rohman Saleh | V | | | V |
| 6 | Jamari | | V | | V |
| 7 | Anggie Putra | V | | V | |
| 8 | Suci Kristianti | V | | V | |
| 9 | Rohiem | V | | | V |
| 10 | Fajar Adi | V | | V | |
| Jumlah | | 10 | 1 | 7 | 3 |
| Presentase | | 100% | 10% | 70% | 30% |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa dari 10 orang informan, sebanyak 90% diantaranya menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat. Dan selebihnya 10% menyatakan pendapatannya tetap. Namun ternyata, meningkatnya pendapatan informan ini bukan disebabkan oleh meningkatnya produksi pertanian, tetapi karena meningkatnya harga jual hasil panen. Tidak meningkatnya

produksi pertanian disebabkan karena petani menggunakan jumlah dan kualitas sarana produksi yang sama sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dana bergulir PUAP.

Dari Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa dari 10 orang informan, 70 % yang menyatakan bahwa usaha mereka berkembang dan 30% usahanya tidak berkembang, disebabkan karena sebagian besar dana bergulir tersebut dipergunakan untuk usaha tanaman pangan dengan luas lahan yang terbatas. Sedangkan usaha yang berkembang sebagian bukan usaha agribisnis.

7. Lembaga melakukan kegiatan untuk mendukung usaha para anggotanya sesuai RUA.

Pada penggunaan dana PUAP seharusnya sesuai dengan RUA (Rancangan Usaha Anggota) hal ini dikarenakan agar dana PUAP tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatannya. Pada Gapoktan Mulyo Abadi sebagian besar sesuai dengan RUA yaitu untuk kegiatan usaha tani dan terdapat juga yang tidak sesuai dengan RUA namun dari 10 informan hanya terdapat 1 informan saja, sehingga dapat dikatakan hal ini tidak terlalu berdampak pada yang lain. Berikut adalah data responden yang menggunakan dana PUAP sesuai RUA dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Informan Yang Menggunakan Dana PUAP Sesuai RUA (Rencana Usaha Anggota) pada Gapoktan Mulyo Abadi Tahun 2012

| No | Sampel anggota Gapoktan Mulyo Abadi | Penggunaan Dana | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Sesuai RUA | Tidak Sesuai RUA |
| 1 | Margo Santoso | V | |
| 2 | Menik | | V |
| 3 | Lilik Lestari | V | |
| 4 | Agus W | V | |
| 5 | Rohman Saleh | V | |
| 6 | Jamari | V | |
| 7 | Anggie Putra | V | |
| 8 | Suci Kristianti | V | |
| 9 | Rohiem | V | |
| 10 | Fajar Adi | V | |
| Jumlah | | 9 | 1 |
| Presentase | | 90% | 10% |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa dari 10 orang informan, sebanyak 90% penggunaan dana tersebut sesuai RUA (Rencana Usaha Anggota) dan hanya 10% yang tidak sesuai RUA. Hanya 10% atau 1 (satu) orang diantaranya yang menggunakan tidak sesuai dengan RUA. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan juga tidak ada *monitoring* oleh penyuluh pendamping, sehingga dana tersebut dipergunakan untuk keperluan lain contohnya seperti untuk membeli *rice cooker* dan sepeda cucu. Namun hal tersebut tidak membawa pengaruh besar terhadap keberlanjutan pelaksanaan PUAP kedepannya.

8. Penyaluran yang diberikan kepada anggota diikuti sesuai dengan Juknis Deptan.

Pelaksanaan penyaluran dana PUAP yang pemanfaatannya sebagian besar untuk kegiatan simpan pinjam. Adapun perguliran dan penyalurannya PUAP pada tiap Gapoktan berbeda pelaksanaannya. Pada Gapoktan Mulyo Abadi sebagian besar informan menjawab “Dari Gapoktan langsung ke anggota tanpa melalui Poktan, setelah setiap anggota mendapatkan pinjaman dan dikembalikan maka pinjaman diberikan bergilir pada anggota lain yang membutuhkan”. Merujuk pada Juknis Deptan Pelaksanaan Program PUAP menjelaskan bahwa alur perguliran dana PUAP adalah berawal dari Gapoktan kemudian disalurkan ke Poktan yang selanjutnya disalurkan pada petani peminjam.

Pada Gapoktan Mulyo Abadi sampainya dana kepada peminjam dibantu oleh seorang pegawai yang dipekerjakan untuk menangani aktivitas simpan pinjam bernama Lilik Lestari. Peminjam menerima langsung dari saudari Lilik. Pak Margo selaku ketua Gapoktan hanya bertindak sebagai pengawas saja, namun pengelolaan secara manajemen administrasi, saudari Lilik diberikan kewenangan penuh untuk mengelolanya.

9. Gapoktan mengalami perkembangan.

Hasil dari manajemen yang baik dan penyaluran kepada anggota dengan memahami program secara jelas sehingga penggunaan dana tepat sasaran maka Mulyo Abadi mengalami perkembangan dari adanya program PUAP. Hal itu dapat dilihat dari jumlah dana PUAP yang berkembang. dapat dilihat dari bukti

yang nyata yaitu secara administrasi dana PUAP yang awalnya Rp 100.000.000 sekarang menjadi lebih dari Rp 100.000.000.

Dana pada Gapoktan Mulyo Abadi saat ini telah berkembang data bulan terakhir pelaporan yaitu bulan 31 Oktober 2012 mencapai Rp 156.344.300 (terlampir) data diambil pada tanggal 5 November 2012, hal ini dikarenakan juga pinjaman tersebut dikenakan adanya bunga 2,5% jadi saat pengembalian pinjaman pokok+bunga 2,5%.

Berkembangnya dana pada Gapoktan Mulyo Abadi diwujudkan dalam bentuk inventaris pada kantor Gapoktan, inventaris tersebut berupa meja, kursi, sound system, taplak meja, bangku, computer, etalase, kamera digital, dan buku-buku pencatatan sehingga kantor Gapoktan dapat menjadi tempat yang benar-benar sesuai fungsinya. Inventaris di kantor Gapoktan Mulyo Abadi Hal dapat dilihat pada gambar 5.3 sebagai berikut:



Gambar 5.3 Inventaris di Kantor Gapoktan Mulyo Abadi

Semua perkembangan yang terjadi pada Gapoktan Mulyo Abadi tidak lepas dari peran Ketua Gapoktan yaitu Pak Margo yang menciptakan adanya suatu sinergi atau keterkaitan, antara Dana PUAP yang dikelola dan bisnis yang dijalankan oleh Pak Margo. Adapun bisnis yang dijalankan oleh Pak Margo terdapat beberapa macam, contohnya bisnis sebagai penyedia pupuk, obat-obatan dan sarana produksi lainnya serta warung yang di punyai Pak Margo yang

menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kesirnegisan tersebut dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara dengan Pak Margo berikut ini:

“Saya menciptakan adanya keterkaitan antara dana PUAP yang dipinjamkan guna memenuhi kebutuhan petani dengan usaha yang saya jalankan. Contohnya terkait dengan saya sebagai penyedia saprodi, para petani pasti membutuhkan saprodi untuk usaha taninya, mereka meminjam uang ke Gapoktan untuk membeli saprodi, dan beli saprodinya pasti tidak jauh-jauh, ya ke saya belinya atau pinjamnya dalam bentuk saprodi dan pada saat pengembaliannya seharga saprodi tersebut dan barangnya ya barang saya yang dipakai. Kemudian apabila para pengusaha mikro yang jualan pecel atau buka warung makan lainnya, kalau mau minjam uang untuk modal usahanya ke Gapoktan terus beli beras atau kebutuhan lainnya pasti juga gak jauh-jauh ya di warung saya, atau mau minjam dalam bentuk barang juga ngambilnya dari warung saya, jadi perputaran uangnya ya gak jauh-jauh tetep di Gapoktan ini, sehingga lebih gampang mengontrol dan mengaturnya”.

Dalam proses ekonomi tersebut perlu adanya dukungan secara finansial yang diwujudkan dengan ketersediaan fasilitas. Pada fasilitas di Gapoktan antara Gapoktan Mulyo Abadi yaitu pada Gapoktan Mulyo Abadi sebanyak 80% menjawab terdapat “fasilitas yaitu simpan pinjam berupa uang dan saprodi, 20% menjawab adanya tempat penyimpanan saprodi terdapat juga pusat berjalannya kegiatan simpan pinjam berupa kantor Gapoktan”. Hal ini dapat dilihat secara fisik keadaan kantor Gapoktan Mulyo Abadi terlihat begitu tertata dan memanfaatkan kesekretariatan Gapoktan sebaik mungkin sesuai fungsinya.



Gambar 5.4 Kondisi Kantor Gapoktan Mulyo Abadi

5.1.2 Pengelolaan PUAP pada Gapoktan Karya Tani

Berdasarkan sistem pengelolaan dana PUAP berdasarkan LKMA, maka pengelolaan yang dilakukan pada Gapoktan Karya Tani dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut:

1. Agar anggota mempunyai rasa memiliki yang tinggi.

Pada Gapoktan Karya Tani seorang Ketua Gapoktan bernama Badjuri memiliki cara dalam menciptakan kekompakan antar anggota sehingga anggota mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Adapun cara yang dilakukan oleh Pak Badjuri sebagai ketua Gapoktan adalah dengan memberikan sesuatu pada anggota yaitu berupa bingkisan di saat Ramadhan untuk Lebaran.

2. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.

Adanya program PUAP sejak tahun 2008 yang dikelola oleh Gapoktan Karya Tani jumlah keanggotaan semakin bertambah setiap bulannya. Daftar tabel perkembangan jumlah anggota Gapoktan dapat dilihat pada tabel 4.9 pada Bab Gambaran Umum. Bertambahnya keanggotaan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak Gapoktan. Hal yang mendasari semakin bertambahnya keanggotaan adalah bahwa para petani membutuhkan pinjaman guna memenuhi permodalan usahanya dan Gapoktan menjadi penyedia modal sejak adanya program PUAP. Hal yang paling menonjol pada Gapoktan Karya Tani mengenai keanggotaan adalah terdapatnya kelompok mikro yang terbentuk yang terdiri dari para ibu-ibu.

3. Layanan pinjaman hanya diberikan kepada anggota saja.

Pada Gapoktan Karya Tani menerapkan aturan bahwa siapa saja yang akan meminjam modal pada Gapoktan diharuskan terlebih dahulu menjadi anggota Poktan. Gapoktan merupakan gabungan dari beberapa Poktan maka yang tergabung dalam keanggotaan Poktan secara otomatis tergabung dalam keanggotaan Gapoktan. Setelah terdaftar menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan maka anggota mendapatkan kartu anggota dan dapat melakukan peminjaman pada Poktan sebab pada Gapoktan Karya Tani dana diberikan ke Poktan yang kemudian anggota meminjam pada Poktan.

4. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional.

Pada Gapoktan Karya Tani dalam hal memberikan pelayanan terhadap peminjam dapat dikatakan kurang bermutu dan profesional. Hal tersebut dapat dilihat dari pencatatan laporan administrasi keuangan yang tidak tertib dan pemberian dana yang kurang dapat bergulir disebabkan dana macet.

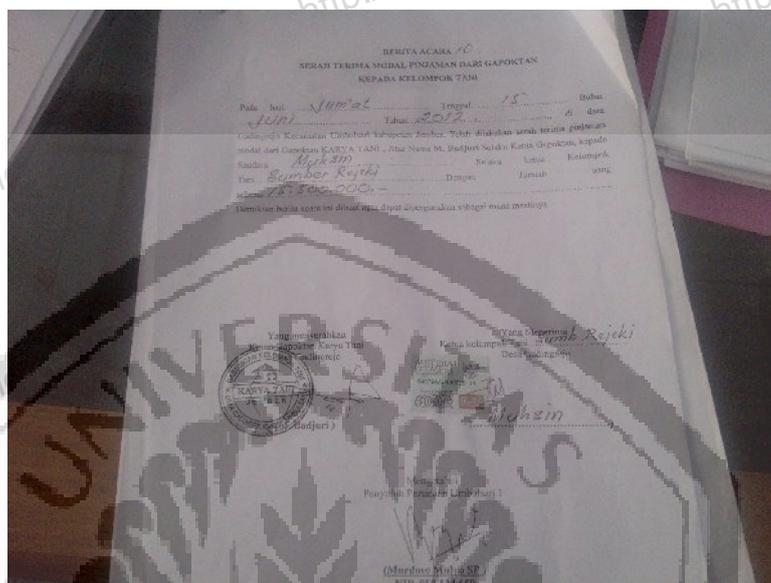
5. Manajemen diselenggarakan secara terbuka.

a. Transparansi

Pada Gapoktan Karya Tani manajemen pengelolaan dilakukan oleh para pengurus Gapoktan. Pengelolaan yang dilakukan yaitu dengan saling membagi tugas dalam hal pencatatan yaitu ditangani langsung oleh Ketua Gapoktan bersama dengan bendahara dan sekretaris, karena Ketua Gapoktan merupakan seorang tokoh masyarakat di Desa Gadingrejo yang dihormati sehingga para anggota mempercayakan penuh pada Ketua Gapoktan dalam hal pembagian keuangan dana PUAP kepada setiap Kelompok Tani yang kemudian disalurkan kepada anggota dan para anggota tidak menanyakan transparansi dari dana tersebut.

Pada Gapoktan Karya Tani yang mengatakan dana cair ke rekening Gapoktan sebesar Rp 100.000.000 tidak dapat dibuktikan dengan tidak dapat menunjukkan buku rekening kepada peneliti, hal ini dapat dikatakan kurangnya transparansi. Ketidak transparansi tersebut dapat dibuktikan juga dengan tidak adanya bukti perkembangan dana PUAP secara tertulis apakah dana tersebut saat ini lebih dari dana awal yaitu Rp 100.000.000. Seharusnya dana pada Gapoktan Karya Tani dapat berkembang sebab setiap peminjaman dikenakan bunga 1,5% dari peminjaman, namun setidaknya jumlah dana dapat berkembang namun pada kenyataannya tidak. Hal ini dikarenakan dana yang dipinjamkan macet, dari kesembilan Poktan yang terdapat pada Karya Tani terdapat delapan kelompok yang macet, hanya satu Poktan yaitu kelompok Mikro yang lancar dalam pengembaliannya dan pergulirannya.

Kelompok Mikro merupakan salah satu kelompok yang lancar dalam pengembaliannya sehingga hanya kelompok inilah yang dicatat dalam perguliran peminjamannya terbukti dari berita acara yang dibuat terakhir pada tahun 2012, dapat dilihat pada gambar 5.5.



Gambar 5.5 Berita Acara Penyaluran Dana PUAP pada Kelompok Mikro

c. Laporan Penyaluran

Keadaan demikian membuat tanggung jawab pengurus dalam hal pencatatan yang pada awalnya rapi dan teratur saat ini banyak diabaikan yaitu keluar masuknya uang setiap bulannya tidak dicatat dan terkadang dirapel perperiode yaitu satu tahun sekali. Hal tersebut yang menyebabkan dana pada Gapoktan Karya Tani tidak berkembang dan hubungan antar anggota dan pengurus menjadi tidak baik, keadaan demikian dapat diatasi hanya dengan mematuhi norma-norma yang ada yaitu dengan berusaha bertanggung jawab agar kepercayaan dan hubungan tetap terjaga dan pencatatan yang transparansi sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai Juknis PUAP.

Pencatatan keluar masuknya uang pada kelompok mikro ini dilakukan langsung oleh ketua Gapoktan yaitu Pak Badjuri, sedangkan kelompok lain yang melakukan peminjaman namun macet sudah tidak dipedulikan lagi oleh ketua Gapoktan dan tidak ada usaha yang keras dari ketua Gapoktan ataupun pengurus lain agar pinjaman yang macet tersebut bisa kembali. Adanya hal tersebut maka

Gapoktan Karya Tani tidak memiliki buku kas harian, catatan harian, atau bentuk administrasi lain guna mentertibkan pencatatan sehingga manajemen pengelolaan terhadap laporan penyaluran pada Gapoktan Karya Tani dapat dikatakan kurang baik.

6. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin perolehan pendapatan.

Manfaat adanya program PUAP dengan adanya penyedia modal diharapkan segala kebutuhan petani dalam penyediaan saprodi dapat terpenuhi sehingga dapat mensejahterakan petani dengan indikator yang biasa digunakan adalah meningkatnya pendapatan dan perkembangan usaha. Berikut data informan yang diwawancarai mengenai manfaat dana PUAP dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Manfaat Dana PUAP Program PUAP pada Gapoktan Karya Tani Tahun 2012

| No | Sampel anggota Gapoktan Karya Tani | Pendapatan | | Perkembangan Usaha | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Meningkat | Tidak Meningkatkan | Berkembang | Tidak Berkembang |
| 1 | Muh. Badjuri | V | | V | |
| 2 | H. Ahmad Khoiri | V | | V | |
| 3 | Muhammad Yasin | V | | V | |
| 4 | Supomo | V | | V | |
| 5 | Rofi | V | | | V |
| 6 | Sudarto | | V | | V |
| 7 | Mujadi | V | | V | |
| 8 | Nurrofiq | V | | V | |
| 9 | Juwari | V | | | V |
| 10 | H. Minarno | V | | V | |
| 11 | Ahmad Munib | | V | | V |
| 12 | Imam Sulaji | | V | | V |
| 13 | H. Edi | V | | | V |
| 14 | Sunarto | V | | V | |
| 15 | H. Mustain | V | | V | |
| Jumlah | | 12 | 3 | 9 | 6 |
| Presentase | | 80% | 20% | 60% | 40% |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa dari 15 orang informan, sebanyak 80% diantaranya menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat. Dan selebihnya 20% menyatakan pendapatannya tetap. Namun ternyata, meningkatnya pendapatan responden ini bukan disebabkan oleh meningkatnya produksi pertanian, tetapi karena meningkatnya harga jual hasil panen. Tidak meningkatnya produksi pertanian disebabkan karena petani menggunakan jumlah dan kualitas

sarana produksi yang sama sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dana bergulir PUAP. Tabel 5.3 juga memperlihatkan bahwa dari 15 informan, 60 % yang menyatakan bahwa usaha mereka berkembang dan 40% usahanya tidak berkembang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dana bergulir tersebut dipergunakan untuk usaha tanaman pangan dengan luas lahan yang terbatas, sedangkan usaha yang berkembang sebagian bukan usaha agribisnis.

7. Lembaga melakukan kegiatan untuk mendukung usaha para anggotanya sesuai RUA.

Pada penggunaan dana PUAP seharusnya sesuai dengan RUA (Rancangan Usaha Anggota) hal ini dikarenakan agar dana PUAP tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatannya. Pada Gapoktan Karya Tani sebagian besar sesuai dengan RUA yaitu untuk kegiatan usaha tani namun terdapat juga yang tidak sesuai hal ini disebabkan oleh mendesaknya kebutuhan rumah tangga di luar kebutuhan usaha tani, hasil wawancara menjelaskan hal tersebut. Berikut adalah responden yang menggunakan dana PUAP sesuai RUA dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Informan Yang Menggunakan Dana PUAP Sesuai RUA (Rencana Usaha Anggota) pada Gapoktan Karya Tani Tahun 2012

| No | Sampel anggota Gapoktan Karya Tani | Penggunaan Dana | |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Sesuai RUA | Tidak Sesuai RUA |
| 1 | Muh. Badjuri | V | |
| 2 | H. Ahmad Khoiri | V | |
| 3 | Muhammad Yasin | V | |
| 4 | Supomo | | V |
| 5 | Rofi | V | |
| 6 | Sudarto | V | |
| 7 | Mujadi | V | |
| 8 | Nurrofiq | | V |
| 9 | Juwari | V | |
| 10 | H. Minarno | | V |
| 11 | Ahmad Munib | | V |
| 12 | Imam Sulaji | V | |
| 13 | H. Edi | V | |
| 14 | Sunarto | V | |
| 15 | H. Mustain | V | |
| Jumlah | | 11 | 4 |
| Presentase | | 73,3% | 26,6% |

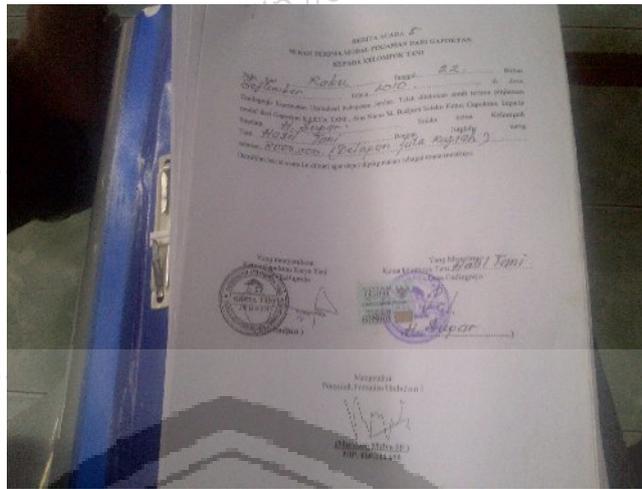
Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.4. dapat dilihat bahwa dari 15 informan, sebanyak 73,3% penggunaan dana tersebut sesuai RUA (Rencana Usaha Anggota) dan sebanyak 26,6% yang tidak sesuai RUA. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan juga tidak ada dimonitor oleh penyuluh pendamping, sehingga dana tersebut dipergunakan untuk keperluan lain. Dari hasil wawancara dengan Muhammad Yasin mengenai penggunaan dana, ternyata dan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan untuk bidang pertanian tetapi juga digunakan untuk keperluan dapur, sehingga dapat dikatakan penggunaan dana PUAP tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan usaha taninya. Melihat hal tersebut maka dapat dikatakan penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran untuk beberapa orang pada Gapoktan Karya Tani.

8. Penyaluran yang diberikan kepada anggota diikuti sesuai dengan Juknis Deptan.

Pelaksanaan penyaluran dana PUAP yang pemanfaatannya sebagian besar untuk kegiatan simpan pinjam. Pada Gapoktan Karya Tani pelaksanaan penyaluran dan perguliran dana PUAP yaitu sebagian besar responden menjawab “dari Gapoktan kemudian ke Poktan setelah itu disalurkan ke anggota”. Dana dari gapoktan disalurkan ke kelompok tani-dari kelompok tani disalurkan ke anggota-pengembalian setelah panen pada kelompok tani-dari kelompok tani dikembalikan ke Gapoktan”. Merujuk pada Juknis Deptan Pelaksanaan Program PUAP menjelaskan bahwa alur perguliran dana PUAP adalah berawal dari Gapoktan kemudian disalurkan ke Poktan yang selanjutnya disalurkan pada petani peminjam, hal ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pada Mekanisme Pencairan Dana Gapoktan ke Anggota. Pada Gapoktan Karya Tani penyaluran dana PUAP telah sesuai dengan Juknis Deptan. Pengurus Gapoktan bertindak sebagai pengelola, hal tersebut yang dilakukan para pengurus Gapoktan Karya Tani.

Penyaluran dana PUAP dari Gapoktan ke Poktan direalisasikan dalam bentuk berita acara, berita acara tersebut terakhir dibuat pada tahun 2010, sehingga dapat dikatakan dana macet selama dua tahun dapat dilihat pada gambar 5.6.



Gambar 5.6 Berita Acara Penyaluran Dana PUAP pada Poktan

9. Gapoktan mengalami perkembangan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan adanya perkembangan dana PUAP dapat dilihat dari jumlah dana PUAP yang berkembang. Namun pada Gapoktan Karya Tani sebagian besar responden menjawab “dana PUAP tidak berkembang karena banyak yang macet menjawab demikian, dalam artian banyak anggota yang tidak mematuhi tempo pengembalian. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Gapoktan (Bajuri) mengatakan:

“Para petani makin mengerti ilmu pertanian dan mau mempraktekkan kemudian dana yang awalnya 100.000.000 bisa berkembang lebih dari 100.000.000 namun di sini tidak berkembang karena dananya tetap banyak yang macet soalnya dalam pengembaliannya meskipun ada bungannya 1,5%”.

Dapat dilihat juga dari pernyataan PPL (Murdoso) di Desa Gadingrejo yang mengatakan:

“Dulu awalnya Rp 100.000.000, terus karena setiap peminjaman ada jasanya 1,5% dari peminjaman maka secara tertulis dana berkembang bisa mencapai Rp 125.000.000 namun pada kenyataannya dananya banyak yang macet jadi tidak bisa dikembangkan”.

Dalam proses ekonomi tersebut perlu adanya dukungan secara finansial yang diwujudkan dengan ketersediaan fasilitas seperti meja, kursi, lemari, seperti yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan, namun pada Gapoktan Karya Tani tidak memiliki fasilitas, sebanyak 93,33% menjawab demikian. Hal ini dapat dilihat secara fisik keadaan di kantor kesekretariatan Gapoktan Karya Tani tempatnya tidak berfungsi

lagi saat ini tempat ini. Kesekretariatan Gapoktan Karya Tani beralih fungsi menjadi kamar untuk tempat tinggal seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.7 Kondisi Kantor Gapoktan Karya Tani

Meskipun Gapoktan Karya Tani dalam prosedur pengelolaannya sesuai dengan Juknis Deptan, namun dalam manajemen pengelolaan dan penyalurannya kepada anggota dapat dikatakan kurang baik terbukti dari output yang dihasilkan seperti perkembangan keadaan Gapoktan serta perkembangan jumlah dana PUAP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil dari pembahasan di atas mengenai manajemen pengelolaan dan penyaluran dana PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi adalah memiliki manajemen yang baik dalam hal pencatatan administrasi. Pencatatan administrasi tersebut dilakukan oleh seseorang yang diperkerjakan sehingga dapat lebih diatur dengan baik dengan baik sehingga output yang diharapkan dengan berkembangnya dana PUAP dapat tercapai sedangkan dalam penyalurannya dari Gapoktan langsung ke anggota tidak sesuai dengan Juknis Deptan.

Pada Gapoktan Karya Tani memiliki manajemen yang kurang baik yaitu kurang tertibnya dalam hal pencatatan administrasi didukung dengan macetnya pinjaman sehingga output yang diharapkan yaitu berkembangnya dana PUAP

tidak sesuai dengan harapan namun dalam penyalurannya sesuai dengan Juknis Deptan yaitu dari Gapoktan ke Poktan kemudian ke anggota.

Hal di atas sesuai dengan gambaran hasil penelitian Mudiarta (2009), yang mengungkapkan dalam dinamika pembangunan pertanian di Indonesia ada anggapan bahwa inovasi yang didesiminasikan kepada masyarakat akan selalu melalui tahapan yang linear dan homogen. Karakteristik sosiologi yang mencakup struktur dan kultur masyarakat kurang dicermati, sehingga teori difusi inovasi sering diterapkan dengan model yang sama di setiap wilayah. Dalam konteks Indonesia, hal ini terjadi saat maraknya program penyuluhan pertanian yang ditujukan untuk mendongkrak produktivitas. Pra penyuluh ataupun bahkan birokrasi pembangunan pertanian memberlakukan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyuluhan dengan persepsi bahwa tahapan yang dilalui dalam proses itu adalah sama di seluruh daerah. Hal ini berdampak terhadap seragamnya strategi dan kebijakan penyuluhan pertanian di Indonesia, tanpa mencermati aspek spesifik lokasi. Akibatnya, peningkatan produktivitas dan pencapaian peningkatan pendapatan akan sulit dicapai.

Sehingga dapat disimpulkan tidak semua pedoman dari Pemerintah mutlak untuk dianut dengan harapan dapat menghasilkan output yang menjadi tujuan, karena disebabkan tiap daerah yang berbeda keadaanya dari kultur, sumber daya manusianya, sistem pemerintahnya, dan masih banyak lagi.

5.2 Modal Sosial terhadap Pengelolaan Dana PUAP

Keberadaan program PUAP berpotensi terjadinya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yaitu terjadinya penyelewengan pengelolaan seperti yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan program PUAP. Penyelewengan yang terjadi pada sejumlah daerah yang menerima dana PUAP seperti dana tersebut oleh kepala Gapoktan dan pengurus Gapoktan tidak dibagikan kepada anggota, terdapat pula dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan agribisnis namun sekedar konsumtif, dan terdapat juga dana tersebut hanya dibagikan kepada kerabat saja.

Hal yang menjadi pengontrol dari tindakan tersebut adalah modal sosial. Pengelolaan tersebut dibutuhkan adanya modal sosial. Modal sosial merupakan sesuatu yang ada dalam masyarakat berupa kepercayaan, norma-norma, hubungan antar masyarakat yang biasa disebut jaringan. Modal sosial merupakan unsur yang penting dalam masyarakat karena didalamnya memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar terutama dengan sesama masyarakat. Modal sosial yang dimiliki pada masyarakat di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo yang tergabung dalam keanggotaan Gapoktan, dimana keberadaan modal sosial menjadi alternatif setiap program pembangunan yang dijalankan khususnya pembangunan pertanian. Keberadaan modal sosial sangat dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga. Sebenarnya modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi, dan partisipasi sebagai pilar penting dalam pembangunan masyarakat.

Putnam dalam Hasbullah (2006), menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Komponen yang terdapat pada modal sosial adalah kepercayaan, jaringan dan norma.

Mengenai kepercayaan, peneliti menfokuskan pada besarnya pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota yang dipengaruhi oleh kekerabatan, posisi dan status sosial. Semakin tinggi atau berpengaruh orang tersebut maka besarnya pinjaman yang didapat juga semakin besar karena dengan melihat pertanggung jawaban dengan mempertaruhkan nama baik. Hal lain yang mempengaruhi besarnya pinjaman adalah dampak dari perilaku yang dilakukan orang tersebut, jadi kepercayaan tersebut muncul atau berubah setelah ada aksi dari peminjam, misalnya dengan keterlambatan pengembalian maka besarnya pinjaman yang didapat akan semakin kecil.

Pada jaringan peneliti menfokuskan pada kesempatan seseorang dalam memperoleh pinjaman dan informasi. Hal yang mempengaruhi tersebut adalah basis jaringan dan interaksi. Semakin dekatnya basis jaringan seperti pertetanggaan dan pertemanan maka kesempatan dalam memperoleh pinjaman semakin luas. Jaringan juga merupakan sebagai penyedia informasi, semakin luas jaringan yang dimiliki maka semakin banyak memperoleh informasi terkait dengan penelitian.

Norma merupakan kontrol perilaku yang tumbuh di masyarakat, keberadaan norma dalam penelitian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Apabila seseorang tersebut telah memenuhi syarat maka dapat memperoleh pinjaman maka dari itu peneliti mencatatkan aturan-aturan yang terdapat pada Gapoktan termasuk syarat memperoleh pinjaman. Apabila seseorang tersebut berperilaku baik dengan pengembalian tepat waktu, mematuhi aturan-aturan, aktif dalam kegiatan maka pinjaman yang didapat dan kesempatan memperoleh bantuan akan terbuka seluasnya.

Adanya modal sosial tinggi maka seseorang akan memperoleh sesuatu yang diinginkan. Karena modal sosial yang dimiliki akan menumbuhkan kebersamaan dalam mewujudkan tujuan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga komponen modal sosial di bawah ini:

5.2.1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau modal lainnya. Bersama dengan jenis modal lainnya, *trust* ikut membentuk dan menentukan karakter fisik sebuah sistem sosial-kemasyarakatan. *Trust* merupakan salah satu unsur modal sosial yang sangat penting dan berpengaruh dalam menyatukan individu-individu atau kelompok menjadi satu kesatuan yang harmonis. Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara 2 orang atau lebih yang bersifat asosiatif dimana hubungan tersebut bersifat pribadi, akan tetapi dimungkinkan bahwa

hubungan itu berkembang dalam suatu organisasi atau masyarakat secara luas (Soekamto, 1996).

Kepercayaan merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjalani hubungan sosial tanpa adanya kepercayaan antar masyarakat mustahil hubungan sosial yang harmonis akan tercipta. Rasa saling curiga yang berlebihan akan menciptakan berbagai macam masalah-masalah sosial seperti pertengkaran, tidak saling bertegur sapa dan masih banyak lagi yang nantinya akan menyebabkan terpecah belahnya suatu hubungan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan rasa saling percaya antar masyarakat dalam menjalani hubungan sosial agar tidak terjadi masalah-masalah sosial tersebut. Adanya program PUAP yang terdapat pada Desa Sidorejo yang ditempatkan pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Desa Gadingrejo yang ditempatkan pada Gapoktan Karya Tani yang bertujuan sebagai penyedia modal yang bergerak pada lembaga ekonomi yaitu dengan pelaksanaan program berupa simpan pinjam maka peran kepercayaan sangat diperlukan.

Adanya kepercayaan terhadap pelaksanaan peminjaman dapat memperlancar berjalannya program, namun apabila tidak adanya kepercayaan maka berdampak pada pihak pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Dalam hal perolehan pinjaman dan transparansi pengelolaan, kepercayaan memiliki peranan yang cukup penting. Berikut kepercayaan pengurus kepada anggota dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan kepercayaan anggota kepada pengurus dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.5 Kepercayaan Pengurus Kepada Anggota dalam Pemberian Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani Tahun 2012

| No | Indikator | Gapoktan Mulyo Abadi | | Gapoktan Karya Tani | |
|----|----------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| | | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| 1 | Sangat tidak percaya | | | | |
| 2 | Tidak percaya | | | | |
| 3 | Cukup Percaya | 6 | 60 | 4 | 26,6 |
| 4 | Percaya | 4 | 40 | 6 | 40 |
| 5 | Sangat Percaya | | | 5 | 33,3 |
| | Jumlah | 10 | 100 | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada tabel 5.5 Kepercayaan pengurus kepada anggota pada Gapoktan Mulyo Abadi terdapat indikator cukup percaya sebesar 60%, hal tersebut sesuai dengan penuturan Lilik selaku pekerja yang menangani kegiatan simpan pinjam mengatakan:

“Dalam urusan peminjaman uang, seseorang tidak dapat sepenuhnya dipercaya, jadi cukup memiliki kepercayaan yang sedang-sedang saja, karena kita perlu mempelajari orang dan karakter orang tersebut dengan bertanya-tanya kepada sekitar, jadi pada saat memberikan pinjaman ketika dia meminjam Rp 500.000,- maka pinjaman yang diberikan ke peminjam sebesar Rp 300.000,- jadi dijajal dulu atau dicoba dulu kemudian dilihat apakah orang tersebut tepat waktu dalam pengembaliannya”.

Jadi kepercayaan itu berawal dari diri seseorang untuk dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan, sehingga pada Gapoktan Mulyo Abadi tingkat kepercayaannya dapat dikatakan cukup.

Pada tabel 5.5 mengenai kepercayaan pengurus kepada anggota pada Gapoktan Karya Tani terdapat indikator sangat percaya sebesar 33,3% dan percaya sebesar 40%, dari hasil prosentase tersebut dapat dikatakan kepercayaan yang tinggi. Dari hasil wawancara pada Gapoktan Karya Tani kepercayaan antar anggota maupun dari anggota ke pengurus memiliki kepercayaan yang sangat kuat. Karena didasari oleh adanya hubungan kekerabatan atau suatu hubungan yang telah lama terjalin sehingga telah mengenal satu sama lain. Munculnya indikator sangat percaya akibat hubungan kekerabatan maka dapat memunculkan ketidaktegasan pengurus kepada anggota dalam pengembalian pinjaman.

Dana PUAP dikelola oleh Gapoktan, khususnya para pengurus Gapoktan maka hubungan kepercayaan dari anggota kepada pengurus memiliki peranan penting, dalam hal ini yang bersifat transparansi pengelolaan. Berikut kepercayaan anggota kepada pengurus dalam transparansi pinjaman dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Kepercayaan Anggota Kepada Pengurus dalam Transparansi Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani Tahun 2012

| No | Indikator | Gapoktan Mulyo Abadi | | Gapoktan Karya Tani | |
|----|----------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| | | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| 1 | Sangat tidak percaya | | | | |
| 2 | Tidak percaya | | | | |
| 3 | Cukup Percaya | | | 15 | 100 |
| 4 | Percaya | 6 | 60 | | |
| 5 | Sangat Percaya | 4 | 40 | | |
| | Jumlah | 10 | 100 | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada tabel 5.6 kepercayaan anggota kepada pengurus mengenai transparansi pada Gapoktan Mulyo Abadi indikator sangat percaya sebesar 40%, dan percaya 60% prosentasi ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Hal tersebut adalah dampak dari pengurus Gapoktan khususnya pak Margo selaku ketua Gapoktan yang dapat membangun kepercayaan tersebut. Padahal apabila dilihat dari pengelolaan, bagi anggota yang meminjam dikenakan bunga 2,5%, bunga senilai itu dapat dikatakan besar, namun karena adanya kepercayaan yang dibangun oleh Ketua Gapoktan (Margo Santoso), para anggota tetap meminjam pada Gapoktan dengan bunga yang cukup besar. Ketua Gapoktan mempunyai cara dalam membangun kepercayaan anggota kepada pengurus, di antaranya dengan Pak Margo tidak segan-segan dalam memberikan sesuatu secara cuma-cuma yang diberikan kepada seluruh anggota Gapoktan seperti topi, kaos, hem dan bantuan lainnya seperti sampel obat-obatan yang dibagikan secara cuma-cuma. Sebenarnya segala sesuatu yang diberikan ke anggota juga berasal dari anggota dari simpanan pokok, tabungan dan bunga pinjaman yang dikelola sedemikian rupa untuk kebutuhan anggota, sehingga anggota merasa diperhatikan sehingga timbul rasa hormat dan kepercayaan kepada ketua Gapoktan.

Hasil wawancara kepada pengurus Gapoktan Mulyo Abadi mengenai hubungan kepercayaan antar pengurus pada Gapoktan Mulyo Abadi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana PUAP, terdapat adanya kepercayaan namun ada suatu kondisi tertentu yang mengkondisikan pada pengelolaan dana PUAP tidak ditangani oleh pengurus Gapoktan, seperti yang diungkapkan oleh ketua Gapoktan (Margo Santoso) yang mengatakan:

“Pengurus Gapoktan banyak yang sibuk, bukannya tidak percaya tapi butuh satu tenaga kerja untuk manajemen agar dana terkontrol dengan baik”.

Dalam hal ini maka dalam pengelolaannya dana PUAP memperkerjakan satu pekerja yang merupakan juga anggota Gapoktan (Lilik) untuk menangani segala hal tentang PUAP seperti contohnya urusan administrasi dan lain sebagainya. Melihat fakta di lapang yang demikian maka hal tersebut bersifat kondisional, merupakan cara untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak diinginkan seperti tidak berjalannya pengelolaan dikarenakan ketidakaktifan pengurus, maka memperkerjakan seseorang untuk mengurus sistem pengelolaan.

Pada tabel 5.6 mengenai kepercayaan anggota kepada pengurus diperoleh hasil indikator cukup percaya mendominasi jawaban informan, persentase ini dapat dikatakan tidak tinggi tapi cukup. Dari hasil wawancara hal tersebut dikarenakan selama ini pengurus tidak transparan sehingga tidak dapat menunjukkan dokumen secara tertulis dengan jelas, seperti yang diungkapkan salah satu informan Muhammad Yasin mengatakan:

“Karena yang meminjam ini hubungan sudah sangat dekat, karena ada yang kerabat ada yang tetangga jadi kenal lama sekali, jadi Cuma mengandalkan kepercayaan, tapi ya kadang ditulis peminjamannya itu, jadi seperti pengurus merasa hal itu tidak begitu penting, pokoknya percaya saja”.

Dari penuturan di atas maka terdapat penyimpangan kepercayaan, bahwa hubungan yang dirasa sangat dekat menyebabkan efek negatif yaitu menyepelkan transparansi sehingga rasa kepercayaan lama kelamaan akan berkurang, karena setiap orang pasti ingin mengetahui transparansi namun karena keadaan demikian transparansi diabaikan.

Seorang peminjam yang ingin memperoleh pinjaman dari suatu lembaga keuangan mikro tidak bisa langsung mendapatkan pinjaman apalagi menentukan besarnya pinjaman yang ingin diperoleh. Selain ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam tersebut ada juga faktor lain yakni rasa saling percaya yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Data adanya kepercayaan dengan

besaran perolehan pinjaman secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.7 pada Gapoktan Mulyo Abadi dan 5.8 pada Gapoktan Karya Tani.

Tabel 5.7 Kepercayaan terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi

| Kepercayaan | Besaran Perolehan Pinjaman | | | Total |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Kekerabatan | | 1 | 2 | 3 |
| Posisi dan Status Sosial | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Total | 2 | 5 | 3 | 10 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada tabel 5.7 sebanyak 10 informan yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan Mulyo Abadi atas dasar faktor kepercayaan sebanyak 2 informan dengan kepercayaan yang bersumber dari kekerabatan yang memperoleh pinjaman pada besaran tinggi lalu 1 informan yang memperoleh kredit pada besaran sedang dan tidak ada informan yang memperoleh kredit pada besaran rendah. Selanjutnya, pada kepercayaan yang bersumber dari status dan posisi sosial terdapat 2 informan yang memperoleh kredit pada besaran rendah, lalu sebanyak 4 informan yang memperoleh kredit pada besaran sedang dan 1 informan pada besaran tinggi.

Kepercayaan yang berlandaskan pada posisi dan status sosial di Gapoktan Mulyo Abadi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap besaran pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota. Pada posisi dan status sosial menentukan seseorang dalam besarnya memperoleh pinjaman karena dilihat dalam kemampuan seseorang dalam mengembalikan pinjaman tersebut dari segi ekonomi. Sedangkan pada hubungan kekerabatan artinya orang yang sudah sangat dekat, serta melihat dari kemampuannya mengembalikan pinjaman dilihat dari usaha yang dijalani.

Hasil wawancara di lapang menunjukkan bahwa para anggota yang memperoleh pinjaman yang besar pada saat pertama kali melakukan peminjaman dari Gapoktan Mulyo Abadi mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pengurus Gapoktan Mulyo Abadi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Menik yang merupakan salah satu petani yang mengaku sebagai seseorang yang sangat dekat dengan Pak Margo yang sejak awal berdirinya Gapoktan, Bu Menik telah

menjadi anggota pertama kali awal berdirinya Gapoktan dan selalu setiap ada kegiatan Gapoktan selalu aktif, bahkan terkadang Pak Margo mengajak bu Menik ke tempat pertemuan untuk bertemu petani-petani lain, sehingga mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 yang tergolong dalam besaran tinggi.

Ibu Menik menceritakan bahwa pada saat pertama kali meminjam uang, pihak Gapoktan tidak langsung menetapkan pinjaman yang dapat diperoleh oleh Ibu Menik asalkan pinjaman yang diajukan tidak berlebihan dan sesuai dengan jumlah pinjaman yang masih tersedia. Pada saat itu Ibu Menik mencoba mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000, dan pinjaman dapat cair sesuai dengan permintaan, hal tersebut dikarenakan pada awal peminjaman masih sedikit anggotanya, karena Bu Menik merupakan anggota lama sehingga dapat memperoleh pinjaman sesuai keinginan.

Sementara itu, hasil wawancara yang berbeda diperoleh oleh Pak Jamari yang merupakan salah satu responden yang juga merupakan salah satu anggota Gapoktan Mulyo Abadi yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan. Pinjaman yang diperoleh oleh Pak Jamari tidak sebesar Ibu Menik yang sebesar Rp 1.000.000. Pak Jamari hanya memperoleh dan sebesar Rp 350.000 yang tergolong dalam besaran rendah. Pak Jamari mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara beliau dengan pihak pengurus Gapoktan tidak terlalu dekat hanya sebatas anggota dan pengurus saja karena memang beliau tergabung pada Poktan yang letaknya jauh dari kantor Gapoktan sehingga sulit untuk mengenal lebih dekat satu sama lain.

Berdasarkan keterangan dari Pak Jamari pada saat meminjam uang kepada Gapoktan, Pak Jamari juga tidak berani untuk meminjam dalam jumlah yang besar karena takut tidak bisa mengembalikan tepat waktu sehingga pada akhirnya mengakibatkan hal yang buruk terhadapnya. Hal tersebut disebabkan beliau baru mengenal pihak Gapoktan karena baru tergabung dalam keanggotaan Gapoktan. Sementara itu, pihak Gapoktan juga menjelaskan bahwa dia tidak berani meminjamkan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada warga yang belum terlalu dikenal dengan baik karena khawatir nantinya akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan sehingga bagi anggota baru yang ingin meminjam

pinjaman kepada Gapoktan hanya diberikan pinjaman pada besaran rendah yakni berkisar Rp 150.000–Rp 350.000. Pihak Gapoktan juga menambahkan bahwa jika si anggota tersebut melakukan pembayaran dengan teratur dan bersifat lebih terbuka tidak menutup kemungkinan pada peminjaman yang selanjutnya akan memperoleh pinjaman yang lebih besar.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa besar kecil pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota Gapoktan Mulyo Abadi sangat ditentukan oleh kepercayaan yang terdapat antara anggota dengan pengurus. Selanjutnya mengenai keberadaan kepercayaan dengan perolehan besaran pinjaman pada Gapoktan Karya Tani dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Kepercayaan terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Karya Tani

| Kepercayaan | Besaran Perolehan Pinjaman | | | Total |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Kekerabatan | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Posisi dan Status Sosial | | 2 | 4 | 6 |
| Total | 1 | 6 | 8 | 15 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.8 Sebanyak 15 informan yang memperoleh peminjaman dari Gapoktan Karya Tani melalui Poktan atas dasar faktor kepercayaan sebanyak 4 informan dengan kepercayaan yang bersumber dari kekerabatan yang memperoleh kredit pada besaran tinggi lalu, 4 informan pada besaran sedang dan 1 informan pada besaran rendah. Selanjutnya, pada kepercayaan yang bersumber dari status dan posisi sosial terdapat 4 informan yang memperoleh kredit pada besaran tinggi lalu sebanyak 2 orang yang memperoleh kredit pada besaran sedang dan tidak ada informan yang memperoleh kredit pada besaran rendah.

Kepercayaan yang bersumber dari hubungan kekerabatan antara anggota dengan pengurus Gapoktan pada Gapoktan Karya Tani memiliki peran yang cukup signifikan terhadap besaran pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota, karena memang pada dasarnya kekerabatan merupakan tonggak utama dalam membangun kepercayaan. Menurut Putnam (2000) dalam Field (2003) Modal sosial yang bertumpu pada hubungan kekerabatan tersebut dinamakan dengan modal sosial yang terikat (*bonding*). Karena ikatan-ikatan seperti itu merupakan

ikatan yang sangat kuat bersifat bonding dan sangat mengutamakan homogenitas. Kepercayaan juga merupakan hal yang utama dalam menjalankan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan berbagai bidang lainnya. Menurut Lawang (2004) rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Selanjutnya, Lawang (2004) menambahkan bahwa semakin kuat rasa percaya kepada orang lain maka akan semakin kuat juga kerjasama yang terjalin antara mereka. Sebagai contoh jika ada dua pihak yang ingin melakukan kerjasama namun kedua pihak tersebut mengalami krisis kepercayaan maka dapat dikatakan kerjasama itu pun tidak akan dapat berjalan dengan baik malah yang akan muncul adalah rasa saling curiga.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa para anggota yang memperoleh pinjaman yang besar pada saat pertama kali melakukan peminjaman dari Gapoktan Karya Tani melalui Poktan masing-masing mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pengurus Gapoktan Karya Tani. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Muhammad Yasin yang merupakan salah satu anggota yang mengaku sebagai kerabat dari Pengurus Gapoktan Karya Tani serta posisi Pak Yasin adalah sebagai pengurus Poktan sehingga dapat memperoleh pinjaman sebesar Rp Rp 800.000 yang berarti tergolong dalam besaran tinggi.

Pak Yasin menceritakan bahwa pada saat pertama kali meminjam uang, pihak Gapoktan langsung menetapkan jumlah kepada setiap Poktan yaitu Rp 8.000.000, dan yang menerima uang tersebut adalah pengurus Poktan yaitu ketua dan bendahara Poktan, sedangkan posisi Pak Yasin adalah bendahara dan rumahnya berdekatan dengan ketua Poktan H. Ahmad Khoiri sehingga kesempatan memperoleh pinjaman dalam besaran tinggi memiliki peluang yang cukup besar.

Sementara itu, hasil wawancara yang berbeda diperoleh oleh pak Supomo yang juga merupakan anggota Gapoktan Karya Tani dan juga merupakan pengurus Poktan yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan melalui Poktan. Pinjaman yang diperoleh oleh Pak Supomo tidak sebesar Pak Yasin yang sebesar Rp 800.000. Pak Supomo hanya memperoleh dan sebesar Rp 200.000 yang berarti tergolong dalam besaran rendah. Pak Supomo mengatakan bahwa hubungan yang

terjalin antara beliau dengan ketua Poktan tidak terlalu dekat karena pada saat penerimaan dana PUAP dari Gapoktan hanya ketua Poktannya saja, pada hal Pak Supomo bertindak sebagai pengurus Poktan hanya sebatas antar pengurus saja dengan hubungan komunikasi yang tidak lancar dan disebabkan juga letak rumah yang jauh dari ketua Poktan sehingga sulit untuk mengenal lebih dekat satu sama lain. Pinjaman yang diberikan pada besaran rendah yakni berkisar Rp 200.000–Rp 350.000.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa besar kecil pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota sangat ditentukan oleh kepercayaan yang terdapat antara anggota dengan pengurus melalui hubungan kekerabatan. Terbukti dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Yasin dan Pak Supomo dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan Pak Supomo karena memang beliau adalah kerabat dekat sementara Pak Yasin tinggalnya jauh dari ketua Gapoktan maupun ketua Poktan sehingga intensitas pertemuan antara beliau dengan pengurus tersebut tidak setinggi Pak Yasin dan pada akhirnya kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain menjadi lebih kecil dan rasa saling percaya yang dapat dibangun menjadi lebih sulit.

Hal tersebut menunjukkan bahwa modal sosial yang terikat (*bonding*) sangat erat kaitannya dalam memandang peran kepercayaan terhadap besaran perolehan pinjaman karena terdapat gejala-gejala hubungan kekerabatan dimana hubungan kekerabatan merupakan salah satu indikator dalam modal sosial yang bersifat terikat (*bonding*) (Putnam, 2000 dalam Field, 2003). Selain itu, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Williamson dalam Viprianty (2007). Dengan adanya rasa saling percaya, tidak dibutuhkan aktivitas pengawasan terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Kepercayaan dapat dibangun, akan tetapi dapat juga hancur. Demikian juga kepercayaan tidak dapat ditumbuhkan oleh salah satu sumber saja, tetapi sering kali tumbuh berdasarkan pada hubungan teman atau keluarga.

5.2.2. Jaringan

Menurut Putnam dalam Field (2010), jaringan adalah aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik karena suatu hubungan timbal balik membantu orang memperbaiki kehidupan mereka.

Sebagai salah satu komponen modal sosial, jaringan sosial dipandang memiliki peranan yang cukup penting dalam persoalan perolehan pinjaman terhadap Gapoktan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menjelaskan mengenai keberadaan jaringan sosial terhadap besaran perolehan pinjaman. Data keberadaan jaringan terhadap besaran perolehan pinjaman secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Jaringan Sosial terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi

| Jaringan | Besaran Perolehan Pinjaman | | | Total |
|----------------|----------------------------|--------|--------|-------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Basis Jaringan | | 1 | 2 | 3 |
| Interaksi | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Total | 2 | 5 | 3 | 10 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.9 sebanyak 10 informan yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan Mulyo Abadi kredit atas dasar faktor jaringan sosial terdapat 2 informan yang memiliki jaringan sosial yang bersumber dari basis jaringan seperti pertetangaan dan pertemanan yang memperoleh pinjaman pada besaran tinggi lalu sebanyak 1 informan yang memperoleh pinjaman pada besaran sedang dan tidak ada informan yang memperoleh pinjaman pada besaran rendah. Selanjutnya, pada jaringan sosial yang bersumber dari tingkat interaksi terdapat 2 informan yang memperoleh kredit pada tahap besaran rendah, lalu 4 informan pada tahap besaran sedang dan 1 informan yang memperoleh kredit pada besaran tinggi.

Pada umumnya para anggota Gapoktan Mulyo Abadi yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan merupakan orang yang berada dalam satu wilayah yang sama yakni di Kecamatan Umbulsari, namun karena wilayah Umbulsari luas jadi para anggota Gapoktan tersebar ke beberapa desa yang masuk dalam keanggotaan

Gapoktan Mulyo Abadi sehingga jaringan sosial disini yang mencakup anggota Gapoktan dapat dikatakan bahwa basis jaringan sosial melalui hubungan pertetangaan dan pertemanan sangat kecil.

Berdasarkan penelitian di lapang para responden yang memperoleh pinjaman dalam jumlah yang besar memiliki jaringan sosial yang melalui hubungan pertetangaan dan pertemanan sehingga responden tersebut banyak mengenal dan dikenali dekat oleh sebagian besar warga masyarakat di wilayah mereka sehingga dengan begitu kontrol dan pengawasan terhadap diri mereka menjadi lebih mudah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lilik. Lilik merupakan salah satu responden yang memperoleh pinjaman yang besar dari Gapoktan. Lilik dapat dikatakan adalah seorang yang baru memulai usahanya di bidang pertanian maka dari itu dia merupakan anggota baru dalam Gapoktan, namun karena Lilik adalah pekerja di Gapoktan sejak lama dan sudah sangat mengenal para pengurus Gapoktan maka hal tersebut merupakan faktor penyebab dia berhasil memperoleh dana dalam jumlah kategori sedang. Responden lain yakni Pak Rohiem yang mengaku tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pihak Gapoktan tetapi beliau memperoleh pinjaman dengan jumlah yang sedang dikarenakan rumahnya berdekatan disekitar kantor Gapoktan dengan begitu kontrol dan pengawasan terhadap diri mereka menjadi lebih mudah dikarenakan orang-orang sekitar telah mengenal Pak Rohiem sehingga dapat menjadi jembatan untuk memberikan gambaran tentang Pak Rohiem kepada Gapoktan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki andil terhadap besaran pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota. Pada dasarnya kepercayaan pihak Gapoktan terhadap anggota juga lahir dari jaringan sosial anggota tersebut. Jaringan sosial dalam kasus ini sangat berkaitan erat dengan pola interaksi yaitu pemberian pinjaman diberikan kepada siapa saja yang merupakan anggota Gapoktan meskipun tempat tinggalnya tidak berada di sekitar kantor Gapoktan namun dilihat dari interaksinya kepada Gapoktan. Sedangkan keberadaan jaringan sosial terhadap besaran perolehan pinjaman pada Gapoktan Karya Tani dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Jaringan Sosial terhadap Besaran Perolehan Pinjaman pada Gapoktan Karya Tani

| Jaringan | Besaran Perolehan Pinjaman | | | Total |
|----------------|----------------------------|--------|--------|-------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Basis Jaringan | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Interaksi | | 2 | 4 | 5 |
| Total | 1 | 6 | 8 | 15 |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Pada Tabel 5.10 sebanyak 15 informan yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan Karya Tani atas dasar faktor jaringan sosial terdapat 4 informan yang memiliki jaringan sosial yang bersumber dari basis jaringan seperti pertetangaan dan pertemanan yang memperoleh pinjaman pada besaran tinggi lalu sebanyak 4 informan yang memperoleh pinjaman pada besaran rendah dan 1 informan yang memperoleh pinjaman pada besaran rendah. Selanjutnya, pada jaringan sosial yang bersumber dari tingkat interaksi terdapat 2 informan yang memperoleh pinjaman pada besaran sedang dan 4 informan pada besaran tinggi lalu tidak ada responden yang memperoleh pinjaman pada besaran rendah.

Pada umumnya anggota yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan Karya Tani melalui Poktan merupakan masyarakat yang berada dalam satu wilayah yang sama yakni sekitar kesekretariatan Poktan, karena para anggota memperoleh dari Poktan sebab dana disalurkan dari Gapoktan ke Poktan kemudian ke anggota, contohnya pada Poktan Nikmat Tani pada desa Gadingrejo bagian Krajan sehingga jaringan sosial disini hanya mencakup sebagian besar warga bagian Krajan dari hal itu dapat dikatakan bahwa basis jaringan sosial melalui hubungan pertetangaan dan pertemanan sangat kental di wilayah ini.

Berdasarkan hasil di lapang, para responden yang memperoleh pinjaman jumlah yang besar memiliki jaringan sosial yang melalui hubungan pertetangaan dan pertemanan sehingga responden tersebut banyak mengenal dan dikenali dekat oleh sebagian besar warga masyarakat di wilayah mereka sehingga dengan begitu kontrol dan pengawasan terhadap diri mereka menjadi lebih mudah. Sebagaimana yang diungkapkan Imam Sulaji merupakan salah satu responden yang memperoleh pinjaman kategori sedang yakni Rp 600.000 dari pihak Gapoktan Karya Tani melalui Poktan Nikmat Tani. Beliau mengungkapkan walaupun beliau

bukan merupakan pengurus namun hubungan dengan pengurus Poktan sangat dekat dan tinggalnya disekitar pengurus Poktan hal tersebut merupakan faktor penyebab beliau berhasil memperoleh dana dalam jumlah yang besar. Responden lain yakni Bapak Sunarto yang mengaku tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pihak Pengurus Gapoktan tetapi beliau memperoleh pinjaman dengan jumlah yang besar dikarenakan beliau merupakan pengurus Poktan dan tingkat interaksi yang cukup besar dengan selalu aktif dalam kegiatan Gapoktan.

Pada umumnya anggota yang memperoleh pinjaman dari Gapoktan Karya Tani melalui Poktan merupakan anggota yang berada dalam satu wilayah yang sama dengan kesekertarian atau rumah pengurus Poktan sehingga dapat dikatakan bahwa basis jaringan sosial melalui hubungan pertetangaan dan pertemanan sangat kental di wilayah ini. Berdasarkan hasil di lapangan para responden yang memperoleh pinjaman jumlah yang besar memiliki jaringan sosial yang melalui hubungan pertetangaan dan pertemanan sehingga responden tersebut banyak mengenal dan dikenali dekat oleh sebagian besar warga masyarakat di wilayah mereka sehingga dengan begitu kontrol dan pengawasan terhadap diri mereka menjadi lebih mudah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki andil terhadap besaran perolehan pinjaman. Pada dasarnya kepercayaan pihak Gapoktan juga lahir dari jaringan sosial. Jaringan sosial dalam kasus ini sangat berkaitan erat dengan pihak ke tiga baik itu yang berbasis individu maupun berkelompok yang dalam hal ini adalah tetangga dan teman. Peran pihak ke tiga sangat menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh oleh anggota terhadap Gapoktan melalui Poktan. Pihak ke tiga yang dimaksud disini adalah individu atau kelompok yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak yakni Gapoktan dan peminjam yaitu anggota. Beberapa contoh pihak ke tiga yang sesuai dengan kasus ini adalah tetangga dan teman yang dimiliki oleh peminjam. Walaupun si peminjam tidak begitu mengenal dekat pengurus Gapoktan namun ia memiliki teman. Tetangga dan teman yang mengenal baik pihak Gapoktan maka kemungkinan peminjam itu bisa mendapatkan jumlah dana seperti yang ia harapkan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk modal

sosial yang bersifat menjembatani (*bridging*) sangat jelas terlihat dari kedua contoh di atas karena terdapat proses penyatuan antara dua belah pihak yang sebelumnya tidak saling mengenal dan terdapat pihak ketiga yang bersifat sebagai jembatan bagi kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan konsep dari modal sosial yang bersifat menjembatani (*bridging*) yakni lebih cenderung menyatukan orang dari ranah yang berbeda (Putnam, 2000 dalam Field, 2003). Selain itu dapat disimpulkan bahwa peminjam yang memiliki jaringan sosial yang baik maka kesempatan memperoleh dana dalam jumlah yang besar menjadi terbuka akan tetapi jika si peminjam tidak memiliki jaringan sosial yang kurang baik maka akan sulit untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar.

Kemampuan anggota-anggota kelompok untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergitas akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya jaringan dalam suatu kelompok seperti pada hubungan sosial yang membentuk jaringan pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani. Berdasarkan hasil penelitian adanya program PUAP membentuk suatu pola hubungan jaringan mengenai keberadaan informasi program serta cara penyebaran informasi. Sehingga masyarakat di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo mengetahui keberadaannya. Pada Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo, para anggota mendapatkan informasi adanya PUAP dari Ketua Gapoktan yaitu pak Margo, sedangkan Pak Margo mendapatkan informasi tersebut dari Dinas Pertanian (Akson), UPTD (Narto), dan PPL (Dwi). Informasi yang diperoleh Pak Margo kemudian disalurkan kepada anggotanya, maka dari itu sebagian besar responden di Gapoktan Mulyo Abadi memperoleh informasi dari Ketua Gapoktan. Pada Gapoktan Karya Tani sebagian responden menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi dari PPL yaitu Pak Murdoso. Bahkan ketua Gapoktan (Badjuri) mengatakan hal demikian. Pada Gapoktan Karya Tani desa Gadingrejo ini yang sangat berperan aktif dalam perolehan informasi adalah PPL (Murdoso). Hal tersebut dikarenakan dengan pertimbangan umur ketua Gapoktan yang sudah lanjut usia, sehingga sulit untuk mengurus dan fokus dalam hal keorganisasian dan adanya juga masalah intern yaitu belum ada pemilihan kepengurusan baru.

Adanya interaksi yang membentuk hubungan sosial dalam tubuh kelembagaan Gapoktan dapat dikatakan sebuah hubungan formal. Pada masyarakat desa, diketahui memiliki asosiasi-asosiasi formal maupun informal yang umumnya kuat dan memiliki nilai-nilai, norma, dan etika kolektif sebagai sebuah komunitas yang saling berhubungan. Hal ini merupakan modal sosial yang dapat mendorong munculnya organisasi-organisasi modern dengan prinsip keterbukaan, dan jaringan-jaringan formal dan informal dalam masyarakat yang secara mandiri dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama dalam kerangka pembangunan masyarakat. Nee dalam Mudiarta (2009), mengemukakan adanya terjadi mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal, yakni pada tataran mikro (individu), meso (kelompok/organisasi), dan tataran makro berupa lingkungan kebijakan (*policy enviroment*). Jika integrasi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka kemungkinan ada kecenderungan terjadi *inequality* sumber-sumber sosial.

Maka dalam aturan keorganisasian pada Gapoktan segala hal mengenai adanya informasi yang menyangkut keorganisasian maka perlu disampaikan kepada anggota. Maka dengan adanya program PUAP ini mengenai prosedur pencairan, dan segala hal yang terkait dengan program perlu diinformasikan kepada anggota. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para anggota Gapoktan maupun pengurus Gapoktan serta para informan terkait yang membahas tentang siapa yang memberikan keterangan prosedur pencairan dana PUAP ke anggota Gapoktan, sebagian besar responden yang tergabung dalam Gapoktan Mulyo Abadi menjawab bahwa Lilik merupakan seorang yang diperkerjakan oleh Gapoktan untuk mengurus segala hal kepentingan di Gapoktan khususnya urusan simpan pinjam terkait dana PUAP dan karena pada Gapoktan Mulyo Abadi apabila yang akan meminjam uang langsung datang ke Gapoktan dan yang melayani serta menanggapi segala kebutuhan kelengkapan secara administrasi atau yang lainnya dengan Lilik, Pak Margo selaku ketua Gapoktan telah menyerahkan segala urusan tersebut kepada Lilik, karena para pengurus yang terdapat di Gapoktan Mulyo Abadi sangat sibuk, sehingga tidak dapat ikut

dalam pengelolaan dana PUAP, seperti yang dituturkan oleh Lilik sendiri yang mengatakan:

“Saya sudah tahu dari Pak Margo dan saya diperkerjakan untuk memberikan keterangan kepada para peminjam”.

Pada Gapoktan Karya Tani sebagian besar menjawab PPL yang memberikan penjelasan tentang prosedur pencairan dana PUAP yaitu pada saat pertemuan, dan dilanjutkan dengan jawaban susulan yaitu pengurus Gapoktan dan Pengurus Poktan. Karena seperti yang dijelaskan di awal pada PPL (Murdoso) di Desa Gadingrejo lebih berperan aktif dalam urusan keorganisasian Gapoktan, tidak hanya sebagai pendamping tapi ikut lebih mendalam mengetahui seluk beluk Gapoktan. Dengan melihat fakta di lapang saat peneliti mewancarai PPL (Murdoso) mengatakan:

“Semua rekening yang berhubungan dengan Gapoktan, saya memegang sebenarnya secara prosedural hal itu tidak diperbolehkan, yang memegang seharusnya ketua Gapoktan, namun apabila melihat dari usia ketua Gapoktan yaitu pak Badjuri, maka beliau menyerahkannya kepada saya”.

Dalam suatu proses birokrasi pencairan dana PUAP atau yang digunakan untuk peminjaman kepada petani melewati urusan administrasi. Hal tersebut dilakukan karena digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan laporan secara tertulis, sebab PUAP merupakan program yang terdapat pengawasan dan pengendalian dari pihak Departemen Pertanian. Begitupun pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani yang melakukan prosedur tersebut. Pada Gapoktan Mulyo Abadi ketua Gapoktan (Margo Santoso) menjawab “petugas dari Dinas yang membantu dalam urusan administrasi pencairan dana PUAP”, namun sebagian besar responden yang berstatus sebagai anggota menjawab “yang membantu dalam urusan administrasi pencairan pinjaman adalah sekretaris Gapoktan yaitu Lilik, pemahaman dari anggota Gapoktan Mulyo Abadi bahwa sekretaris Gapoktan adalah yang membantu urusan Gapoktan atau dapat dikatakan wakil dari ketua Gapoktan, pada hal secara struktur organisasi sekretaris Gapoktan bukan saudara Lilik, namun pemahaman awam para petani saja. Pada Gapoktan Karya Tani PPL yang memegang peranan penting dalam urusan

kelembagaan Gapoktan sehingga sebagian besar responden mengemukakan bahwa yang membantu dalam urusan administrasi adalah PPL.

Pada suatu pola hubungan terdapat adanya suatu interaksi timbal balik yang dilakukan terus menerus. Berdasarkan hasil penelitian hubungan timbal balik tersebut terjadi pada suatu hubungan saling memberikan masukan, informasi yang dikemas dalam bentuk diskusi dengan cara berkomunikasi. Hal itulah yang terjadi pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani terkait keberadaan program PUAP yang menjadi fokus penelitian. Menurut De Vito dalam Lubis (2008), jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain dalam organisasi. Jaringan organisasi ini berbeda besar dan strukturnya pada masing-masing organisasi, dan biasanya disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan organisasi tersebut. Secara umum jaringan komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu: 1) jaringan komunikasi *Formal* dan 2) jaringan komunikasi *Informal*. Dengan kata lain hubungan yang terjadi dalam organisasi dapat terjadi secara formal dan informal.

Pada Gapoktan Mulyo Abadi biasanya yang diajak dalam berdiskusi terkait program PUAP sebagian besar responden menyatakan bahwa PPL dan sesama anggota, karena sesuai dengan fungsi PPL adalah tempat untuk bertanya segala informasi dari pemerintah dan seorang pendamping di lapangan. Pada Gapoktan Karya Tani sebagian besar menyatakan bahwa yang diajak dalam berdiskusi terkait program adalah para pengurus yaitu pengurus Gapoktan maupun pengurus Poktan serta sesama anggota. Hal ini dikarenakan dana dikelola oleh Poktan sehingga para pengurus Poktan yang lebih sering untuk diajak dalam berdiskusi atau tukar pendapat hal tersebut merupakan bentuk jaringan komunikasi informal karena sifatnya diskusi.

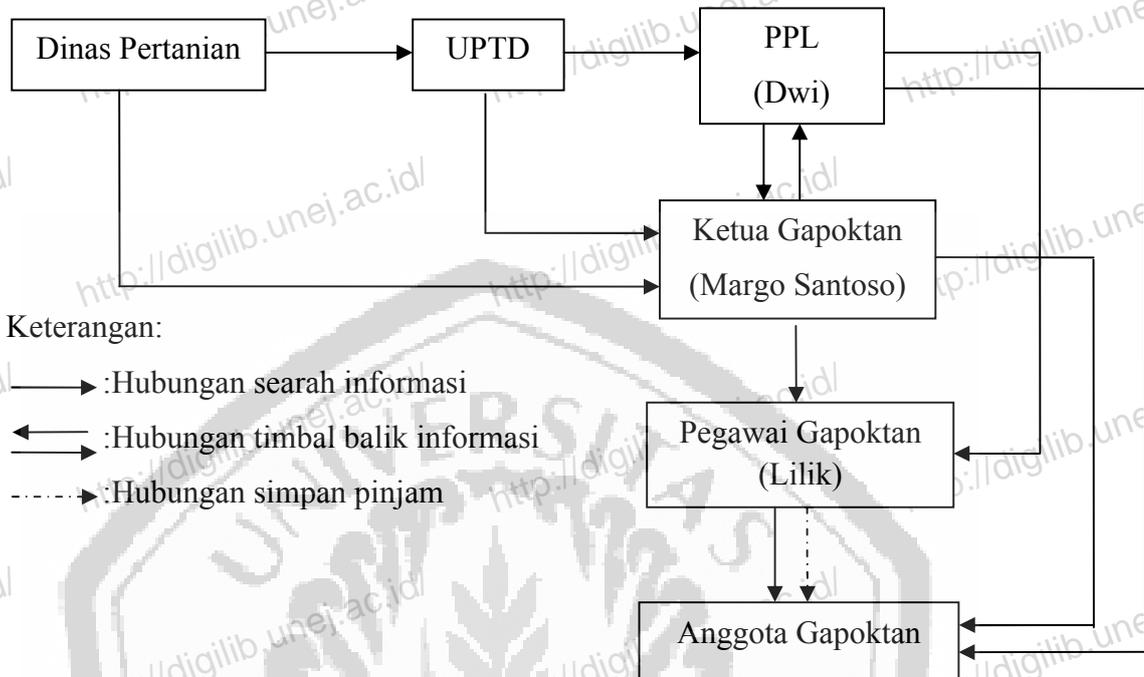
Adapun jaringan komunikasi yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi sebagian besar responden menyatakan dengan telepon atau getok tular yang dapat diartikan yaitu secara lisan ada juga yang menjawab secara tertulis yang biasanya berupa undangan, kemudian informasi itu dilanjutkan kepada siapa, setiap responden menjawab dengan berbagai macam jawaban contohnya ketua Gapoktan yang menjawab informasi dilanjutkan kepada PPL dan sekretaris Gapoktan,

namun sebagian besar responden yang berstatus sebagai anggota di Gapoktan menyatakan bahwa melanjutkan informasi yang diterima kepada sesama anggota. Begitu halnya dengan Gapoktan Karya Tani sebagian besar responden menyatakan bahwa bentuk informasi secara lisan. Hal ini karena dengan secara lisan adalah bentuk penyampaian informasi yang paling mudah dan cepat serta pasti tersampainya maksud yang dituju, sehingga dari keseluruhan responden menyatakan bahwa secara lisan. Kemudian informasi dilanjutkan, sebagian besar responden menjawab bagi yang berstatus pengurus Gapoktan menjawab yaitu kepada anggota, dan yang berstatus anggota menjawab ke sesama anggota. Biasanya informasi yang disalurkan tersebut mengenai adanya pertemuan yang membahas tentang adanya pinjaman dan bantuan dari pemerintah contohnya berupa saprodi.

Adapun alat telekomunikasi yang dipakai dalam berkomunikasi sebagian besar dari keseluruhan responden menjawab dengan menggunakan HP, dan tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi lewat HP, karena seperti yang kita ketahui saat ini HP (*Hand Phone*) merupakan alat canggih yang digunakan untuk mempermudah komunikasi agar cepat tersampainya suatu pesan dan cara mengoprasionalkannya siapa saja bisa, namun ternyata ada beberapa responden yang tergabung dalam Gapoktan Karya Tani yaitu Ketua Gapoktan itu sendiri Pak Badjuri, Supomo, Sunarti, dan H.Mustain menjawab kesulitan dalam menggunakan HP dikarenakan faktor usia.

Biasanya pembinaan atau penyuluhan tentang adanya suatu program dilakukan oleh PPL, sesuai dengan fungsi dari PPL itu sendiri dan biasanya kegiatan tersebut dilakukan paling sering di rumah Ketua Gapoktan dapat juga bergilir di rumah anggota. Seperti halnya pada Gapoktan Mulyo Abadi, pertemuan Gapoktan lebih sering dilakukan di rumah Pak Margo selaku Ketua Gapoktan dan begitupun juga pada Gapoktan Karya Tani pertemuan Gapoktan dilakukan di rumah Pak Badjuri selaku Ketua Gapoktan. Hal ini dilakukan karena diharapkan para anggota akan banyak yang hadir sebab Ketua Gapoktan di dua Gapoktan tersebut tergolong orang yang disegani. Adapun alur jaringan komunikasi dalam

memberikan informasi mengenai program PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo sebagai berikut:

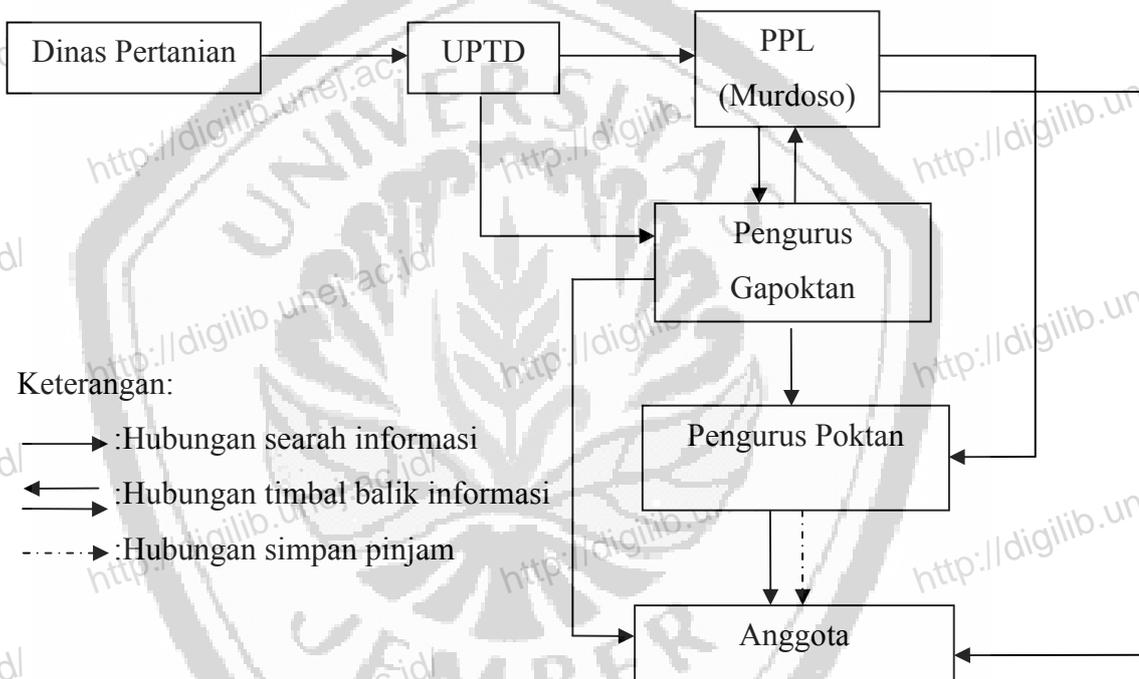


Gambar 5.8 Alur Jaringan pada Gapoktan Mulyo Abadi

Dari gambar alur jaringan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian menyalurkan informasi kepada UPTD dan juga disalurkan langsung kepada ketua Gapoktan (Margo Santoso) merupakan jaringan komunikasi formal ke bawah, hal tersebut dikarenakan Pak Margo cukup akrab dengan petugas dari Dinas Pertanian. Informasi yang terdapat pada UPTD kemudian disalurkan ke PPL (Petugas Penyuluh Lapang), dari UPTD juga dapat langsung menyalurkan informasinya ke Pak Margo. Informasi yang terdapat pada Bu Dwi selaku PPL disalurkan kepada ketua Gapoktan di sini terjadi hubungan timbal balik informasi, karena terkadang Pak Margo mendapat informasi lebih dulu dari Dinas Pertanian maupun UPTD maka Pak Margo juga dapat menyalurkan informasi tersebut kepada Bu Dwi hal ini merupakan jaringan komunikasi formal ke atas. PPL juga menyalurkan informasi kepada Lilik dan juga anggota Gapoktan. Informasi yang terdapat pada Ketua Gapoktan yaitu Pak Margo di salurkan kepada Lilik selaku pegawai Gapoktan dan juga kepada anggota. Informasi yang terdapat pada Lilik

disalurkan ke anggota, biasanya informasi yang disalurkan tersebut mengenai program PUAP ataupun bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Tanda panah titik menunjukkan mengenai hubungan simpan pinjam terkait program PUAP, yaitu Lilik selaku pegawai Gapoktan berinteraksi langsung kepada peminjam dan yang mengurus segala hal tentang peminjaman ke anggota adalah Lilik.

Adapun alur jaringan komunikasi dalam penyaluran informasi mengenai program PUAP pada Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo dapat dilihat pada gambat di bawah ini:



Gambar 5.9 Alur Jaringan pada Gapoktan Karya Tani

Dari gambar alur jaringan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian menyalurkan informasi kepada UPTD. Informasi yang terdapat pada UPTD kemudian disalurkan ke PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) Pak Murdoso, dari UPTD juga dapat langsung menyalurkan informasinya ke Pak Pengurus Gapoktan. Informasi yang terdapat pada Pak Murdoso selaku PPL disalurkan kepada Pengurus Gapoktan di sini terjadi hubungan timbal balik informasi, karena terkadang Pengurus Gapoktan mendapat informasi lebih dulu dari UPTD maka Pengurus Gapoktan juga dapat menyalurkan informasi tersebut kepada Pak

Murdoso. PPL juga menyalurkan informasi kepada Pengurus Poktan dan juga anggota Gapoktan. Informasi yang terdapat pada Pengurus Gapoktan yaitu di salurkan kepada pengurus Poktan dan juga kepada anggota.

Dari alur tersebut lebih dominan pada jaringan komunikasi formal ke bawah. Informasi yang terdapat pada pengurus Poktan, biasanya informasi yang disalurkan tersebut mengenai program PUAP ataupun bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Tanda panah titik menunjukkan mengenai hubungan simpan pinjam terkait program PUAP, yaitu pengurus Poktan selaku penyalur dan pengelola ke anggota berinteraksi langsung kepada peminjam.

Dari pembahasan di atas maka keberadaan jaringan yang meliputi basis jaringan dan interaksi sangat penting dalam perolehan pinjaman. Hal tersebut dikarenakan jaringan merupakan bagian modal sosial yang kedudukannya sebagai katalis dalam pengelolaan dana PUAP. Pada jaringan komunikasi informal maupun informal turut andil dalam perkembangan Gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP. Keberadaan jaringan yang sangat terlihat terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi.

5.2.3. Norma

Menurut Hasbullah (2006), norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Norma merupakan fenomena yang subyektif dan meliputi suatu aturan yang sangat kompleks yang mengikat pada masing-masing anggota dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, sehingga mereka dapat saling percaya dan mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma mampu menjadi

sebuah komitmen atau kesepakatan dan panutan hidup dalam bermasyarakat yang berpengaruh pada sikap dan tingkah laku warga masyarakat tersebut. Norma tidaklah muncul secara tiba-tiba dan bersifat periodik, melainkan terbangun dengan sebuah perjalanan waktu dan pengalaman berbagai fenomena dan interaksi sosial dalam bermasyarakat yang akhirnya mampu menjadi sebuah aturan yang terinstitusionalisasi dengan kuat dalam sebuah komunitas. Pelanggaran terhadap norma inipun memberikan konsekuensi sanksi sosial (*social punishment*) yang seringkali dirasakan lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh sebuah lembaga berlegalitas hukum (*legal punishment*). Hal ini disebabkan adanya internalitas dan cara pandang masyarakat menyikapi terhadap hal tersebut.

Menurut Harrison (2006), mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang mengingkari bahwa tatanan sosial seringkali diciptakan secara hierarkis. Tetapi ini berguna untuk melihat bahwa tatanan dapat muncul dari sebuah spektrum sumber-sumber yang terentang dari tipe kekuasaan hierarkis dan terpusat sampai interaksi individual yang sepenuhnya tidak terpusat dan spontan. Hal tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.10 Rangkaian Kesatuan Norma (Sumber: Harrison, 2006)

Norma-norma yang diciptakan secara spontan, cenderung informal artinya norma-norma itu tidak ditulis dan diumumkan, sedangkan norma-norma dan nilai-nilai yang diciptakan oleh sumber kekuasaan hierarkis cenderung berbentuk hukum tertulis, undang-undang dasar, peraturan-peraturan, teks-teks suci, atau grafik organisasi yang birokratis. Apa yang disebut Douglas sebagai sebuah “institusi” adalah norma atau aturan baik formal maupun informal, yang mengatur interaksi sosial manusia.

Norma selalu ada pada setiap tempat atau komunitas, seperti halnya pada Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo dan Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo terdapat norma yang menjadi tuntunan dalam setiap kegiatan Gapoktan. Pada setiap Gapoktan mempunyai norma yang berbeda atau aturan-aturan yang berbeda, perbedaan itu disesuaikan dengan keadaan keorganisasi itu sendiri dan hubungan antar anggotanya. Terkait dengan adanya Program PUAP, maka setiap Gapoktan mempunyai norma-norma atau aturan-aturan yang berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PUAP. Berikut macam-macam norma yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

5.2.3.1 Macam-macam Norma

Para responden di Gapoktan Mulyo Abadi mengatakan salah satu syarat untuk melakukan pemanfaatan dana PUAP yang berupa pinjaman adalah dengan “menjadi anggota terlebih dahulu”, norma ini tergolong dalam norma informal atau tidak tertulis karena tidak ada syarat peminjaman untuk menjadi anggota dulu baru boleh meminjam, namun cara untuk menjadi anggota ada secara tertulis dan digolongkan dalam norma formal. Adapun cara menjadi anggota perlu memenuhi kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

- a. menyerahkan foto kopi KTP
- b. membayar simpanan pokok di Gapoktan sebesar Rp 25.000
- c. dan menabung di Gapoktan sebesar Rp1.000 perbulan

Dengan melengkapi segala hal di atas maka anggota mendapatkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan menjadi anggota Gapoktan, maka setelah itu anggota berhak untuk memperoleh pinjaman dana PUAP.

Dalam memperoleh pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi terdapat juga ketentuan dalam setiap melakukan peminjaman antara lain:

- a. Selain setelah menjadi anggota Gapoktan dengan mempunyai kartu anggota
- b. Maka anggota dapat melakukan pengajuan pinjaman sebesar Rp300-800 ribu per orang atau sesuai kebutuhan (hal ini tidak ada secara tertulis maka merupakan norma informal) dan

- c. Dikenakan bunga sebesar 2,5% dari pinjaman.
- d. Dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan yaitu setelah panen (petani padi: 4 bulan, petani jeruk: 6 bulan, dan para pedagang mikro: 1 bulan) (hal ini tidak ada secara tertulis maka termasuk dalam norma informal).

Mengenai aturan peminjaman yang terdapat pada Gapoktan Karya Tani adalah:

- a. Telah tergabung dalam anggota Poktan dan
- b. Aktif dalam kegiatan Poktan tanpa harus mempunyai kartu anggota karena pada Gapoktan Karya Tani, dana PUAP dikelola oleh Poktan sehingga yang menjadi ketentuan aktif adalah pada kelompok,
- c. Kemudian anggota dapat mengajukan pinjaman sekitar Rp 300-500 ribu perorang atau sesuai kebutuhan (tidak ada secara tertulis maka termasuk norma informal).
- d. Dikenakan bunga sebesar 1,5% dari pinjaman.
- e. Dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan yaitu setelah panen (petani padi: 4 bulan, petani jeruk: 6 bulan, dan para pedagang mikro: 1 bulan) (tidak ada secara tertulis maka termasuk norma informal).

Sebenarnya aturan yang terdapat di atas tidak sepenuhnya ada secara tertulis, itulah yang disebut norma informal. Sedangkan norma yang secara tertulis merupakan norma formal. Adanya aturan/norma tersebut diharapkan segala proses keorganisasian dapat berjalan lancar.

5.2.3.2 Norma pada Gapoktan

Membahas tentang penyimpangan norma yang membuat terhambatnya pengembangan contohnya dapat dilihat pada setiap Gapoktan yang mempunyai agenda kerja rutin yang salah satunya adalah pertemuan rutin. Para responden secara keseluruhan yang tergabung dalam Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani menjawab “rutin dalam mengikuti kegiatan pertemuan Gapoktan”. Apabila tidak mengikuti pertemuan rutin tersebut maka terdapat sanksi yang diterapkan di Gapoktan Mulyo Abadi yaitu bantuan tidak diberikan, karena bantuan diberikan pada saat pertemuan berlangsung. Sedangkan pada Gapoktan Karya Tani apabila

tidak mengikuti pertemuan rutin hanya dikenakan sanksi teguran saja. Di sinilah terdapat perbedaan aturan, pada Gapoktan Karya Tani aturan yang diterapkan cukup ringan sehingga cenderung para anggota menyepelkan kehadiran pada saat pertemuan, berbeda pada anggota di Gapoktan Mulyo Abadi yang cukup membuat anggota mau tidak mau untuk hadir dalam pertemuan dan hal tersebut juga demi keuntungan anggota itu sendiri. Dengan tidak mengikuti pertemuan rutin maka terjadi penyimpangan norma.

Contoh lain terkait pada kegiatan peminjaman, terdapat sanksi apabila terlambat dalam pengembalian seperti pada Gapoktan Mulyo Abadi apabila terlambat dalam pengembalian maka sanksi pertama adalah berupa “teguran” namun apabila teguran itu tidak dihiraukan maka tindakan berikutnya yaitu “nominal pinjaman dikurangi, ancaman tidak dipinjamkan lagi, tidak diberi pinjaman lagi, denda, atau penambahan uang pinjaman” disesuaikan dengan keadaan peminjam saat itu. Seperti apa yang dituturkan oleh ketua Gapoktan dan beberapa anggota, Ketua Gapoktan (Margo Santoso) mengatakan:

“Di kasih teguran dulu, trus di panggil kalau tetap gak ngembalikan maka tidak dipinjamkan lagi, kalau mau minjemkan dipikir-pikir dulu buat kasih pinjaman”.

Namun berbeda sanksi yang diberikan oleh Gapoktan Karya Tani yaitu hanya diberi “teguran saja”, sesuai dengan yang dituturkan beberapa anggota Gapoktan, salah satunya Muhammad Yasin mengatakan:

“Diberi keringanan waktu setelah ada teguran”

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pengembalian pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi pada tabel 5.11 sedangkan pada Gapoktan Karya Tani pada tabel 5.12. Pada tabel pengembalian ini dapat dilihat adanya ketegasan aturan berdampak pada kelancaran pengembalian. Pengembalian pinjaman terdapat dua hal yang sering dijumpai yaitu pengembalian tepat waktu atau yang dapat dikatakan lancar dan tidak tepat waktu atau dapat dikatakan kurang lancar. Pengembalian pinjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi sebagian besar berjalan lancar dalam artian tepat waktu. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.11 sebagai berikut:

Tabel 5.11 Pengembalian Pinjaman Oleh Informan pada Gapoktan Mulyo Abadi Tahun 2012

| No | Sampel anggota Gapoktan Mulyo Abadi | Pengembalian | |
|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| | | Lancar | Kurang Lancar |
| 1 | Margo Santoso | V | |
| 2 | Menik | V | |
| 3 | Lilik Lestari | V | |
| 4 | Agus W | V | |
| 5 | Rohman Saleh | | V |
| 6 | Jamari | | V |
| 7 | Anggie Putra | V | |
| 8 | Suci Kristianti | V | |
| 9 | Rohiem | | V |
| 10 | Fajar Adi | V | |
| Jumlah | | 7 | 3 |
| Presentase | | 70% | 30% |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Tabel 5.11 memperlihatkan bahwa dari 10 informan, sebanyak 70% diantaranya lancar dalam pengembalian dan 30% kurang lancar. Kurang lancar artinya tidak melunasi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Lilik selaku pekerja yang menangani peminjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi, penyebab kurang lancarnya pengembalian tersebut diantaranya :

1. Gagal panen
2. Menganggap dana tersebut adalah hibah/bantuan lepas
3. Dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak

Dari 10 informan, yang tidak lancar dalam pengembalian ada sebanyak 3 informan. Namun meskipun 3 orang informan tersebut terlambat dalam pengembaliannya, mereka tetap berusaha untuk melunasi pinjaman tersebut. Sebab dari kurang lancarnya pengembalian oleh 3 orang tersebut dikarenakan adanya hama wereng sehingga mengakibatkan gagal panen. Pengembalian pinjaman ini diharapkan 100% karena keberhasilan program PUAP ini sangat ditentukan oleh tersedianya dana pendukung. Hal ini harus dipahami oleh seluruh anggota yang meminjam, bahwa tanpa dukungan dana maka program PUAP tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Diluar dari data responden di atas sebagai informan, ketika peneliti mengadakan observasi pada Gapoktan Mulyo Abadi pada tanggal 15 Oktober 2012 seorang peminjam berasal dari Poktan Sidomulyo mengembalikan pinjaman sebesar Rp 184.500,- beserta bunga yang dipinjam pada tanggal 15 September 2012 dan jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2012, dapat dikatakan Bu Gondo mengembalikan pinjaman tepat waktu sebelum jatuh tempo. Ketika pinjaman tersebut dikembalikan, Lilik segera mencatat pada beberapa buku diantaranya pada Kas Harian, bukti pada buku pelunasan yang dimiliki khusus Gapoktan dan yang dimiliki anggota, serta melakukan tanda tangan bahwa pinjaman telah lunas.

Berbeda halnya pada Gapoktan Karya Tani, pada tabel pengembalian ini dapat dilihat adanya ketidaktegasan aturan berdampak pada kelancaran pengembalian. Pengembalian pinjaman pada Gapoktan Karya Tani sebagian besar berjalan tidak lancar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.12 sebagai berikut:

Tabel 5.12 Pengembalian Pinjaman Oleh Informan pada Gapoktan Karya Tani Tahun 2012

| No | Sampel anggota Gapoktan Karya Tani | Pengembalian | |
|------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| | | Lancar | Kurang Lancar |
| 1 | Muh. Badjuri | V | |
| 2 | H. Ahmad Khoiri | V | |
| 3 | Muhammad Yasin | | V |
| 4 | Supomo | | V |
| 5 | Rofi | | V |
| 6 | Sudarto | | V |
| 7 | Mujadi | | V |
| 8 | Nurrofiq | | V |
| 9 | Juwari | | V |
| 10 | H. Minarno | V | |
| 11 | Ahmad Munib | | V |
| 12 | Imam Sulaji | | V |
| 13 | H. Edi | V | |
| 14 | Sunarto | | V |
| 15 | H. Mustain | V | |
| Jumlah | | 5 | 10 |
| Presentase | | 33,3% | 66,6% |

Sumber: Data Primer, diolah (2012).

Tabel 5.12 memperlihatkan bahwa dari 15 informan, sebanyak 33,3% diantaranya lancar dalam pengembalian dan 66,6% kurang lancar. Kurang lancar artinya tidak melunasi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan

wawancara dengan Pak Badjuri selaku ketua Gapoktan yang menangani, mengelola dan menyalurkan peminjaman pada Gapoktan Mulyo Abadi, penyebab kurang lancarnya pengembalian tersebut diantaranya :

1. Gagal panen
2. Mengganggag dana tersebut adalah hibah/bantuan lepas
3. Dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak

Pengurus pada Gapoktan Karya Tani belum menegakkan aturan yang telah disepakati seperti pengembalian yang telah ditentukan jatuh temponya dengan peringatan berupa teguran saja, sehingga para peminjam cenderung mnyepelekan dalam pengembaliannya, dari 15 informan, yang tidak lancar dalam pengembalian ada sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dari 10 orang tersebut dikarenakan adanya hama wereng sehingga mengakibatkan gagal panen. Didukung dengan adanya hubungan kekerabatan yang menyepelekan norma-norma yang telah ditetapkan dan sanksi yang diberikan karena hubungan kekerabatan tersebut sangat ringan yaitu hanya berupa teguran saja.

Berdasarkan dari tabel 5.11 dan tabel 5.12 dapat disimpulkan bahwa apabila memiliki sanksi yang tegas serta patuh pada norma tertulis maupun tidak tertulis maka sebagian besar anggota akan tertib dalam pengembaliannya seperti yang terjadi pada Gapoktan Mulyo Abadi. Apabila memiliki sanksi yang tidak tegas dan tidak adanya kesadaran akan norma maka dalam pengembaliannya seperti yang terjadi pada Gapoktan Karya Tani yaitu kuran lancar. Hal ini berdampak pada perkembangan Gapoktan apakah sesuai harapan seperti yang terdapat pada Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo ataukah tidak sesuai harapan seperti pada Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo.

Adapun prosedur pengembalian pinjaman pada gapoktan Mulyo Abadi adalah membayar setelah panen dengan bunga 2,5% yang diserahkan kepada sekretaris Gapoktan yaitu Lilik, sedangkan pada Gapoktan Karya Tani membayar setelah panen dengan bunganya sebesar 1,5% dengan meyerahkan lewat Poktan. Dan pada kedua Gapoktan terdapat keringanan apabila terjadi gagal panen maka pinjaman dapat diangsur atau dapat membayar pokoknya saja atau bahkan membayar bunganya saja. Terdapat perbedaan besarnya bunga yang dibebankan,

pada Gapoktan Mulyo Abadi lebih besar bunganya daripada Gapoktan Karya Tani namun dalam pengembaliannya lebih terkontrol pada Gapoktan Mulyo Abadi. Menurut pengamatan di lapang hal tersebut terjadi tergantung pada cara pengelolaan dan membangun kepercayaan seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Melihat dari paparan di atas dan hasil analisis data di lapang mengenai modal sosial secara keseluruhan yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma sosial maka dapat diambil sebuah fenomena yang sangat menarik yaitu bahwa yang berhubungan dengan uang yaitu di sini berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana PUAP bahwasanya yang sangat berperan adalah norma atau aturan, semakin tegasnya sebuah aturan maka semakin terkondisionalnya keorganisasian berjalan dengan yang diharapkan sebab anggota menjadi tidak meremehkan sesuatu yang telah dipertanggung jawabkan olehnya, dan sebaliknya aturan yang tidak tegas maka anggota cenderung menyepelekan aturan yang ada dan hal tersebut akan menghambat jalannya keorganisasian.

Modal sosial merupakan hal yang penting dalam membentuk suatu kerjasama, baik itu kerjasama dalam aspek ekonomi, sosial, politik maupun aspek-aspek lainnya. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani bukan semata-mata merupakan pemberian karena adanya dana PUAP yang bertujuan sebagai penyedia modal namun pinjaman diberikan ada hal khusus yang menyebabkan pihak Gapoktan bersedia memberikan pinjaman kepada anggota, sebab dengan banyaknya anggota dan dengan dana PUAP yang hanya Rp 100.000.000 maka tidak semua anggota mendapatkan kesempatan pinjaman. Dalam hal ini faktor pertimbangan tersebut dilihat dari modal sosial yang terdapat pada anggota yang tergabung dalam Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani.

5.3 Strategi Pengembangan Pengelolaan Dana PUAP di Desa Sidorejo dan Desa Kecamatan Umbulsari Jember

Upaya pengembangan dalam pengelolaan dana PUAP memadukan beberapa faktor yang terdiri dari faktor pendorong dan penghambat. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan untuk perkembangan Program PUAP di masa mendatang. Setiap kegiatan dalam usaha pengembangan program yang dikhususkan dalam pengelolaannya harus dapat mengetahui faktor pendorongnya dan dapat mengoptimalkan faktor tersebut, sehingga pengelolaan tersebut dapat lebih berkembang. Para pengurus di Gapoktan juga harus memperhatikan faktor penghambat yang dimiliki dan sebisa mungkin meminimalkan faktor penghambat tersebut. Berbagai faktor penghambat yang muncul hendaknya telah diprediksi keberadaannya, sehingga dapat dipersiapkan strategi untuk meminimalkan efek yang ditimbulkan oleh berbagai hambatan dalam pengelolaan tersebut.

5.3.1 Desa Sidorejo Pada Gapoktan Mulyo Abadi

Strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP dapat diketahui dengan menganalisis faktor pendorong dan penghambat menggunakan alat analisis yang bernama analisis medan kekuatan atau FFA (*Force Field Analysis*). FFA (*Force Field Analysis*) merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam merencanakan perubahan berdasarkan adanya faktor pendorong dan penghambat. Hasil dari analisis FFA akan memunculkan sebuah strategi yang meminimalisasi faktor penghambat dengan mengoptimalkan faktor pendorong ke arah tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan pada hasil wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan 'para expert' (tim ahli), terdapat lima faktor pendorong dan lima faktor penghambat yang terdapat pada pengelolaan dana PUAP. Setiap Gapoktan yang berada di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo mempunyai cara pengelolaan dan faktor pendorong serta faktor penghambat yang berbeda. Penjelasan terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP Di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

| NO | FAKTOR PENDORONG | NO | FAKTOR PENGHAMBAT |
|----|----------------------------------|----|---|
| D1 | Gapoktan memiliki badan hukum | H1 | Terbatasnya modal pinjaman |
| D2 | Mempunyai fasilitas pinjaman | H2 | Tidak maksimalnya dukungan pemerintah setempat |
| D3 | Memiliki Program Jangka Panjang | H3 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu |
| D4 | Adanya pelatihan | H4 | Pengurus Gapoktan tidak aktif |
| D5 | Sanksi yang tegas kepada anggota | H5 | Fungsi kontrol pengawas kurang efektif |

Faktor pendorong pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang menjadi kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*). Faktor-faktor tersebut nantinya akan ditentukan menjadi kekuatan kunci keberhasilan dalam perkembangan pengelolaan dana di Desa Sidorejo. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Gapoktan Memiliki Badan Hukum

Pada Desa Sidorejo terdapat Gapoktan Mulyo Abadi, Gapoktan Mulyo Abadi berbadan hukum. Badan hukum merupakan suatu hal yang utama bagi sebuah lembaga, tanpa memiliki badan hukum yang sah maka sebuah lembaga tersebut dapat diragukan keberadaannya. Badan hukum yang ada ini tentunya akan sangat berguna bagi lembaga tersebut untuk dapat melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar (hubungan *eksternal*). Hal tersebut dituturkan oleh para informan dan dipertegas oleh PPL yaitu Bu Dwi yang berperan dalam pengurusan Gapoktan untuk memperoleh pengakuan yang resmi dan berbadan hukum dan membantu Ketua Gapoktan yaitu Pak Margo dalam mengurusnya. Dengan adanya kepemilikan badan hukum tersebut maka telah terdaftar pada di Dinas Pertanian, sehingga apapun bantuan dari pemerintah dapat menjadi salah satu yang diutamakan dan diharapkan tidak terlewat dari daftar Gapoktan yang menerima bantuan.

2. Mempunyai Fasilitas

Secara umum fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan sesuatu, di sini fasilitas yang dimaksud pada

Gapoktan Mulyo Abadi adalah kantor Gapoktan yang dijadikan tempat untuk menjalankan transaksi simpan pinjam dan fasilitas pinjaman modal yang diberikan Gapoktan dapat berupa uang ataupun pinjaman dalam bentuk saprodi. Adanya fasilitas ini dapat memudahkan petani anggota dalam menjalankan usaha pertanian. Kantor Gapoktan Mulyo Abadi bergerak sesuai fungsinya, yaitu menjadi pusat kegiatan poktan-poktan.

3. Terdapat Program Jangka Panjang

Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya tentunya berdasarkan pada program kerja yang dimiliki. Program kerja tersebut adalah program jangka panjang yaitu sesuai dengan penuturan ketua Gapoktan (Pak Margo) yang mengatakan “akan menjadi LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang mandiri” hal tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah terhadap program PUAP.

4. Adanya pelatihan

Pelatihan yang dilakukan oleh Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo terkait program PUAP adalah dalam bentuk pertemuan. Kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan adalah memberikan pengarahan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan cara peminjaman dana PUAP, sehingga diharapkan para anggota lebih mengerti tentang tujuan dan maksud sebenarnya program PUAP, yaitu dapat dijadikan LKMA yang berfungsi sebagai penyedia modal bagi petani, sehingga di dalam pertemuan tersebut dihimbau dalam pengembalian agar tidak terlambat dalam pengembalian.

5. Sanksi yang tegas

Pada Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo diterapkan sanksi yang tegas kepada anggota. Contohnya apabila tidak mengikuti pertemuan maka tidak diberikannya bantuan yang berasal dari pemerintah melalui Dinas Pertanian yang kemudian disalurkan ke Gapoktan. Sanksi lainnya adalah apabila terlambat mengembalikan dan telah diperingati dengan surat teguran maupun lesan maka anggota tidak dapat meminjam lagi, atau sesuai dengan penuturan PPL (Bu Dwi), “bahwasanya yang terlambat mengembalikan dikenakan denda 10% dari bunga yang ditanggung. Hal ini sebenarnya demi

kepentingan bersama agar para anggota mendapatkan bantuan pada saat pertemuan dan dana dapat bergulir dengan mengembalikan pinjaman tepat waktu, sehingga meratanya manfaat yang dirasakan adanya dana PUAP.

Selain kekuatan, tingkat kelemahan juga harus diminimalisasi agar kekuatan tersebut bisa maksimal. Faktor penghambat pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo dapat didefinisikan sebagai kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treths*). Faktor penghambat ini nantinya akan ditentukan sebagai penghambat kunci yang harus diminimalisasi demi tercapainya tujuan pengembangan pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo. Faktor-faktor penghambat pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo antara lain:

1. Terbatasnya modal pinjaman

Modal merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu usaha. Apabila dalam pemenuhan modal terdapat kendala, maka akan mempengaruhi jalannya suatu usaha. Hal tersebut dialami oleh Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo. Kebutuhan modal untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk meminjam tidak semuanya dapat terpenuhi, sehingga para anggota merasa kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan taninya. Pada saat modal tersebut dirasa kurang, maka para petani anggota menyiasatinya dengan meminjam ke Gapoktan berupa saprodi, setelah panen maka peminjaman tersebut dikembalikan berupa uang seharga saprodi tersebut yang dipinjam.

2. Tidak maksimalnya dukungan dari pemerintah setempat

Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan bagi kelancaran suatu program dengan harapan tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Dukungan pemerintah pada Program PUAP masih dirasa belum maksimal khususnya dalam hal dukungan secara moril yaitu suatu hubungan baik. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan dari pihak perangkat desa, karena biasanya dana bantuan pemerintah yang masuk diatur oleh desa, namun kini langsung mengucur ke Gapoktan.

3. Lemahnya kesadaran pengembalian tepat waktu

Sepertinya merupakan masalah yang umum apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan uang yaitu yang berupa pinjaman akan sangat sulit dalam

pengembaliannya. Maka Gapoktan Mulyo Abadi beberapa anggotanya memiliki kesadaran yang rendah dalam pengembalian pinjaman dengan tepat waktu, hal ini sesuai dengan penuturan sekretaris Gapoktan (Lilik) yang mengurus segala hal tentang PUAP mengatakan “para peminjam apabila belum diberikan teguran tentang waktu pengembalian maka jarang ada yang sadar mengembalikan tepat waktu, pada hal dana pinjaman tersebut juga bergantian dengan yang lainnya”. Kondisi tersebut dapat menyulitkan dalam pengelolaan dana PUAP.

4. Pengurus Gapoktan tidak aktif

Secara Juknis petunjuk teknis Dinas Pertanian, bahwasanya yang mengelola dana PUAP adalah Gapoktan dengan pengurus yang menjadi pengelolanya, namun kenyataan yang terjadi para pengurus di Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo tidak dapat mengurus segala hal tentang PUAP, sehingga mempekerjakan seseorang yaitu Lilik yang biasanya para anggota menyebutnya Sekretaris Gapoktan untuk mengurus segala kepentingan pengelolaan yang berkaitan dengan PUAP.

5. Fungsi kontrol pengawas kurang efektif

Pengawas yang berada di Gapoktan Mulyo Abadi di sini yang dimaksud adalah PPL (Bu Dwi), kurang efektif dalam pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap para pengurus yang tidak ikut dalam pengelolaan dana PUAP dengan tidak diberikan teguran atau semacam peringatan.

Identifikasi dilanjutkan pada penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat pada pengelolaan dana di Desa Sidorejo, identifikasi tersebut akan menghasilkan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam merumuskan strategi. Penilaian yang dilakukan pada proses analisis FFA ini merupakan penilaian kualitatif yang dikuantifikasikan dengan skala nilai 1-5. Penilaian tersebut melalui proses jajak pendapat (*brainstorming*) dari para informan yang memiliki pemahaman yang besar terhadap Program PUAP. Hasil penilaian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berdasarkan hasil analisa FFA mengenai penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat seperti pada tabel evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat, maka dapat diketahui nilai dari Total Nilai Bobot (TNB) masing-masing faktor. Berdasarkan nilai TNB tersebut maka dapat ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo yaitu dengan cara melihat nilai TNB yang terbesar. Faktor kunci keberhasilan (FKK) terbagi menjadi dua, yaitu FKK pendorong dan FKK penghambat.

Tabel 5.14. Evaluasi Faktor Pendorong Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi Di Desa Sidorejo

| No | Faktor Pendorong | BF | ND | NBD | NRK | NBK | TNB | FKK |
|--------------|---------------------------------|------|----|------|------|------|-------------|-----|
| D1 | Memiliki badan hukum | 0.14 | 5 | 0.7 | 3.67 | 0.53 | 1.23 | |
| D2 | Mempunyai fasilitas | 0.21 | 4 | 0.8 | 3.56 | 0.77 | 1.57 | |
| D3 | Terdapat program Jangka Panjang | 0.21 | 5 | 1.05 | 3.56 | 0.77 | 1.82 | *1 |
| D4 | Adanya pelatihan | 0.21 | 4 | 0.8 | 3.23 | 0.7 | 1.5 | |
| D5 | Sanksi yang tegas | 0.21 | 4 | 0.8 | 3.45 | 0.74 | 1.54 | |
| Total | | | | | | | 7.66 | |

*) : prioritas (FKK)

Sumber: Data Primer, diolah (2012)

Keterangan:

BF : Bobot Faktor

ND : Nilai Dukungan

NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan

NBD : Nilai Bobot Dukungan

NBK : Nilai Bobot Keterkaitan

TNB : Total Nilai Bobot

FKK : Faktor Kunci Keberhasilan

Pada Tabel 5.14 dapat diketahui FKK pendorong, yaitu faktor D3 (Terdapat Program Jangka Panjang) dengan nilai urgensi faktor sebesar 1,82. Terdapatnya program jangka panjang yaitu berupa usaha untuk menjadi LKMA yang mandiri merupakan suatu usaha yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui adanya Program PUAP, sehingga hal tersebut berdampak positif pada Gapoktan untuk lebih dapatnya memperbaiki sistem pengelolaan dana PUAP agar lebih berkembang dan terwujudnya LKMA yang mandiri sesuai dengan program kerja jangka panjang.

Tabel 5.15 Evaluasi Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi Di Desa Sidorejo

| No | Faktor Penghambat | BF | ND | NBD | NRK | NBK | TNB | FKK |
|----|--|------|----|-----|------|------|-------------|-----|
| H1 | Terbatasnya modal pinjaman | 0.21 | 4 | 0.9 | 3.44 | 0.74 | 1.59 | |
| H2 | Tidak maksimalnya dukungan pemerintah setempat | 0.29 | 3 | 0.9 | 3.67 | 1.05 | 1.9 | *1 |
| H3 | Lemahnya kesadaran pengembalian tepat waktu | 0.14 | 3 | 0.4 | 3.33 | 0.48 | 0.9 | |
| H4 | Pengurus Gapoktan tidak aktif | 0.21 | 3 | 0.6 | 3.55 | 0.76 | 1.4 | |
| H5 | Fungsi kontrol pengawas kurang efektif | 0.14 | 3 | 0.4 | 3.44 | 0.49 | 0.92 | |
| | Total | | | | | | 6.71 | |

*) : prioritas FKK

Sumber: Data Primer, diolah (2012)

Keterangan:

BF : Bobot Faktor

ND : Nilai Dukungan

NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan

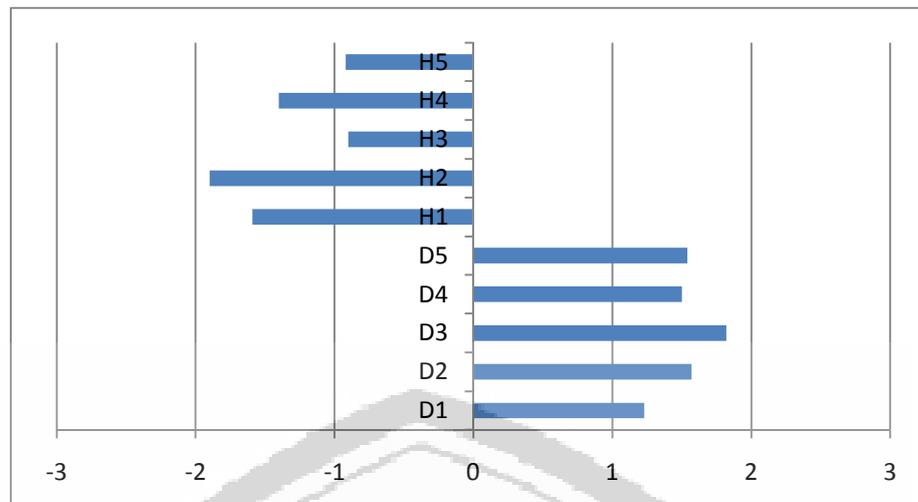
NBD : Nilai Bobot Dukungan

NBK : Nilai Bobot Keterkaitan

TNB : Total Nilai Bobot

FKK : Faktor Kunci Keberhasilan

Pada Tabel 5.15 dapat diketahui juga FKK penghambat pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo, yaitu faktor H2 (Tidak maksimalnya dukungan pemerintah setempat) dengan nilai urgensi faktor sebesar 1,9. Upaya mewujudkan pengembangan dana PUAP perlu menyinergikan antar beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu program, pihak tersebut terdiri dari petani anggota Gapoktan sebagai sasaran pengguna program, pengurus Gapoktan sebagai pengelola program, PPL sebagai pendamping dan pemerintah daerah setempat sebagai pengontrol. Tujuan suatu program dapat terpenuhi secara optimal apabila pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama dengan baik, namun keberadaan PUAP yang diarahkan pada tercukupinya kebutuhan modal usaha tani di Desa Sidorejo belum memenuhi tujuannya secara optimal karena pihak pemerintah setempat kurang mendukung dalam kegiatan tersebut. Keadaan tersebut dikarenakan pada saat adanya PUAP, terdapat masalah intern antar perangkat di Desa Sidorejo dengan pihak Gapoktan.



Gambar 5.11 Medan Kekuatan Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi di Desa Sidorejo

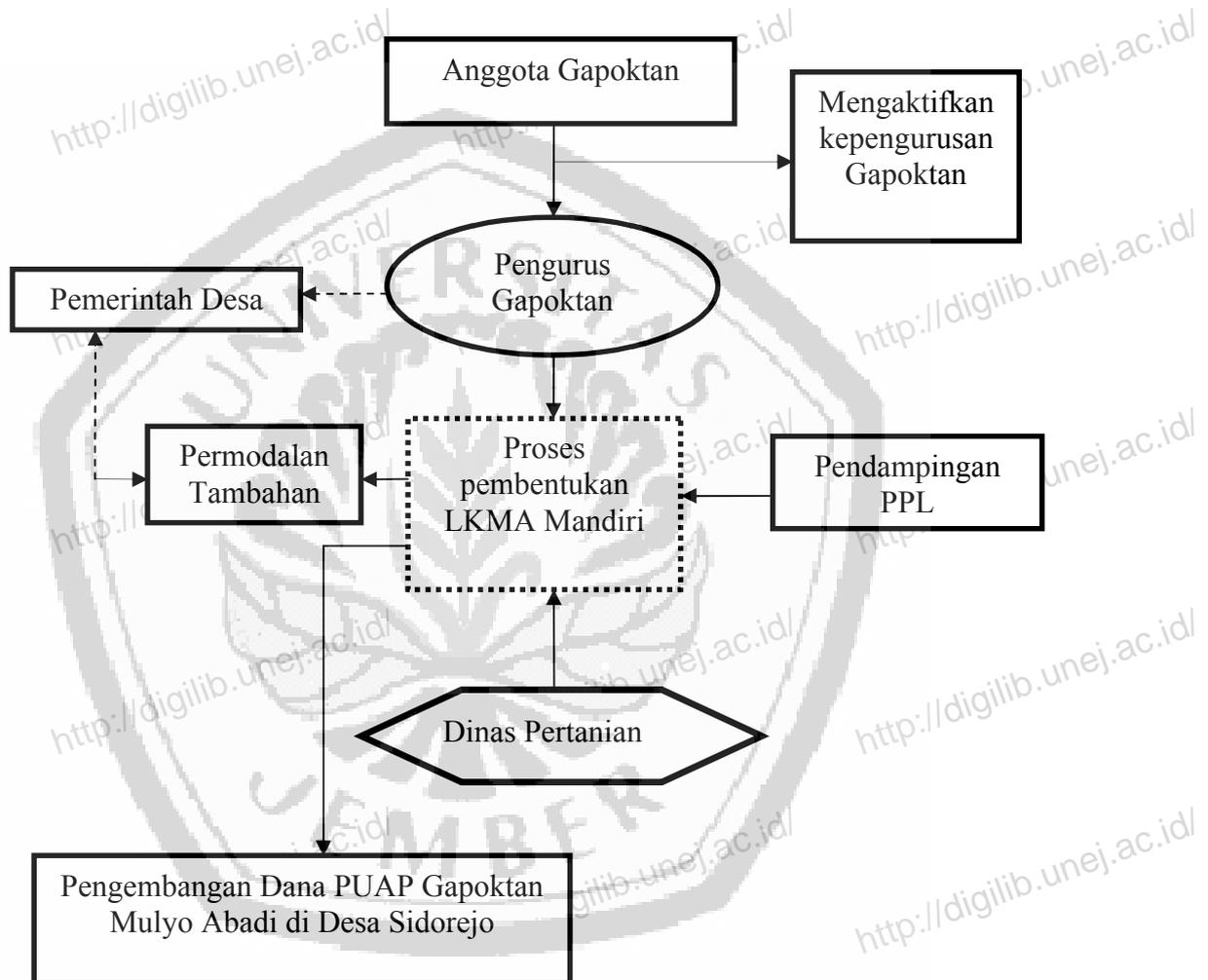
Berdasarkan gambar 5.11 maka dapat diketahui arah dan nilai masing-masing faktor pendorong maupun faktor penghambat pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo. Panjang anak panah menyatakan besarnya TNB dari masing-masing faktor sedangkan arah anak panah merupakan tarik menarik antara faktor penghambat dan faktor pendorong. Jumlah seluruh nilai TNB pendorong sebesar 7,66 sedangkan jumlah seluruh nilai TNB penghambat sebesar 6,71. TNB pendorong lebih besar daripada TNB penghambat. Berdasarkan nilai medan kekuatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo memiliki peluang dan prospek untuk dikembangkan di Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo.

Selanjutnya, setelah diketahui arah pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo merumuskan strategi yang sesuai dengan hasil FKK. Strategi ini merupakan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui strategi yang sesuai, pengelolaan dana di Desa Sidorejo nantinya juga akan berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil analisa FFA di atas, maka strategi yang paling efektif adalah dengan menghilangkan atau meminimalisasi hambatan kunci dan optimalisasi pendorong kunci ke arah tujuan yang akan dicapai. Pendekatan yang demikian ini merupakan pendekatan strategi fokus.

Strategi fokus pada hasil analisa FFA sesuai pada gambar 5.11 dapat dirumuskan bahwa kekuatan atau pendorong kunci yang telah dipilih difokuskan ke arah tujuan yang telah ditetapkan yaitu pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo. FKK pendorong yang terpilih adalah terdapatnya program jangka panjang, fokusnya adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan dengan cara mengaktifkan kembali para pengurus ke dalam kepengurusan agar ikut serta dalam pengelolaan dana PUAP sehingga LKMA dapat terwujud serta adanya pendampingan yang lebih intensif oleh PPL. Sedangkan untuk FKK penghambat yaitu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah setempat, fokusnya adalah kesadaran dan perhatian dari pihak perangkat desa terhadap adanya program PUAP. Diharapkan perangkat desa menghilangkan sifat untuk menguasai segala bantuan pemerintah yang berupa program-program terutama dalam bentuk uang. Sehingga antara pemerintah setempat yaitu perangkat desa dengan Gapoktan dapat bekerja sama dalam menyejahterakan petani dan ikut menyukseskan program pemerintah. Pemerintah setempat yaitu perangkat desa dapat dijadikan pengontrol suatu program dan dapat ikut membantu dalam permodalan yang kurang. Kesadaran pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui program seharusnya lebih ditingkatkan, karena selama ini beberapa pihak pemerintah masih mementingkan ego atau kepentingan diri sendiri sehingga sesuatu yang telah dipersiapkan sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik, selain itu tim petugas teknis dari Dinas Pertanian sebagai pengawas diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam hubungan sosial antar perangkat Desa dengan pihak Gapoktan agar program dapat berjalan optimal.

Penyusunan strategi ini harus memperhatikan kesesuaian arah optimalisasi pendorong kunci ke arah perbaikan penghambat kunci. Artinya jika pendorong kunci dan penghambat kunci yang dipilih lebih dari satu, maka penyusunan strategi harus memperhatikan kesesuaian perpaduan masing-masing faktor untuk menuju tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan evaluasi hasil perhitungan faktor pendorong dan faktor penghambat, diperoleh masing-masing satu pendorong kunci dan penghambat kunci. Strategi fokus yang diperoleh berdasarkan FKK

pendorong dan FKK penghambat yang telah dipilih dengan cara menyinergikan antara beberapa pihak yang terkait dan dapat membantu perwujudan pengembangan dana PUAP. Pihak-pihak tersebut terdiri dari petani anggota Gapoktan, Pengurus Gapoktan, PPL, dan pemerintah setempat (perangkat desa) serta . Alur perwujudan strategi fokus pengelolaan dana PUAP pada gambar 5.12



Gambar 5.12 Skema Strategi Fokus Usaha Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi Desa Sidorejo

Berdasarkan gambar 5.12 penyusunan strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo berupa adanya sinergi antara beberapa pihak yang terkait dan dapat membantu perwujudan dana PUAP yang berkembang. Pihak-pihak tersebut terdiri dari anggota Gapoktan, pengurus Gapoktan, pemerintah desa (perangkat desa), PPL dan Dinas Pertanian. Melalui strategi tersebut, anggota

Gapoktan diharapkan menyuarakan aspirasinya melalui pengurus Gapoktan Mulyo Abadi. Setelah semua aspirasi anggota terkumpul, Gapoktan berkoordinasi dengan PPL untuk berdiskusi, dalam hal ini fungsi PPL desa Sidorejo adalah sebagai fasilitator dan pembina sehingga tidak berhak mengintervensi anggota Gapoktan kemudian dapat memberikan petunjuk mengenai cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyampaikan aspirasi para petani di Desa Sidorejo kepada Dinas Pertanian. Dan bagi perangkat desa di Desa Sidorejo hanya sebagai kontrol dan penasehat mengarahkan Gapoktan ke arah yang baik.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Dinas Pertanian karena Dinas Pertanian berwenang dalam hal pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan petani. Perlu adanya kontrak kesepakatan antara Gapoktan dan Dinas Pertanian untuk merealisasikan kebutuhan petani, dalam hal ini kebutuhan petani adalah penambahan modal yang berupa uang yang berfungsi sebagai pemenuhan modal usaha tani di Desa Sidorejo. Pada proses pembentukan LKMA Mandiri didampingi oleh PPL, karena PPL merupakan tim pengawas dari Dinas Pertanian.

LKMA yang mandiri dapat terwujud tetapi membutuhkan modal awal yang cukup besar sehingga tidak cukup hanya mengandalkan dana dari PUAP. Hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara itu dalam meningkatkan aspirasi Gapoktan Mulyo Abadi dapat diwujudkan dengan cara mengaktifkan kembali kepengurusan di Gapoktan Mulyo Abadi. Adanya kedua hal tersebut yang dapat terwujud diharapkan LKMA Mandiri dapat terealisasi.

5.3.2 Desa Gadingrejo Pada Gapoktan Karya Tani

Strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP dapat diketahui dengan menganalisis faktor pendorong dan penghambat menggunakan alat analisis yang bernama analisis medan kekuatan atau FFA (*Force Field Analysis*). FFA (*Force Field Analysis*) merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam merencanakan perubahan berdasarkan adanya faktor pendorong dan penghambat. Hasil dari analisis FFA akan memunculkan sebuah strategi yang meminimalisasi faktor penghambat dengan mengoptimalkan faktor pendorong ke arah tujuan yang

akan dicapai. Berdasarkan pada hasil wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan ‘para *expert*’ (tim ahli), terdapat lima faktor pendorong dan lima faktor penghambat yang terdapat pada pengelolaan dana PUAP. Setiap Gapoktan yang berada di Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo mempunyai cara pengelolaan dan faktor pendorong serta faktor penghambat yang berbeda. Penjelasan terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat pada Tabel 5.16

Tabel 5.16: Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP Di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

| NO | FAKTOR PENDORONG | NO | FAKTOR PENGHAMBAT |
|----|--------------------------------------|----|---|
| D1 | Tidak ada masalah dari luar Gapoktan | H1 | Gapoktan belum memiliki badan hukum |
| D2 | Terbentuknya kelompok mikro | H2 | Tidak mempunyai fasilitas pinjaman |
| D3 | Memiliki Program Jangka Panjang | H3 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu |
| D4 | Adanya pelatihan | H4 | Sanksi yang tidak tegas kepada anggota |
| D5 | Pengurus Gapoktan aktif | H5 | Belum dilakukan reformasi kepengurusan |

Faktor pendorong pada pengelolaan dana PUAP di Desa Gadingrejo dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang menjadi kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*). Faktor-faktor tersebut nantinya akan ditentukan menjadi kekuatan kunci keberhasilan dalam perkembangan pengelolaan dana di Desa Gadingrejo. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tidak ada masalah dari luar Gapoktan

Pada Desa Gadingrejo terdapat Gapoktan Karya Tani, Gapoktan Karya Tani dalam keorganisasiannya tidak terdapat masalah. Tidak mengalami masalah dari luar Gapoktan. Hubungan yang bersifat ekstern atau luar Gapoktan seperti contohnya tidak ada orang di luar keorganisasian seperti anggota yang bukan termasuk anggota Gapoktan, perangkat desa atau yang lainnya membuat masalah dengan Gapoktan,. Hubungan Gapoktan dengan masyarakat setempat cukup baik. Hal ini menjadi salah satu hal yang sangat

penting dalam pengelolaan dana PUAP agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

2. Terciptanya kelompok mikro

Sejak adanya program PUAP maka pada Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari para tukang sayur dan orang sana menyebutnya “Lijoan”, yang sebagian besar anggotanya adalah wanita. Kelompok yang baru terbentuk ini karena adanya PUAP kelompok ini disebut kelompok mikro. Kelompok mikro merupakan kelompok yang mengusahakan usaha-usaha kecil, mereka bukan petani rata-rata pedagang. Modal untuk berdagang itulah meminjam dana PUAP. Adanya kelompok mikro ini menjadi salah satu kelompok yang membantu dalam berputarnya dana PUAP karena para anggota pada kelompok ini dalam pengembaliannya cepat dan tepat waktu.

3. Terdapat Program Jangka Panjang

Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya tentunya berdasarkan pada program kerja yang dimiliki. Program kerja tersebut adalah program jangka panjang yaitu sesuai dengan penuturan ketua Gapoktan (Pak Badjuri) dan beberapa pengurus serta anggota Gapoktan yang mengatakan “menginginkan adanya kios pertanian yang menyediakan segala kebutuhan saprodi” hal tersebut diharapkan lebih memudahkan para petani untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya dengan mudah.

4. Adanya pelatihan

Pelatihan yang dilakukan oleh Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo terkait program PUAP adalah dalam bentuk pertemuan. Kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan adalah memberikan pengarahan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan cara peminjaman dana PUAP, sehingga diharapkan para anggota lebih mengerti tentang tujuan dan maksud sebenarnya program PUAP, yaitu dapat memenuhi permodalan petani namun modal tersebut wajib dikembalikan karena bergantian dengan anggota lain yang membutuhkan, sehingga adanya pemerataan kesempatan meminjam. Serta

adanya pengarahan tersebut dihimbaukan dalam pengembalian agar tidak terlambat dalam pengembalian.

5. Pengurus Gapoktan aktif

Keaktifan kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan adalah sesuatu yang sangat penting dalam berjalannya kelembagaan. Pengurus Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo dapat dikatakan aktif karena mereka ikut andil dalam pengelolaan dana PUAP dengan menyalurkan dana tersebut kepada poktan-poktan. Meskipun secara penuh yang mengelola adalah Poktan, yang kemudian Poktan memberikan pertanggung jawaban secara administrasi. Dengan hal ini maka Gapoktan sebagai penanggung jawab dalam urusan administrasi pengelolaan dana PUAP, hal ini sangat diperlukan karena sesuai Juknis (Petunjuk Teknis) yang diberikan oleh Dinas Pertanian.

Selain kekuatan, tingkat kelemahan juga harus diminimalisasi agar kekuatan tersebut bisa maksimal. Faktor penghambat pada pengelolaan dana PUAP di Desa Gadingrejo dapat didefinisikan sebagai kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treths*). Faktor penghambat ini nantinya akan ditentukan sebagai penghambat kunci yang harus diminimalisasi demi tercapainya tujuan pengembangan pada pengelolaan dana PUAP di Desa Gadingrejo. Faktor-faktor penghambat pengelolaan dana PUAP di Desa Gadingrejo antara lain:

1. Gapoktan belum memiliki badan hukum

Pada Desa Gadingrejo terdapat Gapoktan Karya Tani, Gapoktan Karya Tani belum berbadan hukum. Seperti yang kita tahu badan hukum merupakan suatu hal yang utama bagi sebuah lembaga, tanpa memiliki badan hukum yang sah maka sebuah lembaga tersebut dapat diragukan keberadaannya. Badan hukum yang ada ini tentunya akan sangat berguna bagi lembaga tersebut untuk dapat melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar (hubungan eksternal). Belum adanya kepemilikan badan hukum tersebut maka Gapoktan Karya Tani mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama atau dalam penyaluran bantuan pemerintah.

2. Tidak mempunyai fasilitas

Secara umum fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan sesuatu, di sini fasilitas yang dimaksud pada Gapoktan Karya Tani adalah kantor Gapoktan yang dijadikan tempat untuk menjalankan transaksi simpan pinjam dan fasilitas pinjaman modal yang dapat berupa uang ataupun pinjaman dalam bentuk saprodi. Adanya fasilitas ini dapat memudahkan petani anggota dalam menjalankan usaha pertanian. Namun pada kenyataannya Kantor Gapoktan Karya Tani telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal Ketua Gapoktan (Pak Badjuri) dengan adanya tempat tidur dan kondisi ruangan tersebut sudah tidak layak dijadikan kantor, hal tersebut menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam.

3. Lemahnya kesadaran pengembalian tepat waktu

Sepertinya merupakan masalah yang umum apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan uang yaitu yang berupa pinjaman akan sangat sulit dalam pengembaliannya. Maka Gapoktan Karya Tani beberapa anggotanya memiliki kesadaran yang rendah dalam pengembalian pinjaman dengan tepat waktu, hal ini sesuai dengan penuturan ketua Gapoktan (Pak Bajuri) mengatakan “para peminjam apabila belum diberikan teguran tentang waktu pengembalian maka jarang ada yang sadar mengembalikan tepat waktu, pada hal dana pinjaman tersebut juga bergantian dengan yang lainnya”. Kondisi tersebut dapat menyulitkan dalam pengelolaan dana PUAP.

4. Sanksi yang tidak tegas kepada anggota

Sanksi merupakan adalah salah satu cara agar seseorang dapat mematuhi aturan yang berlaku. Namun pada Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo tidak ada sanksi yang tegas agar anggotanya dapat mematuhi aturan yang diterapkan. Contohnya pada kegiatan pertemuan, apabila ada anggota yang telah beberapa kali tidak datang maka sanksinya hanyalah berupa teguran saja, tidak ada sanksi yang memberatkan, dan apabila ada bantuan, anggota yang tidak datang itupun tetap merasakan adanya bantuan, hal tersebut membuat para anggota menyepelkan tentang adanya kegiatan Gapoktan sehingga apabila diabaikan maka semakin sedikit anggota yang hadir dalam pertemuan. Contoh lainnya

adalah apabila terlambat dalam pengembalian maka sanksinya hanyalah berupa teguran, hal tersebut yang menyebabkan macetnya dana PUAP.

5. Belum dilakukan reformasi kepengurusan

Melihat usia ketua Gapoktan yang berusia sekitar 60-an dapat dikatakan seseorang yang lanjut usia. Faktor usia tersebutlah kinerja ketua Gapoktan (Pak Badjuri kurang optimal, karena pada usia tersebut kondisi yang mudah lelah menghambat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan Gapoktan. Maka dengan belum dilakukannya reformasi kepengurusan maka kinerja pengurus untu segala kegiatan Gapoktan Karya Tani kurang optimal, hal ini berdampak pada perkembangan pengelolaan dana PUAP.

Identifikasi dilanjutkan pada penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat pada pengelolaan dana pada Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo, identifikasi tersebut akan menghasilkan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam merumuskan strategi. Penilaian yang dilakukan pada proses analisis FFA ini merupakan penilaian kualitatif yang dikuantifikasikan dengan skala nilai 1-5. Penilaian tersebut melalui proses jajak pendapat (*brainstorming*) dari para informan yang memiliki pemahaman yang besar terhadap Program PUAP. Hasil penilaian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berdasarkan hasil analisa FFA mengenai penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat seperti pada tabel evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat, maka dapat diketahui nilai dari Total Nilai Bobot (TNB) masing-masing faktor. Berdasarkan nilai TNB tersebut maka dapat ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pada pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo yaitu dengan cara melihat nilai TNB yang terbesar. Faktor kunci keberhasilan (FKK) terbagi menjadi dua, yaitu FKK pendorong dan FKK penghambat.

Tabel 5.17 Evaluasi Faktor Pendorong Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani Di Desa Gadingrejo

| No | Faktor Pendorong | BF | ND | NBD | NRK | NBK | TNB | FKK |
|--------------|--------------------------------------|------|----|-----|------|------|-------------|-----|
| D1 | Tidak ada masalah dari luar Gapoktan | 0.14 | 4 | 0.6 | 3.56 | 0.51 | 1.08 | |
| D2 | Terciptanya kelompok mikro | 0.21 | 4 | 0.8 | 3.44 | 0.72 | 1.56 | |
| D3 | Terdapat program Jangka Panjang | 0.29 | 3 | 0.9 | 3.78 | 1.1 | 1.97 | *1 |
| D4 | Adanya pelatihan | 0.14 | 3 | 0.4 | 3.33 | 0.48 | 0.91 | |
| D5 | Pengurus Gapoktan aktif | 0.21 | 4 | 0.8 | 3.78 | 0.79 | 1.63 | |
| Total | | | | | | | 7.15 | |

*) : prioritas (FKK)

Sumber: Data Primer, diolah (2012)

Keterangan:

BF : Bobot Faktor

ND : Nilai Dukungan

NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan

NBD : Nilai Bobot Dukungan

NBK : Nilai Bobot Keterkaitan

TNB : Total Nilai Bobot

FKK : Faktor Kunci Keberhasilan

Pada Tabel 5.17 dapat diketahui FKK pendorong, yaitu faktor D3 (Terdapat program jangka panjang) dengan nilai urgensi faktor sebesar 1,97.

Terdapatnya program jangka panjang yaitu berupa usaha untuk mengadakan adanya kios Agribisnis yang menyediakan segala kebutuhan usaha tani berupa saprodi. Hal tersebut berdampak positif pada Gapoktan untuk lebih dapatnya memperbaiki sistem pengelolaan dana PUAP agar lebih berkembang dan terwujudnya kios Agribisnis yang mandiri sesuai dengan program kerja panjang.

Tabel 5.18 Evaluasi Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani Di Desa Gadingrejo

| No | Faktor Penghambat | BF | ND | NBD | NRK | NBK | TNB | FKK |
|--------------|---|------|----|-----|------|------|-------------|-----|
| H1 | Tidak memiliki badan hukum | 0.21 | 2 | 0.6 | 3.56 | 0.75 | 1.17 | |
| H2 | Tidak mempunyai fasilitas | 0.21 | 3 | 0.6 | 3.44 | 0.72 | 1.35 | |
| H3 | Lemahnya kesadaran pengembalian tepat waktu | 0.14 | 3 | 0.4 | 3.67 | 0.52 | 0.94 | |
| H4 | Sanksi yang tidak tegas kepada anggota | 0.29 | 4 | 1.2 | 3.89 | 1.13 | 2.29 | *1 |
| H5 | Belum dilakukan reformasi kepengurusan | 0.21 | 3 | 0.6 | 3.67 | 0.77 | 1.4 | |
| Total | | | | | | | 7.04 | |

*) : prioritas FKK

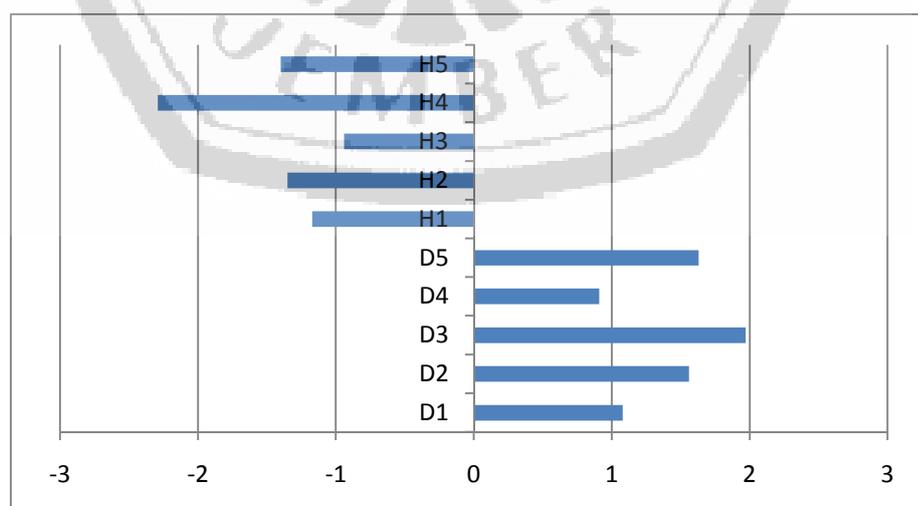
Sumber: Data Primer, diolah (2012)

Keterangan:

BF : Bobot Faktor
 ND : Nilai Dukungan
 NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan
 NBD : Nilai Bobot Dukungan
 NBK : Nilai Bobot Keterkaitan
 TNB : Total Nilai Bobot
 FKK : Faktor Kunci Keberhasilan

Pada Tabel 5.18 dapat diketahui juga FKK penghambat pada pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo, yaitu faktor H4 (Sanksi yang tidak tegas kepada anggota) dengan nilai urgensi faktor sebesar 2,29.

Upaya mewujudkan pengembangan dana PUAP perlu adanya aturan-aturan yang mendukung dalam pelaksanaan pengembangan tersebut dalam proses pengembangan. Dalam sebuah proses untuk mewujudkan suatu tujuan maka dalam pelaksanaannya perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dengan aturan yang berfungsi sebagai kendalanya. Apabila aturan itu sendiri tidak dihiraukan dan pembuat aturan menerapkan aturan dengan tidak tegas maka proses pelaksanaan akan terhambat dan selalu menemui banyak kendala. Aturan dibuat sebagai kontrol dalam sebuah organisasi atau kelembagaan karena aturan adalah hal yang penting dalam menyinergikan antar beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu program.



Gambar 5.13 Medan Kekuatan Usaha Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo

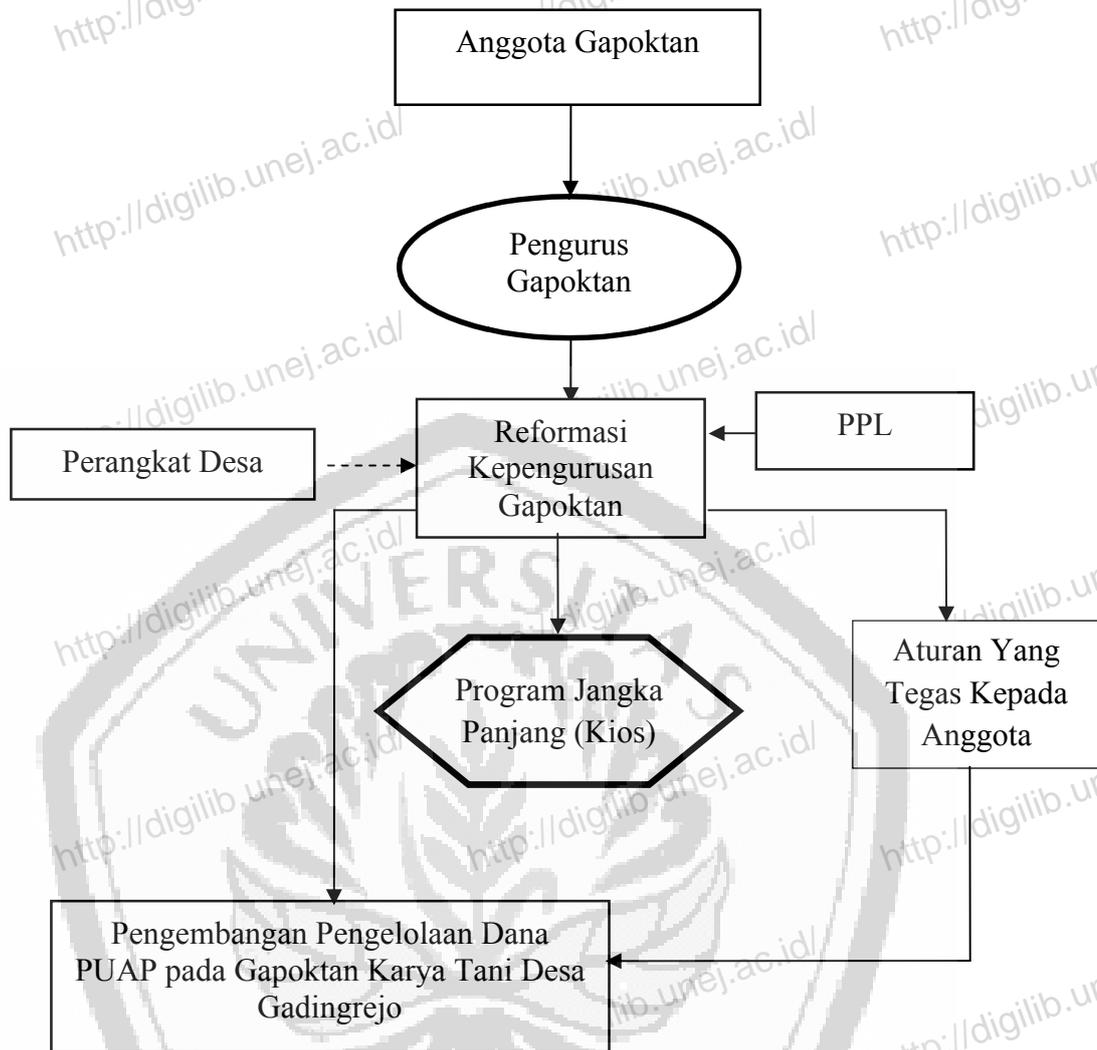
Berdasarkan gambar 5.13 maka dapat diketahui arah dan nilai masing-masing faktor pendorong maupun faktor penghambat pada pengelolaan dana PUAP Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo. Panjang anak panah menyatakan besarnya TNB dari masing-masing faktor sedangkan arah anak panah merupakan tarik menarik antara faktor penghambat dan faktor pendorong. Jumlah seluruh nilai TNB pendorong sebesar 7,15 sedangkan jumlah seluruh nilai TNB penghambat sebesar 7,04 TNB pendorong lebih besar daripada TNB penghambat. Berdasarkan nilai medan kekuatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana PUAP di Desa Gadingrejo memiliki peluang dan prospek untuk dikembangkan di Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo.

Selanjutnya, setelah diketahui arah pada pengelolaan dana PUAP di Desa Gadingrejo merumuskan strategi yang sesuai dengan hasil FKK. Strategi ini merupakan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui strategi yang sesuai, pengelolaan dana di Gapoktan Karya Tani Desa Gadingrejo nantinya juga akan berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil analisa FFA di atas, maka strategi yang paling efektif adalah dengan menghilangkan atau meminimalisasi hambatan kunci dan optimalisasi pendorong kunci ke arah tujuan yang akan dicapai. Pendekatan yang demikian ini merupakan pendekatan strategi fokus.

Strategi fokus pada hasil analisis FFA sesuai pada gambar 5.13 dapat dirumuskan bahwa kekuatan atau pendorong kunci yang telah dipilih difokuskan ke arah tujuan yang telah ditetapkan yaitu pada pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo. FKK pendorong yang terpilih adalah dengan terus meningkatkan keaktifan para pengurus dalam segala hal pada kegiatan Gapoktan. Fokusnya adalah dengan merealisasikan program jangka panjang terbentuknya kios yang menyediakan segala kebutuhan usaha tani berupa saprodi yang akan memudahkan petani dalam usaha taninya, dengan keaktifan para pengurus di Gapoktan guna proses mewujudkan program jangka panjang tersebut. Sedangkan untuk FKK penghambat yaitu sanksi yang tidak tegas kepada anggota Gapoktan, fokusnya adalah dengan melakukan reformasi kepengurusan dengan membuat aturan-aturan baru yang lebih tegas demi berjalannya proses pengembangan dana PUAP. Aturan

yang lebih tegas sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem keorganisasian agar berjalan sesuai yang diharapkan dan semestinya tidak menyimpang dari apa yang telah disusun. Dukungan dari pihak pemerintah setempat yaitu perangkat desa dan PPL sangat dibutuhkan dalam reformasi kepengurusan Gapoktan. Hal tersebut dapat dilihat juga dari kondisi fisik dan usia Ketua Gapoktan yang sudah tidak memungkinkan lagi mengemban jabatan dengan beban yang berat. Sehingga diharapkan dari berbagai pihak dapat membantu dalam reformasi kepengurusan dan aturan-aturan yang lebih tegas dapat dibuat sehingga pengelolaan dana PUAP Gapoktan Karya Tani desa Gadingrejo dapat berjalan dengan optimal serta sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan strategi ini harus memperhatikan kesesuaian arah optimalisasi pendorong kunci ke arah perbaikan penghambat kunci. Artinya jika pendorong kunci dan penghambat kunci yang dipilih lebih dari satu, maka penyusunan strategi harus memperhatikan kesesuaian perpaduan masing-masing faktor untuk menuju tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan evaluasi hasil perhitungan faktor pendorong dan faktor penghambat, diperoleh masing-masing satu pendorong kunci dan penghambat kunci. Strategi fokus yang diperoleh berdasarkan FKK pendorong dan FKK penghambat yang telah dipilih dengan cara reformasi kepengurusan agar segera terwujudnya program jangka panjang yaitu adanya keberadaan kios sehingga dapat berkembangnya dana PUAP. Adapun demi terwujudnya hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut terdiri dari anggota Gapoktan, pengurus Gapoktan, PPL, dan perangkat desa. Alur perwujudan strategi fokus pengelolaan dana PUAP pada gambar 5.14



Gambar 5.14 Skema Strategi Fokus Pengelolaan Dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo

Berdasarkan gambar 5.14 penyusunan strategi pengembangan pengelolaan dana PUAP di Desa Sidorejo berupa adanya sinergi antara beberapa pihak yang terkait dan dapat membantu dalam reformasi kepengurusan Gapoktan sehingga diharapkan dengan setelah adanya reformasi kepengurusan Gapoktan Karya Tani maka dapat terlaksananya program jangka panjang dengan mengaktifkan pengurus-pengurus baru. Adanya pengurus baru berdampak pada pembuatan aturan yaitu berupa sanksi yang lebih tegas kepada anggota. Pihak-pihak yang terkait dalam membantu perwujudan reformasi adalah anggota Gapoktan, pengurus Gapoktan, PPL dan perangkat desa.

Aspirasi anggota Gapoktan dapat ditampung kepada pengurus Gapoktan untuk dapat melakukan pemilihan pengurus baru dengan agenda kegiatan reformasi kepengurusan. Perlu adanya kesepakatan dari berbagai pihak dalam melakukan reformasi kepengurusan maka dari itu pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat menjadi kontrol dan penengah pada saat reformasi kepengurusan

Realisasi program jangka panjang dengan adanya reformasi kepengurusan dapat segera terwujud dan aturan-aturan yang baru dapat segera dibuat, karena aturan sangat berpengaruh pada proses berkembangnya pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani desa Gadingrejo. Aturan yang dibuat untuk dapatnya lebih tegas dengan adanya sanksi yang diberikan kepada anggota seperti keterlambatan pinjaman yang berkepanjangan, karena selama ini hanya teguran yang dijadikan sanksi untuk anggota. Adanya keteraturan tersebut maka akan menjadi strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani di Desa Gadingrejo.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis FFA faktor pendorong pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Karya Tani memiliki faktor pendorong yang sama yaitu Terdapat Program Jangka Panjang. Terdapatnya Program Jangka Panjang yang merupakan faktor pendorong utama di kedua Gapoktan dinilai oleh para informan merupakan hal yang menjadi stimulus untuk melakukan keorganisasian lebih baik lagi. Adanya stimulus tersebut membuat seluruh aspek akan saling mendukung yang meliputi sistem, manajemen, hubungan yang lebih baik lagi demi terwujudnya program tersebut yang outputnya adalah pengelolaan dana PUAP yang berkembang. Hasil analisis FFA mengenai faktor penghambat pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani memiliki faktor penghambat yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan karakteristik setiap daerah yang berbeda.

Menganalisis secara keseluruhan faktor pendorong dan faktor penghambat yang terdapat di Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani dapat dihasilkan satu strategi. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengambil faktor pendorong yang terbaik yaitu yang memiliki nilai FKK yang tinggi ataupun faktor pendorong yang sama adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya program jangka panjang
2. Mempunyai fasilitas
3. Pengurus Gapoktan aktif

Maka strategi yang dapat dihasilkan adalah dengan mengoptimalkan ketiga faktor pendorong tersebut yaitu dengan Gapoktan memiliki program jangka panjang maka dapat menstimulus semua pengurus Gapoktan untuk memiliki suatu cara mencapai hal tersebut dengan syarat pengurus Gapoktan aktif maka akan memudahkan dilakukannya koordinasi. Mudah-mudahan koordinasi didukung adanya suatu fasilitas yaitu tempat untuk melakukan koordinasi dan segala kegiatan Gapoktan yaitu kesekretariatan Gapoktan atau kantor Gapoktan. Adanya optimalisasi ketiga faktor pendorong tersebut maka pengelolaan dana PUAP akan mengalami perkembangan yaitu suatu output yang diharapkan bersama. Hal tersebut dikarenakan pada program PUAP perlu adanya pengurus Gapoktan yang aktif karena sebagai pengelola dana PUAP maka perlu adanya fasilitas yaitu tempat dilakukannya kegiatan Gapoktan diantaranya simpan pinjam guna mewujudkan program jangka panjang yang terdapat di setiap daerah salah satunya terbentuknya LKMA. Penguatan optimalisasi ketiga faktor pendorong maka dapat meminimalisasi semua faktor penghambat yang terdapat di setiap daerah.

Selain mengoptimalkan faktor pendorong, maka perlu meminimalisasi faktor penghambat. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengambil faktor penghambat yang memiliki nilai FKK yang tinggi sebagai berikut:

1. Tidak maksimalnya dukungan pemerintah setempat
2. Sanksi yang tidak tegas pada anggota

Maka strategi yang dapat digunakan adalah meningkatkan peran serta seluruh pihak terkait atau *stakeholder* dalam pengelolaan dana PUAP dan membuat aturan-aturan atau norma-norma yang lebih tegas sehingga keberhasilan pengembalian lebih tinggi. Hal tersebut dapat mewujudkan berkembangnya dana PUAP.

BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Pengelolaan program PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi hampir secara keseluruhan telah sesuai dengan pengelolaan berdasarkan LKMA pada Juknis Deptan namun tidak sesuai pada penyaluran kepada anggotanya. Pada Gapoktan Karya Tani belum secara keseluruhan sesuai dengan pengelolaan berdasarkan LKMA pada Juknis Deptan, namun sesuai pada penyaluran kepada anggotanya.
2. Terdapatnya modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan dan norma pada daerah penelitian terbukti pada Gapoktan Mulyo Abadi yang menjunjung tinggi modal sosial dalam pengelolaan PUAP sehingga pengembalian lancar dan dana berkembang, apabila tidak menjunjung tinggi modal sosial dapat dilihat pada Gapoktan Karya Tani dengan pengelolaan PUAP yang tidak lancar dan dana belum berkembang.
3. Terdapatnya faktor pendorong dan penghambat yang berbeda pada Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani maka dapat dihasilkan satu strategi pengelolaan dana PUAP yaitu dengan mengoptimalkan faktor pendorong yang terdiri dari: terdapatnya program jangka panjang, mempunyai fasilitas dan pengurus Gapoktan aktif maka dapat meminimalisasi semua faktor penghambat yang terdapat pada setiap Gapoktan. Adapun faktor penghambat tersebut dapat diminimalisasi dengan cara meningkatkan peran serta pihak terkait atau *stakeholder* dalam pengelolaan dana PUAP dan aturan yang lebih tegas dalam pelaksanaannya sehingga pengelolaan dana PUAP lebih lancar dan dana bisa berkembang.

6.2 Saran

1. Pembinaan terhadap program PUAP perlu ditingkatkan dalam hal pembimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada anggota.

2. Perlu dikaji ulang Petunjuk Teknis dan Pedoman PUAP karena hasil penelitian menunjukkan Gapoktan yang sesuai dengan Juknis PUAP dalam penyalurannya tidak berkembang.
3. Bagi mahasiswa dapat melanjutkan penelitian mengenai peran kepemimpinan dalam pengelolaan dana PUAP.



DAFTAR PUSTAKA

Ancok, Djamaludin. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar: hal 12-13

Ariana, dkk. 2006. *Pengaruh Modal Sosial Dalam Kemandirian Sentra Industri yang Berlokasi di Daerah Pedesaan*. Jakarta: LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Press.

Ariwibowo. 2007. Kapital Sosial Komunitas Adat Terpencil. [serial on line]. http://www.katcenter.info/detail_artikel.php?id_ar=54. [20 Januari 2012].

Biro Perencanaan Departemen Pertanian, 2009. *Evaluasi dan Penilaian Gapoktan PUAP*. Jakarta.

Deptan. 2009. *Pedoman Umum. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta: Deptan Press.

Deptan. 2010. *Pedoman Umum. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta: Deptan Press.

Dharmawan, A. 2000. *Kemiskinan Kepercayaan (The Poverty of Trust), Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. [Jurnal].

Elizabeth, R. 2007. *Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Forum Agro Ekonomi (FAE) Vol. 25 Juli 2007. PSE-KP. Bogor.

Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.

Filtra, Eko. 2007. *Evaluasi Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Sapi Potong Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat*. Bogor: Program Studi Sosial Ekonomi Industri Peternakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. [Skripsi].

Fuady, Munir. 1996. *Hukum bisnis dalam teori dan praktek (buku kesatu)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The creation of Prosperity*. New York: The Free Press.

Hasbullah, J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press Jakarta.

Inayah. 2012. *Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan*. Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1, April 2012

Itsar, Media. 2008. *Berpikir Kritis, Analitis, Mengemukakan Pendapat dan Evaluasi*. [serial on line]. <http://media-itsar-materitarbiyah.com>. [10 Februari 2012].

_____. 2008. *Keputusan Bupati Jember tentang Daftar GAPOKTAN Penerima PUAP Kabupaten Jember 2008*. Jember.

_____. 2009. Kasus PUAP di Kepulauan Sula. [serial on line]. <http://lintassula.blogspot.com/2011/09/program-puap-di-kepulauan-sula.html>. [2 Maret 2012].

Kasmadi. 2005. *Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Kemandirian Petani Ternak. (Kasus pada Kelompok Tani Ternak Desa Bungai Jaya dan Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. [Skripsi].

Kamira, Desi, Dkk. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis di Perdesaan (PUAP) di Kota Padang*. Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Kementan. 2010. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. 2010*. Jakarta.

Kementan. 2010. *Pedoman dan Modul Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta.

Lawang R.M. 2005. *Capital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Depok: Cetakan kedua. Fisip UI Press.

Kusnadi, M.A. 2000. *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Mawardi, J.M. 2007. *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 3, Nomor 2*. [serial online]. wikispaces.com/file/view/peran+social+capital.pdf. [27 Desember 2011].

Marfuah, Siti. 2008. *Modal Sosial Masyarakat Nelayan dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Nelayan dan Pembangunan*. Jember: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. [Skripsi].

- Menkeu. 2008. Peraturan Direksi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. [serial on line]. <http://www.danabergulir.com/download/juknis/Juknis-011-2011.pdf>. [2 Maret 2012].
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudiarta, Ketut G. 2009. *Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Capital Sosial*. Forum penelitian Agro Ekonomi. Volume 27 no 1 juli 2009 1-12 <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/FAE27-1a.pdf>. [23 Agustus 2012].
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pandwinata, Rina. 2009. *Kajian Modal Sosial Masyarakat Petani Dalam Menunjang Program Pembangunan Pertanian*. Jember: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. [Skripsi].
- Paramitasari, Elfa, S. 2007. *Jaringan Sosial Pasukan Kuning*. Jember: Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. [Skripsi].
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga*.
- Putnam, R. 1993. *The Prosperous community: Social Capital and Public Life*. Journal of The American Prospect, Vol.13, halaman 35-42.
- Putnam, R. 1995. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Journal of Democracy Vol. 6/1, pp. 65-78.
- Putnam, R. 2000. *The Prosperous community: Social Capital and Public Life*. Journal of The American Prospect, Vol.4, no.13.
- Rizki, Diah, A. 2012. *Strategi Pengembangan Usaha Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Melalui Prima Tani di Desa Temulung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. [Skripsi].
- Robinson, Marguirete. 2000. *The Micro Finance Revolution, Sustainable Finance for the Poor*. The World Bank.

Satori dan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sudaryanto, dkk. 2009. *Penentuan Lokasi dan evaluasi serta dampak pengembangan program PUAP*. Jakarta: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (DEPTAN).

Sumarti, Titik. 2000. *Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumah tangga Pedesaan*. *Sodality*. Transdisiplin Sosiologi Komunikasi dan Ekologi Manusia P 217-232. [Jurnal].

Sianipar. 2003. *Teknik-teknik Analisis Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sume, Harun A. 2008. *Analisis Efektivitas Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Studi Kasus DPMLUEP Kabupaten Bogor)*. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. [Tesis].

Suradisastira, Kedy, dkk. 2010. *Evaluasi Dan Penyusunan Desa Calon Lokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Pusat Analisis Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. [Proposal].

Suwandari, dkk. 2005. *Respon Petani terhadap Kelompok Tani Sebagai Wadah Pendidikan Non Formal serta Implikasinya terhadap Produktivitas usahatani Padi*. *Ilmu Pengetahuan Sosial*: 17-18. [Jurnal].

Syahyuti, 2007. *Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. [Jurnal].

Umar, H. 2000. *Metodologi Penelitian : Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zujajat, Wahab, M. 2007. *Pola Hubungan Kerjasama. Buruh Wanita di Gudang Tembakau*. Jember: Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. [Sripsi].

Lampiran 1. Status Informan pada Gapoktan

| No | Nama | Gapoktan | Status di Gapoktan | Poktan | Status di Poktan |
|----|-----------------|-------------|--------------------|---------------|------------------|
| 1 | Margo Santoso | Mulyo Abadi | Pengurus | Sidomulyo IV | Pengurus |
| 2 | Menik | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo IV | Anggota |
| 3 | Lilik Lestari | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo IV | Anggota |
| 4 | Agus W | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo II | Anggota |
| 5 | Rohman Saleh | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo VI | Anggota |
| 6 | Jamari | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo VI | Anggota |
| 7 | Anggie Putra | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo I | Anggota |
| 8 | Suci Kristiani | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo IV | Anggota |
| 9 | Rohiem | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo III | Anggota |
| 10 | Fajar Adi | Mulyo Abadi | Anggota | Sidomulyo V | Anggota |
| 11 | Bajjuri | Karya Tani | Pengurus | Tani Jaya | Pengurus |
| 12 | H. Ahmad Khoiri | Karya Tani | Pengurus | Barokah Tani | Pengurus |
| 13 | Muh. Yasin | Karya Tani | Anggota | Nikmat Tani | Pengurus |
| 14 | Supomo | Karya Tani | Anggota | Makmur Tani | Pengurus |
| 15 | Rofi | Karya Tani | Anggota | Barokah Tani | Anggota |
| 16 | Sudarto | Karya Tani | Anggota | Tani Jaya | Anggota |
| 17 | Mujadi | Karya Tani | Pengurus | Tani Jaya | Pengurus |
| 18 | Nurrofiq | Karya Tani | Anggota | Barokah Tani | Pengurus |
| 19 | Juwari | Karya Tani | Anggota | Sumber Tani | Anggota |
| 20 | H. Minarno | Karya Tani | Anggota | Sumber Tani | Pengurus |
| 21 | Ahmad Munib | Karya Tani | Anggota | Sumber Tani | Pengurus |
| 22 | Imam Sulaji | Karya Tani | Anggota | Nikmat Tani | Anggota |
| 23 | H. Edi | Karya Tani | Anggota | Nikmat Tani | Anggota |
| 24 | Sunarto | Karya Tani | Anggota | Makmur Tani | Pengurus |
| 25 | H. Mustain | Karya Tani | Anggota | Makmur Tani | Pengurus |

Lampiran 2: Foto Transparansi Pengelolaan pada Gapoktan Mulyo Abadi

KANCA BRI :
BRI UNIT :

No. Rekening : 6219 UNIT UMBULSARI JEMBER **CIF :** G336357
Nama : 6219-01-006750-53-3 **Tgl. :** 08 Aug 2008
Alamat : GAPOKTAN MULYO ABADI
Tanda Pengenal : KTP: KRAJAN SIDOREJO UMBULSARI JEMBER
ASMPASPOR

| Tgl | Sandi | Mutasi | | Saldo | Pengesahan Teller |
|--------------|-------|---------------|------------|----------------|-------------------|
| | | Debet | Kredit | | |
| 01 08Aug2008 | 1 | | 100.000,00 | 100.000,00 | CSD 6219051 |
| 02 15Aug2008 | | | 44,00 | 100.044,00 | INT |
| 03 15Sep2008 | | | 170,00 | 100.214,00 | INT |
| 04 15Sep2008 | | 2.000,00 | | 98.214,00 | CHG |
| 05 15Oct2008 | | 2.000,00 | | 96.214,00 | CHG |
| 06 31Oct2008 | | | 100.000,00 | 400.095.214,00 | SAL |
| 07 15Nov2008 | | 2.000,00 | | 100.094.214,50 | CHG |
| 08 09/2008 | 2 | 25.900.000,00 | | 75.094.214,00 | CSD 6219051 |

Bukti dana PUAP masuk ke rekening Gapoktan Mulyo Abadi

**LAPORAN KEDANGAN DANA PUAP
 "GAPOKTAN MULYO ABADI"
 08-11-2008**

| NO | URAIAN | JUMLAH (RP) | | | Prestasi Keuangan |
|----|------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
| | | Bila Lalu | Bila In | sd Bila In | |
| 1 | DANA PUAP | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 2 | SIMPANAN POKOK | 6.200,000 | | 6.200,000 | |
| 3 | SIMPANAN WAJIB | 1.123,000 | | 1.123,000 | |
| 4 | JASA | 10.277,000 | 181.400 | 191.677,000 | |
| 5 | GAS BULAN 1500000 | 116.000,000 | 205.000 | 116.000,000 | 20.400,000 |
| 6 | TELEPONAN | | | | 81.590,000 |
| 7 | PUPUK & PESTISIDA | | | | 19.500,000 |
| 8 | INVENTARIS | | | | 3.500,000 |
| 9 | BAYA ADM & OPERASIONAL | | 257,000 | 31.231,000 | |
| | JUMLAH | | | | 116.840,000 |

Sidorejo, 31... 08/2008
 Ketua Gapoktan
 Mulyo Abadi

Bukti perkembangan dana PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi

Lampiran 3. Matriks Pengelolaan Dana PUAP Gapoktan Mulyo Abadi dan Gapoktan Karya Tani

Apakah ada pembinaan/penyuluhan tentang keberadaan program PUAP dan berikan komentar anda?(paham/tidak paham)

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | % |
| 1 | ada, bagus (paham) | v | v | | v | v | V | v | | | | 6 | 60 | v | | v | | | | | | V | | v | | | | | 4 | 27 |
| 2 | ada, jelas penjelasannya | | | V | | | | | | | 1 | 10 | | | | | v | | v | | | | | | | v | v | | 4 | 27 |
| 3 | ada, cukup jelas | | | | | | | | v | v | v | 3 | 30 | | v | | | | v | | | | | | | v | | | 3 | 20 |
| 4 | ada, kurang jelas (tidak paham) | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | v | v | | | | | 2 | 13 |
| 5 | ada, sekilas/tidak jelas | | | | | | | | | | | 0 | | | | | v | | | | V | | | | | | | | 2 | 13 |
| | Total | | | | | | | | | | | 10 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 |

Bagaimana anda menggunakan dana yang anda pinjam pada Gapoktan?

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | % |
| 1 | Usaha tani (sesuai RUA) | v | | V | v | v | v | v | v | v | v | 9 | 90 | v | v | v | | | v | | | | | | v | v | v | v | 8 | 53 |
| 2 | Modal usaha (sesuai RUA) | | | | | | | | | | | | | | | | | v | | v | | V | | | | | | | 3 | 20 |
| 3 | Membeli kebutuhan rumah tangga (tidak sesuai RUA) | | v | | | | | | | | | 1 | 10 | | | | v | | | | | V | | v | v | | | | 4 | 27 |
| | Total | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 |

Lanjutan

Bagaimana pengaruh pinjaman anda yang berasal dari Gapoktan terhadap pendapatan?

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | % |
| 1 | Meningkat | v | v | V | v | v | | v | v | v | v | 9 | 90 | v | v | v | v | v | | v | V | V | v | | | v | v | v | 12 | 80 |
| 2 | Tidak meningkat | | | | | v | | | | | | 1 | 10 | | | | | | v | | | | | v | v | | | | 3 | 20 |
| | Total | | | | | | | | | | | 10 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 |

Bagaimana pengaruh pinjaman anda yang berasal dari Gapoktan terhadap usaha anda?

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | % |
| 1 | Berkembang | v | v | V | v | | | v | v | | v | 7 | 70 | v | v | v | v | | | v | V | | v | | | v | v | 9 | 60 | |
| 2 | Tidak berkembang | | | | | v | v | | | v | | 3 | 30 | | | | | v | v | | | V | | v | v | v | | | 6 | 40 |
| | Total | | | | | | | | | | | 10 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 |

Lampiran 4. Matriks Kepercayaan

Apakah anda memiliki rasa percaya kepada anggota terkait pemanfaatan dana PUAP?

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | % | |
|----|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
| 1 | Sangat percaya, karena hubungan sosialisasi yang baik | | | | | | | | | | | v | v | v | | | | | | | | | | v | | v | 5 | 33 | |
| 2 | Percaya, karena hubungan yang lama terjalin | | v | | v | | | v | v | v | v | | | | | | v | | V | | | v | v | v | | v | 6 | 40 | |
| 3 | Cukup percaya, karena lebih berhati-hati | v | | V | | v | v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | 4 | 27 |
| 4 | Tidak percaya, karena tidak tersosialisasi dengan jelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sangat tidak percaya, karena keadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 |

Lanjutan

Apakah anda memiliki rasa percaya kepada pengurus sebagai pemanfaatan dan pengelolaan dana PUAP?

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----------|------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | % | | |
| 1 | Sangat percaya, karena hubungan yang lama terjalin | | v | V | | | | v | v | | | 4 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | percaya, karena keterbukaan | | | | | v | v | | | | | 2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | percaya, karena hubungan yang baik dan kebersamaan | v | | | v | | | | | v | v | 4 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cukup percaya, kondisional | | | | | | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | V | V | v | v | v | v | v | v | v | 15 | 100 | |
| 5 | Tidak percaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sangat tidak percaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | 10 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 | |

Lampiran 6. Matriks Norma

Apakah anda lancar dalam pengembalian pinjaman?alasan!

| No | Jawaban | No Responden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | % | | | |
|----|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---|---|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | |
| 1 | Lancar, pertanian berhasil | | v | V | | | v | v | v | v | | | | | | | | | | | | | | | v | | | v | 4 | 27 | |
| 2 | Lancar, usaha berhasil | v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 |
| 3 | Tidak lancar, hama wereng sehingga gagal panen | | | | | v | v | | | | | | | | | | | | | v | v | | | | | | | | | 10 | 67 |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 100 |

Lampiran 7. Tingkat Urgensi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari

Faktor Pendorong

| No | Faktor Pendorong | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | NU |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|
| | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
| D1 | Gapoktan memiliki badan hukum | | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| D2 | Mempunyai fasilitas | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| D3 | Memiliki program jangka panjang | 4 | 4 | | 3 | 4 | 3 |
| D4 | Adanya Pelatihan | 3 | 3 | 3 | | 4 | 3 |
| D5 | Sanksi yang tegas pada anggota | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 |
| Total Urgensi | | | | | | | 14 |

Faktor Penghambat

| No | Faktor Penghambat | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | NU |
|---------------|---|--------------------------|----|----|----|----|----|
| | | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
| H1 | Terbatasnya modal pinjaman | | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| H2 | Dukungan dari pihak pemerintah setempat tidak maksimal | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| H3 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu | 4 | 4 | | 3 | 3 | 2 |
| H4 | Pengurus Gapoktan tidak aktif | 4 | 4 | 3 | | 4 | 3 |
| H5 | Fungsi kontrol pengawas kurang efektif | 2 | 4 | 3 | 4 | | 2 |
| Total Urgensi | | | | | | | 14 |

Lampiran 8. Tingkat Urgensi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari

Faktor Pendorong

| No | Faktor Pendorong | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | NU |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|
| | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
| D1 | Tidak ada masalah luar Gapoktan | | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| D2 | Terbentuknya kelompok mikro | 3 | | 4 | 3 | 3 | 3 |
| D3 | Memiliki program jangka panjang | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| D4 | Adanya Pelatihan | 3 | 3 | 4 | | 4 | 2 |
| D5 | Pengurus Gapoktan aktif | 4 | 3 | 4 | 4 | | 3 |
| Total Urgensi | | | | | | | 14 |

Faktor Penghambat

| No | Faktor Penghambat | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | NU |
|---------------|---|--------------------------|----|----|----|----|----|
| | | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
| H1 | Tidak memiliki badan hukum | | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| H2 | Tidak mempunyai fasilitas | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| H3 | Sanksi yang tidak tegas | 3 | 4 | | 4 | 3 | 2 |
| H4 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| H5 | Belum dilakukan reformasi kepengurusan | 4 | 4 | 3 | 3 | | 2 |
| Total Urgensi | | | | | | | 14 |

Lampiran 9. Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi

| No | Faktor Pendorong | NU | BF value | % | ND | NBD | NK | | | | | TNK | NRK | NBK | TNB | FKK | | | | | |
|-------|---|----|-------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----|
| | | | | | | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | | | | | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| D1 | Gapoktan memiliki badan hukum | 2 | 0.14 | 14 | 5 | 0.7 | | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3.67 | 0.53 | 1.23 | | |
| D2 | Mempunyai fasilitas | 3 | 0.21 | 21 | 4 | 0.8 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3.56 | 0.77 | 1.57 | | |
| D3 | Memiliki program jangka panjang | 3 | 0.21 | 21 | 5 | 1.05 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3.56 | 0.77 | 1.82 | *1 | |
| D4 | Adanya Pelatihan | 3 | 0.21 | 21 | 4 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 3.23 | 0.7 | 1.5 | | |
| D5 | Sanksi yang tegas pada anggota | 3 | 0.21 | 21 | 4 | 0.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3.45 | 0.74 | 1.54 | | |
| Total | | 14 | Total nilai bobot faktor pendorong | | | | | | | | | | | | | 7.66 | | | | | |
| H1 | Terbatasnya modal pinjaman | 3 | 0.21 | 21 | 4 | 0.9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 31 | 3.44 | 0.74 | 1.59 | |
| H2 | Dukungan dari pihak pemerintah setempat tidak maksimal | 4 | 0.29 | 29 | 3 | 0.9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 33 | 3.67 | 1.05 | 1.9 | *1 |
| H3 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu | 2 | 0.14 | 14 | 3 | 0.4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 30 | 3.33 | 0.48 | 0.9 | |
| H4 | Pengurus Gapoktan tidak aktif | 3 | 0.21 | 21 | 3 | 0.6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 32 | 3.55 | 0.76 | 1.4 | |
| H5 | Fungsi kontrol pengawas kurang efektif | 2 | 0.14 | 14 | 3 | 0.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 31 | 3.44 | 0.49 | 0.92 | |
| Total | | 14 | Total nilai bobot faktor penghambat | | | | | | | | | | | | | 6.71 | | | | | |

Lampiran 10. Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Pengelolaan Dana PUAP pada Gapoktan Karya Tani

| No | Faktor Pendorong | NU | BF value | % | ND | NBD | NK | | | | | TNK | NRK | NBK | TNB | FKK | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|------|---------|
| | | | | | | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | | | | | H1 | H2 | H3 | H4 |
| D1 | Tidak ada masalah dari luar Gapoktan | 2 | 0.14 | 14 | 4 | 0.6 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3.56 | 0.51 | 1.08 |
| D2 | Terbentuknya kelompok mikro | 3 | 0.21 | 21 | 4 | 0.8 | 3 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3.44 | 0.72 | 1.56 |
| D3 | Memiliki program jangka panjang | 4 | 0.29 | 29 | 3 | 0.9 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3.78 | 1.11 | 1.97 *1 |
| D4 | Adanya Pelatihan | 2 | 0.14 | 14 | 3 | 0.4 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3.33 | 0.48 | 0.91 |
| D5 | Pengurus Gapoktan aktif | 3 | 0.21 | 21 | 4 | 0.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3.78 | 0.79 | 1.63 |
| | | 14 | Total nilai bobot faktor pendorong | | | | | | | | | | | | | 7,15 | | | | |
| H1 | Tidak memiliki badan hukum | 3 | 0.21 | 21 | 2 | 0.6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3.56 | 0.75 | 1.17 |
| H2 | Tidak mempunyai fasilitas | 3 | 0.21 | 21 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 31 | 3.44 | 0.72 | 1.35 |
| H3 | Sanksi yang tidak tegas kepada anggota | 2 | 0.14 | 14 | 3 | 0.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 3 | 33 | 3.67 | 0.52 | 0.94 |
| H4 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu | 4 | 0.29 | 29 | 4 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 35 | 3.89 | 1.13 | 2.29 *1 |
| H5 | Belum dilakukan reformasi kepengurusan | 2 | 0.21 | 21 | 3 | 0.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 33 | 3.67 | 0.77 | 1.4 |
| | | 14 | Total nilai bobot faktor penghambat | | | | | | | | | | | | | 7,04 | | | | |

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

KUISIONER / PANDUAN WAWANCARA GAPOKTAN

**Judul Penelitian : Peran Modal Sosial dan Strategi Pengembangan
Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari
Kabupaten Jember**

Lokasi Penelitian : Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo

(Studi Kasus: GAPOKTAN)

Identitas Pewawancara

Nama : Nyla Zukhrufa Hadi

NIM : 081510601029

Tanggal Wawancara :

Identitas Informan

Nama Responden :

Desa :

Nama Gapoktan/Poktan :

Jumlah Anggota Gapoktan :

Status di GAPOKTAN : Pengurus/Anggotaa

Status di POKTAN : Pengurus/Anggota

No HP/Telepon Rumah :

Pekerjaan Selain Petani :

Pendidikan Terakhir :

Bergabung di Gapoktan :

Sejak tahun :

DAFTAR PERTANYAAN

I. Program PUAP

1. Apakah yang anda ketahui tentang program PUAP?
2. Bagaimana penyaluran dana PUAP sampai ke anggota?
3. Bagaimana fungsi Gapoktan terhadap program PUAP?
4. Bagaimana manajemen pengelolaan pada Gapoktan?
5. Buku administrasi apa saja yang terdapat pada Gapoktan (Pengurus)?
6. Apakah ada pembinaan/penyuluhan tentang keberadaan program PUAP dan berikan komentar anda?(paham/tidak paham)
7. Bagaimana anda menggunakan dana yang anda pinjam pada Gapoktan?
8. Bagaimana pengaruh pinjaman anda yang berasal dari Gapoktan terhadap pendapatan?
9. Bagaimana pengaruh pinjaman anda yang berasal dari Gapoktan terhadap usaha anda?
10. Bagaimana perguliran dana PUAP ?
11. Menurut anda dapat dikatakan dana PUAP tersebut berkembang itu seperti apa?
12. Adanya Program PUAP bantuan dalam bentuk apa saja yang sering diberikan oleh Gapoktan?

II. Peran Modal Sosial dalam Program PUAP

a. Kepercayaan

1. Apakah anda memiliki rasa percaya kepada anggota terkait pemanfaatan dana PUAP?

- Sangat tidak percaya
- Tidak percaya
- Cukup percaya
- Percaya
- Sangat percaya

Berawal darimana rasa kepercayaan yang timbul dalam hubungan anda tersebut?

2. Apakah anda memiliki rasa percaya kepada pengurus sebagai pemanfaatan dan pengelolaan dana PUAP?

- Sangat tidak percaya
- Tidak percaya
- Cukup percaya
- Percaya
- Sangat percaya

Berawal darimana rasa kepercayaan yang timbul dalam hubungan anda tersebut?

3. Berapa nominal pinjaman anda dari Gapoktan?

- Rp 150.000-Rp 350.000 (rendah)
- Rp 350.000-Rp 600.000 (sedang)
- Rp 600.000-..... (tinggi)

4. Apakah yang mempengaruhi anda mendapatkan nominal sekian?

- Kekerabatan
- Posisi dan status sosial

5. Bagaimana cara anda membuat seseorang percaya kepada anda terkait adanya dana PUAP melihat anda sebagai anggota yang bertindak sebagai pemanfaat?
6. Jika ada suatu bantuan dari pemerintah untuk petani, siapa yang paling anda percaya untuk mengelola bantuan tersebut?
7. Pernahkah terjadi masalah kepercayaan pada kelompok serta dampaknya?alasan!

b. Jaringan

1. Bila anda memperoleh dana PUAP, siapa yang membantu dalam memberikan keterangan prosedur pencairan?
2. Siapa yang membantu anda dalam urusan administrasi pencairan dana PUAP?
3. Berapa nominal pinjaman anda dari Gapoktan?
 - a. Rp 150.000-Rp 350.000 (rendah)
 - d. Rp 350.000-Rp 600.000 (sedang)
 - e. Rp 600.000-..... (tinggi)
4. Apakah yang mempengaruhi anda mendapatkan nominal sekian?
 - a. Basis jaringan
 - b. Interaksi
5. Jika anda memperoleh informasi tentang segala hal dari Gapoktan kepada siapa saja anda melanjutkan informasi tersebut?
6. Informasi apa biasanya itu?

7. Dalam bentuk apa informasi disalurkan?
8. Alat telekomunikasi apakah yang biasanya dipakai untuk berkomunikasi?
9. Apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi tersebut?
10. Siapa yang memberikan pembinaan/penyuluhan terkait program PUAP?
11. Dimana biasanya tempat yang digunakan untuk pembinaan/ penyuluhan tersebut?

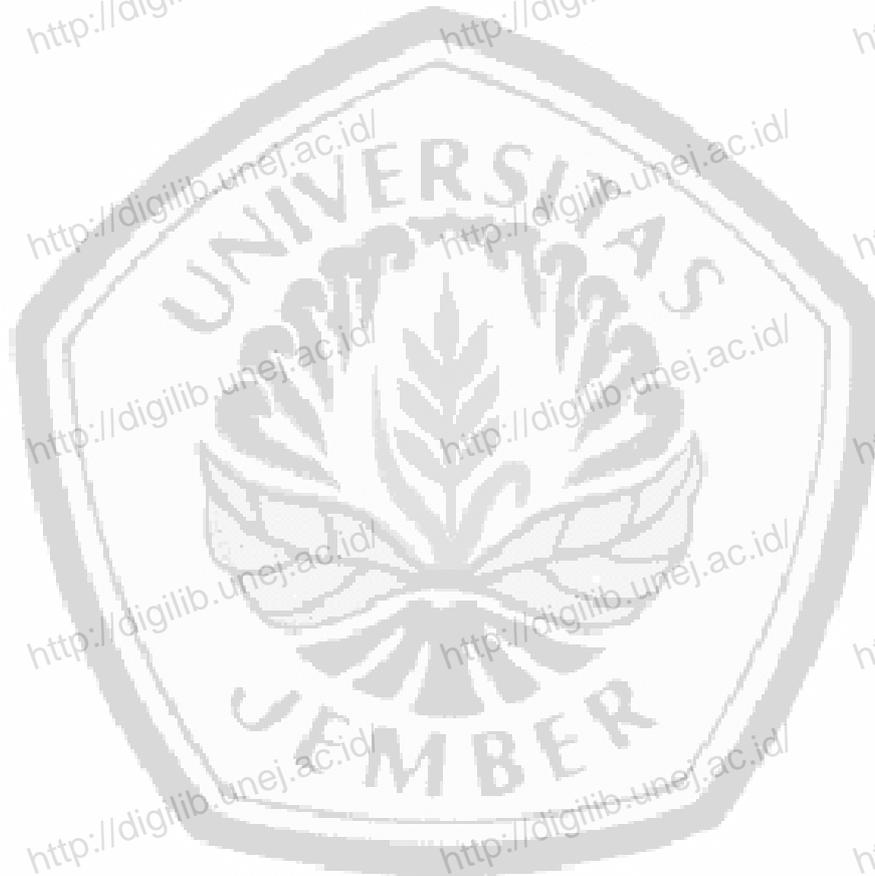
c. Norma

1. Sebut peraturan apa saja yang dibuat dan diterapkan dalam Gapoktan?
2. Sanksi-sanksi apa saja yang diberikan apabila terjadi pelanggaran peraturan? Jelaskan!
3. Apakah anda rutin dalam mengikuti pertemuan Gapoktan?
4. Sanksi apa yang didapat jika tidak mengikuti pertemuan rutin?
5. Bagaimana prosedur pencairan peminjaman anda?
6. Bagaimana prosedur pengembalian peminjaman anda?
7. Apakah anda lancar dalam pengembalian pinjaman?
 - a. Lancar
 - b. Kurang LancarAlasan:

8. Sanksi apa yang didapat apabila terlambat mengembalikan pinjaman modal?

9. Apa saja syarat dalam pencairan dana PUAP?

10. Apakah ada masalah dalam pengembalian dana PUAP?



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

KUISIONER FORCE FIELD ANALYSIS (FFA)

Judul Penelitian : Peran Modal Sosial dan Strategi Pengembangan
Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari
Kabupaten Jember

Lokasi Penelitian : Desa Sidorejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan
Umbulsari Kabupaten Jember

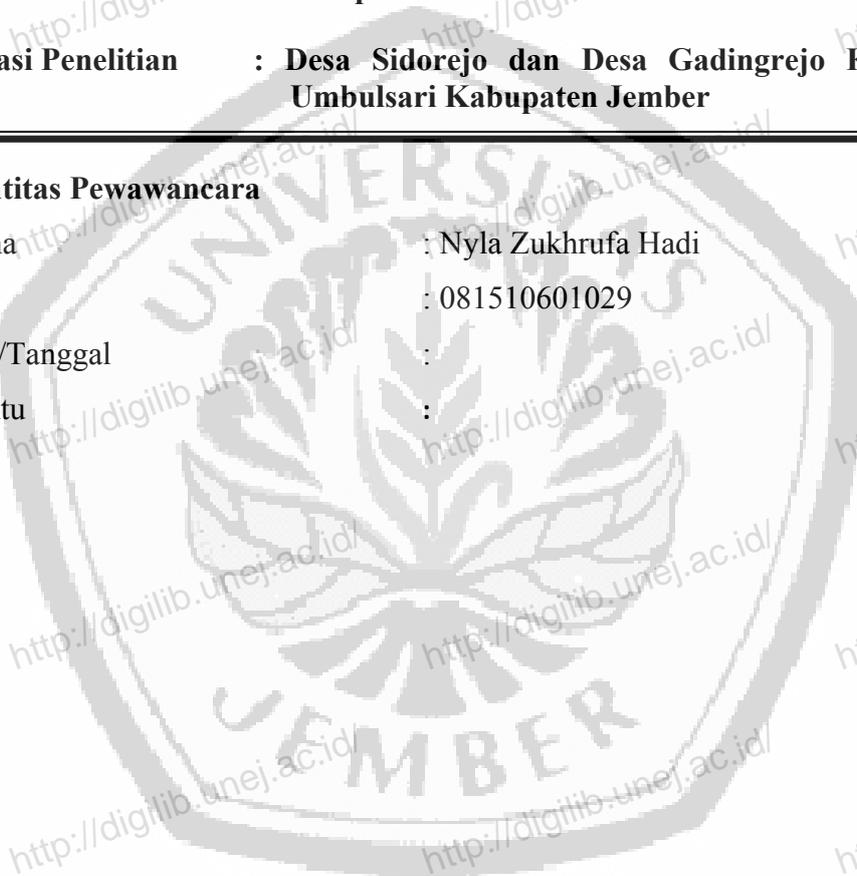
Identitas Pewawancara

Nama : Nyla Zukhrufa Hadi

Nim : 081510601029

Hari/Tanggal :

Waktu :



Petunjuk Pengisian Tabel

1. Responden diminta untuk mengisi tabel perbandingan antar sub-fakta dari masing-masing faktor pendorong dan penghambat.
2. Diantara dua faktor yang diperbandingkan, Bapak/Ibu cukup menuliskan nomor dari faktor yang lebih penting pada kolom yang berkesesuaian.
3. Untuk Nilai Dukungan (ND) dan Nilai (NK) diisi berdasarkan nilai skor:
 - 5: Sangat tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
 - 4: Tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
 - 3: Cukup tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
 - 2: Kurang tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
 - 1: Sangat kurang nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan



**Tabel Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP
Di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

| NO | FAKTOR PENDORONG | NO | FAKTOR PENGHAMBAT |
|----|----------------------------------|----|---|
| D1 | Gapoktan memiliki badan hukum | H1 | Terbatasnya modal pinjaman |
| D2 | Mempunyai fasilitas pinjaman | H2 | Tidak maksimalnya dukungan pemerintah setempat |
| D3 | Memiliki Program Jangka Panjang | H3 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu |
| D4 | Adanya pelatihan | H4 | Pengurus Gapoktan tidak aktif |
| D5 | Sanksi yang tegas kepada anggota | H5 | Fungsi kontrol pengawas kurang efektif |

**Tabel Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP
Di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

| NO | FAKTOR PENDORONG | NO | FAKTOR PENGHAMBAT |
|----|--------------------------------------|----|---|
| D1 | Tidak ada masalah dari luar Gapoktan | H1 | Gapoktan belum memiliki badan hukum |
| D2 | Terbentuknya kelompok mikro | H2 | Tidak mempunyai fasilitas pinjaman |
| D3 | Memiliki Program Jangka Panjang | H3 | Lemahnya kesadaran peminjam dalam mengembalikan tepat waktu |
| D4 | Adanya pelatihan | H4 | Sanksi yang tidak tegas kepada anggota |
| D5 | Pengurus Gapoktan aktif | H5 | Belum dilakukan reformasi kepengurusan |

Pertanyaan

1. Jika Bapak/Ibu diminta membandingkan antara faktor-faktor dari Faktor Pendorong Pengelolaan Dana PUAP di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, mana yang lebih penting antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mendukung/mendorong kegiatan pengelolaan dana PUAP yang bertempat pada Gapoktan Mulyo Abadi.

| No | Faktor Pendorong | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | NU | BF |
| D1 | Gapoktan memiliki badan hukum | | | | | | | |
| D2 | Mempunyai fasilitas | | | | | | | |
| D3 | Memiliki program jangka panjang | | | | | | | |
| D4 | Adanya Pelatihan | | | | | | | |
| D5 | Sanksi yang tegas pada anggota | | | | | | | |
| | Total Urgensi | | | | | | | |

2. Jika Bapak/Ibu diminta membandingkan antara faktor-faktor dari Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, mana yang lebih penting antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mendukung/mendorong kegiatan pengelolaan dana PUAP yang bertempat pada Gapoktan Mulyo Abadi.

| No | Faktor Penghambat | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | NU | BF |
| H1 | Terbatasnya modal pinjaman | | | | | | | |
| H2 | Dukungan dari pihak pemerintah setempat tidak maksimal | | | | | | | |
| H3 | Lemahnya kesadaran peminjaman dalam mengembalikan tepat waktu | | | | | | | |
| H4 | Pengurus Gapoktan tidak aktif | | | | | | | |
| H5 | Fungsi kontrol pengawas kurang efektif | | | | | | | |
| Total Urgensi | | | | | | | | |

Ketentuan Pengisian Tabel:

1. Memberikan Nilai Dukungan (ND) masing-masing faktor.
2. Menganalisa antara dua faktor yang diperbandingkan pada Nilai Keterkaitan (NK).
3. Memberikan nilai keterkaitan faktor (pada poin 1) dalam pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan.
4. Nilai Skor diisi sama dengan petunjuk sebelumnya.

Pertanyaan

1. Jika Bapak/Ibu diminta membandingkan antara faktor-faktor dari Faktor Pendorong Pengelolaan Dana PUAP di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, mana yang lebih penting antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mendukung/mendorong kegiatan pengelolaan dana PUAP yang bertempat pada Gapoktan Karya Tani.

| No | Faktor Pendorong | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | NU | BF |
| D1 | Tidak ada masalah luar Gapoktan | | | | | | | |
| D2 | Terbentuknya kelompok mikro | | | | | | | |
| D3 | Memiliki program jangka panjang | | | | | | | |
| D4 | Adanya Pelatihan | | | | | | | |
| D5 | Pengurus Gapoktan aktif | | | | | | | |
| | Total Urgensi | | | | | | | |

2. Jika Bapak/Ibu diminta membandingkan antara faktor-faktor dari Faktor Penghambat Pengelolaan Dana PUAP di Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, mana yang lebih penting antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mendukung/mendorong kegiatan pengelolaan dana PUAP yang bertempat pada Gapoktan Karya Tani.

| No | Faktor Penghambat | Tingk. komparasi Urgensi | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | NU | BF |
| H1 | Tidak memiliki badan hukum | | | | | | | |
| H2 | Tidak mempunyai fasilitas | | | | | | | |
| H3 | Lemahnya kesadaran peminjaman dalam mengembalikan tepat waktu | | | | | | | |
| H4 | Sanksi yang tidak tegas | | | | | | | |
| H5 | Belum dilakukan reformasi kepengurusan | | | | | | | |
| Total Urgensi | | | | | | | | |

Ketentuan Pengisian Tabel:

1. Memberikan Nilai Dukungan (ND) masing-masing faktor.
2. Menganalisa antara dua faktor yang diperbandingkan pada Nilai Keterkaitan (NK).
3. Memberikan nilai keterkaitan faktor (pada poin 1) dalam pengelolaan dana PUAP pada Gapoktan.
4. Nilai Skor diisi sama dengan petunjuk sebelumnya.

